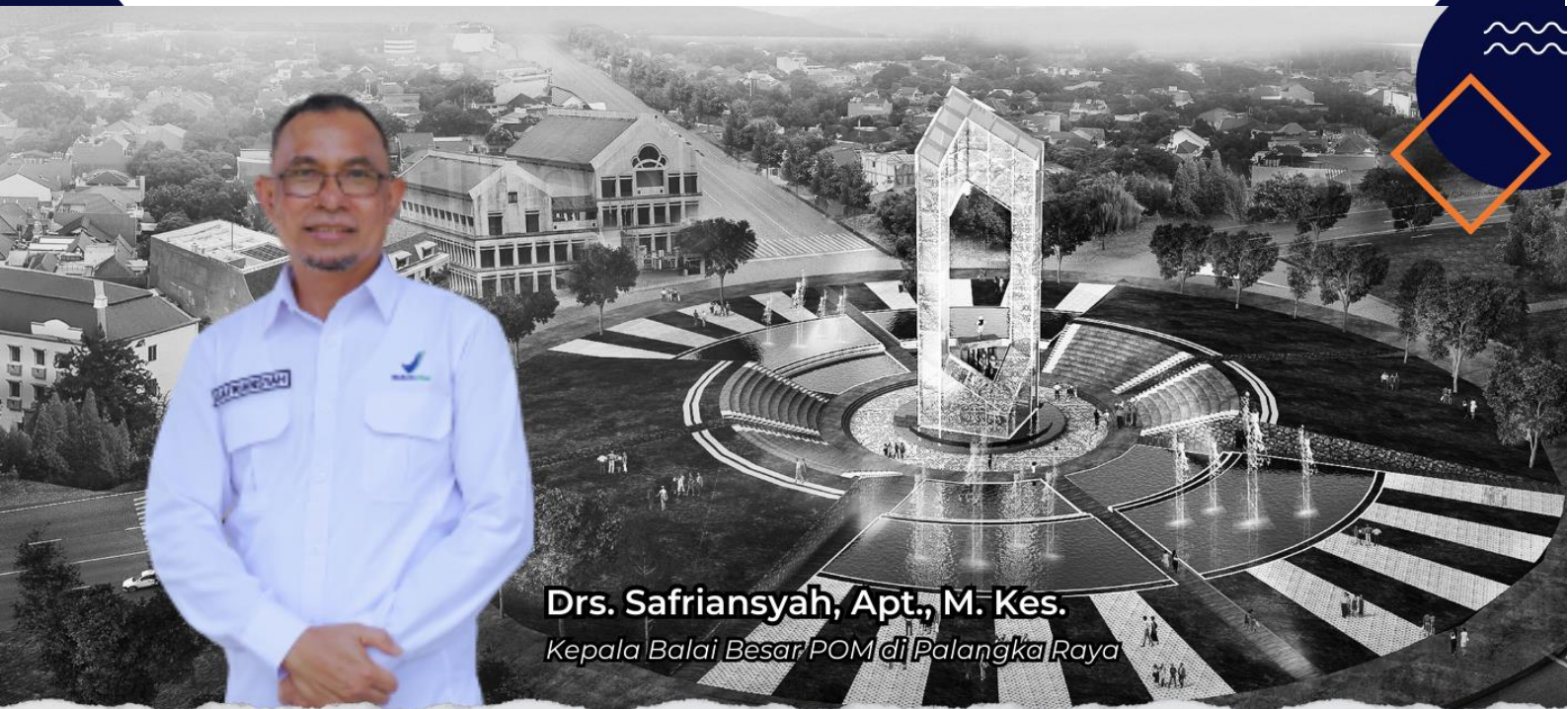




LAPORAN KINERJA

Interim Triwulan 1
2022





Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Kata Pengantar

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Palangka Raya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2023, BBPOM di Palangka Raya mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103,83%.

Dalam laporan ini tertuang perjanjian kinerja tahun 2023 dan indikator kinerja utama yang mengalami perubahan berdasarkan reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020-2024 yaitu perubahan target, perubahan nama indikator kinerja, penambahan indikator baru, indikator kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya hanya dilakukan pengukuran pada tahun 2020 dan 2021 dan mulai tahun 2022 tidak lagi dilakukan pengukuran karena sudah tersedia pada indikator nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya.



Drs. Safriansyah, Apt., M. Kes.

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Di samping itu, laporan ini juga memuat perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I, perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Palangka Raya dan juga sebagai umpan balik bagi organisasi dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pada triwulan berikutnya serta pencapaian target tahun mendatang.

Palangka Raya, April 2023

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya,



Drs. Safriansyah, Apt.MKes.





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Interim I BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palangka Raya atas penggunaan anggarannya pada triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Interim I BBPOM di Palangka Raya merupakan wujud dari kinerja triwulan I dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2020-2024.

Pada triwulan I tahun 2023, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 105.74%. Dari 11 sasaran kegiatan tersebut, 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur pada triwulan I, 4 sasaran kegiatan lainnya dilakukan pada akhir tahun 2023. Pengukuran terhadap tujuh sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023 terdapat 5 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil memenuhi ekspektasi dan tidak dapat disimpulkan dan 2 sasaran kegiatan dengan hasil belum memenuhi ekspektasi sebagai berikut :

1. BBPOM di Palangka Raya **berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **efektif** mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 104.65% yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
2. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS sebesar 93.44% yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja.
3. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 97.22% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
4. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 91.65% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
5. BBPOM di Palangka Raya **berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **efektif** dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 120% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.



6. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi dengan efektif dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 104% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.
7. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi dengan kurang efektif dalam pengelolaan keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 120% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian antara 31.95% sampai dengan 566.67%. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut BBPOM di Palangka Raya memperoleh alokasi anggaran pada TA 2023 sebesar Rp 21.461.208.000,-. Pada tanggal 14 Desember 2022 terdapat pengurangan pagu yang dapat digunakan dalam bentuk *Automatic Adjustment* tahap I sebesar Rp 1.001.921.000,- pada belanja pegawai. Realisasi anggaran terhadap pagu aktif yang dikelola sebesar 17.24%. BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 20 kegiatan utama dengan hasil 8 kegiatan utama efisien dan 12 kegiatan utama tidak efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara -0.24 hingga 9.0 dengan Tingkat Efisiensi total sebesar 0.32 (efisien). Meskipun demikian, dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan perbaikan yaitu kualitas perencanaan yang detail dan *applicable* dalam penyusunan PoA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, perkuatan *supporting* data dari tim pengelola keuangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

BBPOM di Palangka Raya juga mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya aplikasi e-UMKM Harati (fasilitasi/pendampingan UMKM/IRTP dalam proses sertifikasi) yang bertransformasi menjadi UMKM Berdikari (UMKM Bertekad Kuat, Inovatif, Kreatif dan Mandiri) yang merupakan penyempurnaan dari e-UMKM Harati di mana layanan pendampingan UMKM yang sebelumnya dilakukan secara online kini dilakukan secara intensif dengan skema 1 UMKM 1 fasilitator sebagai solusi nyata pendampingan prima kepada pelaku usaha, melibatkan unsur lintas sektor di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku usaha dan perguruan tinggi (mahasiswa sebagai fasilitator), Duta Layanan (tamu dilayani oleh Duta

Layanan yang sudah mendapatkan pelatihan melayani konsumen yang baik dengan menerapkan 5S), Kahayan (Kemudahan Layanan Pengujian), Garansi Layanan Prima (melampirkan banner 'Garansi Layanan Prima' dengan mencantumkan syarat dan ketentuan) dan Laura Jempol (Layanan Uji Gratis Jemput Bola, merupakan inovasi layanan pengujian bagi masyarakat).

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap organisasi yang merupakan upaya terbaik seluruh pegawai namun masih banyak hal-hal yang perlu penyempurnaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Oleh karena itu, kami akan selalu mendorong untuk bersama-sama mengupayakan perbaikan bagi BBPOM di Palangka Raya dan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan budaya Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama, Inovatif dan Responsif. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya triwulan II tahun 2023. Hal ini akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi BBPOM di Palangka Raya.

Kami mengapresiasi seluruh lintas sektor terkait yang telah bekerja sama dengan BBPOM di Palangka Raya dan seluruh masyarakat yang sering berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berharap kerjasama akan semakin erat dan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah semakin merasakan kehadiran BBPOM di Palangka Raya. Semoga Laporan Kinerja Interim ini mendapatkan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja dan bermanfaat baik internal maupun eksternal.



Palangka Raya, 17 Februari 2023

Kepala BBPOM di Palangka Raya

Drs Safriansyah, Apt., M.Kes

Highlight - Januari 2023



KONFERENSI PERS HASIL OPERASI PENINDAKAN PEREDARAN OBAT ILEGAL

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menggelar konferensi Pers terkait Operasi Penindakan Peredaran Obat Ilegal dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Obat di Masyarakat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 bertempat di aula Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dihadiri oleh unsur Criminal Justice System yaitu dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

SURVEILEN PERTAMA DAN WITNESS SNI ISO/IEC 17025:2017 LABORATORIUM PENGUJIAN BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA OLEH KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)

Pada tanggal 26-27 Januari 2023 telah dilakukan Surveilen pertama dan Witness SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Surveilen ini dipimpin oleh Pak Dr. Komar Sutriah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku Asesor Kepala yang mengaudit di sistem manajemen ISO/IEC 17025 dan Pengujian Pangan.



ADVOKASI & KOORDINASI BERSAMA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Mengawali tahun dan semangat baru 2023, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya, Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes, melakukan advokasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin 2 Januari 2023. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat menyambut baik hal-hal yang disampaikan Kepala BBPOM di Palangka Raya. Beliau juga berharap pendampingan pelaku usaha selalu dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai jaminan mutu sekaligus meningkatkan daya saing usaha di bidang obat dan makanan di daerah.





Highlight - Februari 2023



PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI MELALUI AKSELERASI ASN BERAKHLAK

BBPOM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi melalui akselerasi ASN Ber-AKHLAK pada Sabtu, 11 Februari 2023 bertempat di The Breeze Waterpark Banjarbaru. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan merupakan gabungan dari keberhasilan pengelolaan secara internal dan eksternal, tanggap terhadap isu-isu terkini dan mengakomodir kepentingan dari stakeholder serta berdasarkan arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Pengawasan berbasis risiko akan berpeluang terhadap efektifitas dan efisiensi setiap program yang dilakukan, strategi akan bersifat taktis dengan penggunaan sumber daya yang tepat.



TINGKATKAN JAMINAN HASIL UJI LABORATORIUM BBPOM DI PALANGKA RAYA LAKUKAN REKALIBRASI ALAT

Laboratorium BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu laboratorium terakreditasi menjalankan prosedur kalibrasi dengan mengundang Tim kalibrasi kompeten, yaitu: Nadhia Fitri Wijayanti, S. Farm., Apt., Vika Septa Widara, S. Si. dan Parno, S. Si. dari Laboratorium Kalibrasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM RI. Kegiatan kalibrasi alat dilakukan selama 6 hari pada 30 Januari sampai dengan 4 Februari 2023.



ADVOKASI DAN KOMITMEN LINTAS SEKTOR KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PRIORITAS NASIONAL

Sekretaris Daerah Barito Utara atas nama Bupati Barito Utara bersama lintas sektor terkait berkomitmen siap mendukung penuh pelaksanaan Program Terpadu Prioritas Nasional demi mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan sekaligus memperkuat ekonomi bangsa, khususnya di Kabupaten Barito Utara.



Highlight - Maret 2023



BBPOM DI PALANGKA RAYA BERHASIL MEMPERTAHANKAN SERTIFIKASI ISO 14001:2015

Balai Besar POM di Palangka Raya telah menerapkan ISO 14001:2015 sejak tahun 2011. Sebagai bukti komitmen Balai POM di Palangka Raya dalam penerapan ISO 14001 terhadap pengelolaan lingkungan, pada tanggal 27 s.d. 28 Februari 2023 dilakukan Audit Surveilen ISO 14001:2015 Balai Besar POM di Palangka Raya oleh Intertek SAI Global. Hasil dari audit menyatakan bahwa Balai Besar POM di Palangka Raya dapat melanjutkan Sertifikasi ISO 14001:2015 hingga 22 Januari 2024.

BERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI KIE, BBPOM DI PALANGKA RAYA SELENGGARAKAN SOSIALISASI TATA CARA PENDAFTARAN PRODUK PANGAN OLAHAN

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha pangan terkait peraturan perundang-undangan yang terkini sehingga pelaku usaha pangan yang ada di Kota Palangka Raya khususnya mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di kancah nasional bahkan di internasional.



INOVASI UMKM BERDIKARI : KOMITMEN BBPOM DI PALANGKA RAYA BERIKAN LAYANAN PENDAMPINGAN PRIMA TERHADAP UMKM DI KALIMANTAN TENGAH

Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan launching program inovasi layanan publik UMKM BERDIKARI. Sebagai wujud komitmen Balai Besar POM di Palangka Raya dalam memberikan Pendampingan Prima kepada pelaku usaha yang akan mendaftarkan nomor izin edar BPOM pada produknya. UMKM BERDIKARI menawarkan solusi nyata dengan memberikan pendampingan secara intensif menggunakan skema 1 UMKM 1 Fasilitator.



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	4
DAFTAR ISI	10
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR TABEL	12
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Gambaran Umum Organisasi	14
1.3 Struktur Organisasi	16
1.4 Aspek Strategis Organisasi	19
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2024	33
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	35
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
2.5. Metode Pengukuran	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
BAB IV PENUTUP	197
4.1. Kesimpulan	197
4.2. Rencana Perbaikan Kinerja	198
Lampiran I. Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya 2020-2024	203





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya	16
Gambar 2. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (disertai keterangan jarak tempuh dari pusat kantor UPT)	22
Gambar 3. Lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya dan dari Kota Pangkalan Bun	22
Gambar 4. Visi dan Misi BBPOM di Palangka Raya 2020-2024	34
Gambar 5. Peta Strategis Level II BBPOM di Palangka Raya.....	35





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai BBPOM Palangka Raya & Loka POM Kab. Kotawaringin Barat ..	20
Tabel 2. ABK BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	21
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Palangka Raya.....	37
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2021 berdasarkan	38
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2021 berdasarkan Reviu Resntra Tahun 2021-2022	44
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022	47
Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.....	49





BAB 1

Pendahuluan

- *Latar Belakang*
- *Gambaran Umum Organisasi*
- *Struktur Organisasi*
- *Aspek Strategis Organisasi*
- *Analisis Lingkungan Strategis*
- *Isu Strategis*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan terbit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 pada tanggal 4 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Palangka Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (terdiri dari 14 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

1. BBPOM di Palangka Raya, cakupan pengawasan meliputi 10 kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya.

2. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, cakupan pengawasan meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2021, mulai tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjadi Loka POM Satker Mandiri sehingga kinerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai Tahun 2022 tidak lagi menjadi bagian dari kinerja BBPOM di Palangka Raya. Balai Besar POM di Palangka Raya menyelenggarakan tugas dan fungsi teknis sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. Pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh BBPOM di Palangka Raya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata

laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjamin mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahatanganan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM mengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
 - b. Subkelompok substansi umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM mengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pengujian, menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam

rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan. Kelompok substansi pengujian terdiri atas:

- i. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
 - ii. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi.
- b. Kelompok substansi pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling, serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan. Kelompok substansi pemeriksaan terdiri atas:
- i. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 - ii. Subkelompok substansi sertifikasi,
- c. Kelompok substansi penindakan, menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi, menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi; memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas; dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kelompok substansi dan unit kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator. Subkoordinator jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis melalui koordinator sesuai dengan kelompok substansi dan unit kerjanya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan yang komprehensif, berbasis ilmiah, dan berstandar internasional meliputi pengawasan produk sebelum beredar (*pre-market*) sampai dengan setelah beredar di pasaran (*post-market control*), termasuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta dilakukan upaya pengawasan dari aspek permintaan (*demand*) melalui pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM bekerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. BPOM mendorong penerapan *Risk Management Programme* mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* atau reaktif terhadap pelanggaran standar keamanan obat dan makanan diubah menjadi *proaktif control atau preventif*, hal ini didasarkan bahwa tindakan hukum tidak selalu dapat memberikan efek jera dan mengungkap akar masalah tindak pidana obat dan makanan.

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 dan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) pilar inti kegiatan yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi fasilitas produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup sampling dan pengujian, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi upaya penguatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Palangka Raya perlu didukung adanya peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Internal

- Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2022 sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, 2 (dua) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar sehingga jumlah pegawai yang aktif 59 (lima puluh sembilan). Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan, unit kerja dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

	Bagian /KS	S2	Apt	S1	D3	SMF/SMA
BBPOM di Palangka Raya	TU	2	2	9	1	4
	Pemeriksaan	2	3	3	0	2
	Pengujian	0	9	8	3	3
	Infokom	0	4	1	0	0
	Penindakan	0	2	3	0	0
	Total	4	20	24	4	9

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai BBPOM di Palangka Raya

	ABK	Existing	Gap
BBPOM di Palangka Raya	102	61	41

Tabel 1.2. ABK BBPOM di Palangka Raya

- **Sumber Daya Lainnya**

Kantor BBPOM di Palangka Raya memiliki luas lahan 10.788 m² dengan luas bangunan 2.753 m², selain digunakan sebagai fungsi perkantoran dan administrasi juga termasuk fungsi pelayanan publik dan pengujian dengan peralatan laboratorium yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 serta manajemen lingkungan ISO 14001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Palangka Raya:

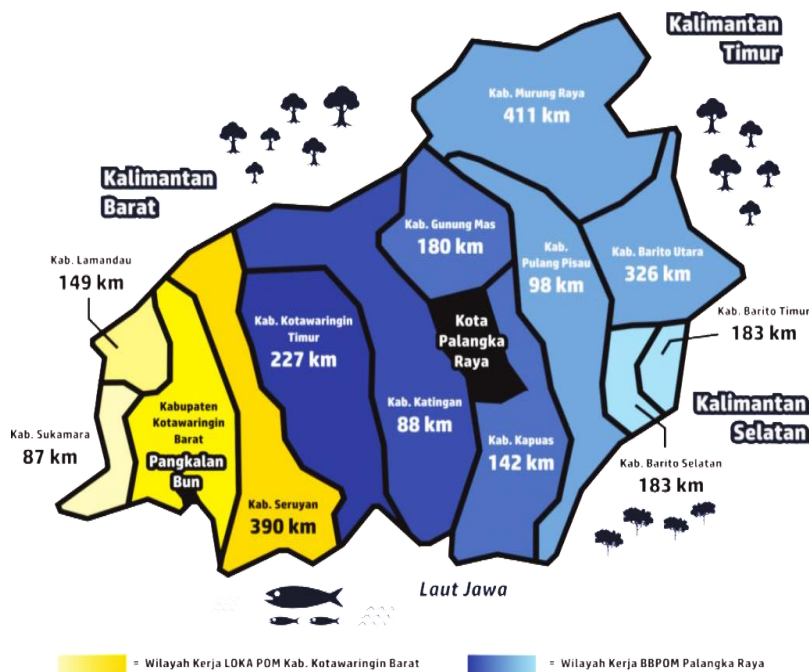
- Laboratorium yang menerapkan ISO/IEC 17025:2017 di wilayah Kalimantan Tengah
- Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015
- Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015
- Laboratorium rujukan sampel SIDIK di wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah

- **Anggaran**

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 Nomor : SP DIPA- 063.01.2.432872/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 28.070.532.000,-. Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 27.777.127.000,-. Pada tanggal 25 November 2022 dilakukan Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 3.899.863.000,- sehingga pagu DIPA menjadi Rp 23.877.264.000,.

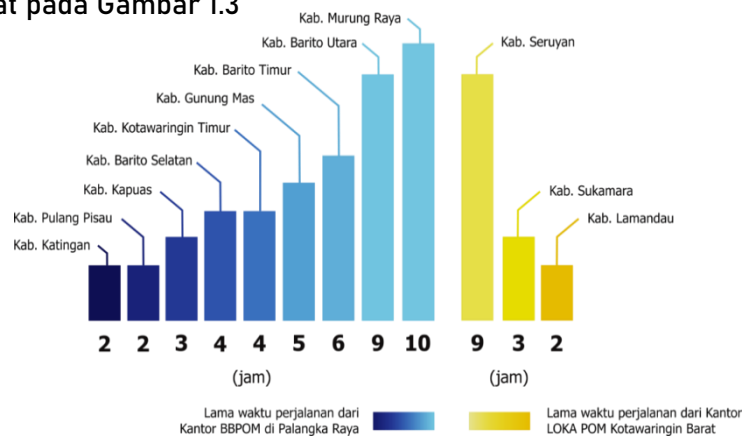
- **Kondisi Geografis dan Demografi**

Provinsi Kalimantan Tengah atau dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai, mempunyai luas sekitar 153.364 km yang merupakan provinsi nomor dua terluas di Indonesia. Cakupan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2.769.156 jiwa. Dengan luas wilayah tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin terbuka. Dengan posisinya yang berada ditengah-tengah wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah banyak dijadikan sebagai *interconnection* atau penghubung dengan daerah-daerah lain. Selain itu, dengan adanya pelabuhan di beberapa kabupaten, seperti di Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara dan Pulang Pisau, maka akses masuk ke wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (disertai keterangan jarak tempuh dari pusat kantor UPT)

Jarak tempuh dan lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya ke wilayah kerja dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 1.3. Lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya dan dari Kota Pangkalan Bun

Fasilitas produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi usaha kecil obat tradisional, industri pangan dan industri rumah tangga pangan. Sedangkan fasilitas distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, apotek, toko obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Gudang Farmasi kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, klinik, fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Jumlah fasilitas produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada tabel 1,4 dan 1,5 di bawah ini.

IRTP	MD	UKOT	UMOT
1158	5	0	5

Tabel 1.3. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah

PBF	Apotek	Toko Obat	Instalasi Farmasi	RS	Puskesmas	Klinik	Fasilitas Distribusi	Fasilitas Distribusi	Fasilitas Distribusi
7	315	177	15	28	193	142	251	424	647

Gambar 1.4. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah

Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya antara lain:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional merupakan perubahan fundamental sistem Kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tiga tujuan utama disusunnya Reformasi SKN yaitu (1) Meningkatnya kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security and resilience*), (2) Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses *supply side* pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotive dan preventif. Reformasi SKN terbagi atas 8 area strategis yang memberikan daya ungkit pembangunan Kesehatan ke depan dengan Pelayanan Kesehatan Dasar menjadi arus utama dalam kedelapan area tersebut. BBPOM di Palangka Raya dalam Reformasi Sistem Kesehatan Nasional mendukung 3 (tiga) area reformasi, yaitu (1) Pengendalian Penyakit dan Imunisasi, yaitu

intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka mutu vaksin, (2) Ketahanan Kesehatan (Health Security), melalui penguatan kapasitas dan kemampuan uji RT PCR Covid-19 Laboratorium BBPOM di Palangka Raya; dan (3) Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Stunting yang mengancam kecerdasan bangsa

Stunting atau kekerdilan adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak, sehingga anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

BPOM memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, Intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020 ada 5 (lima) kabupaten yang masuk dalam kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2018 – 2020 yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

BBPOM di Palangka Raya dalam strategi percepatan penurunan stunting di wilayah Kalimantan Tengah melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta operasi intelijen dalam dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dirilis pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat turun dari

32,3% pada tahun 2019 menjadi 27,4% pada tahun 2021 ini dan pada akhir Desember 2021 Kalimantan Tengah sudah tidak lagi masuk kelompok 5 besar provinsi dengan angka stunting tertinggi. Kalimantan Tengah berada di urutan ke-15 terendah dan keluar dari label merah provinsi dengan stunting tertinggi.

3. Sumber Daya Manusia

SDM BBPOM di Palangka Raya sampai dengan Maret 2022 berjumlah 61 (enam puluh satu) orang, 2 (dua) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar sehingga jumlah pegawai yang aktif 59 (lima puluh sembilan). Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Palangka Raya belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. BBPOM di Palangka Raya sebagai organisasi yang *scientific based* melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dengan berbagai macam latar belakang pendidikan.

Dengan jumlah SDM yang terbatas dan harus menjawab tantangan yang semakin kompleks BBPOM di Palangka Raya terus berusaha meningkatkan kompetensi SDM yang ada baik *hard skill* maupun *soft skill* untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. BBPOM di Palangka Raya juga mempunyai strategi pengembangan pegawai sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis serta meningkatkan kemampuan *soft competence* untuk menghasilkan pribadi yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Selain itu, BBPOM di Palangka Raya terus melakukan penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran dibidang Obat dan Makanan.

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya, laboratorium mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, hasil pengujian produk obat dan makanan dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal). Untuk itu BBPOM Palangka Raya terus melakukan peningkatan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal

dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Palangka Raya telah didukung dengan *instrument* laboratorium teknologi kompleks seperti LCMSMS, GCMS dan *real time* PCR.

5. Disintegrasi Data

Pada era revolusi teknologi (digitalisasi) saat ini, kita dituntut untuk adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni;
- b. Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan; dan
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini adalah banyaknya aplikasi dibuat oleh masing-masing Unit Kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Permintaan banyaknya laporan dari berbagai Unit Kerja dengan data yang sama namun berbeda format laporannya menuntut tenaga dan waktu ekstra dalam mengolahnya sedangkan sumber daya manusia BBPOM Di Palangka Raya sangat terbatas. Pengelolaan *big data* yang tepat dan efisien serta satu data untuk semua akan meningkatkan efektivitas kinerja BBPOM di Palangka Raya. Bank data diperlukan sebagai satu sumber pengolahan data dan laporan yang diyakini sebagai sumber informasi penting dan bermakna yang akan menjadi sumber data bagi BPOM sebagai dasar pembuatan kebijakan.

6. Kemandirian Pelaku Usaha (UMKM) untuk Peningkatan Daya Saing

Jumlah pelaku usaha pangan mikro dan kecil yang jumlahnya cukup besar di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pelaku usaha UMKM pangan olahan industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga perlu dilakukan pemetaan berbasis resiko dan langkah-langkah pendampingan dari BBPOM di Palangka Raya untuk meminimalisir adanya:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang peningkatan daya saing perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;

- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan, keamanan pangan (hygiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan); dan
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Sebagai salah satu wujud dari misi kedua yaitu mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan, BBPOM di Palangka Raya menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki produk yang aman dan mampu berdaya saing. Beberapa kegiatan berupa pendampingan dan bimbingan teknis telah dilakukan terhadap beberapa UMKM Pangan Olahan yang dianggap layak untuk naik kelas dari nomor P-IRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi nomor MD dari Badan POM, serta bimbingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada pelaku usaha Obat tradisional dan bimbingan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) pada pelaku usaha Kosmetik.

7. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBK)

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.08.15.34097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. *Road Map* BPOM memuat Rencana Aksi dari 9 (Sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan *quick wins*. BBPOM di Palangka Raya melakukan 6 area perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. BBPOM di Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah mencanangkan Zona Integritas dan mengajukan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) sejak tahun 2019. Tahun 2022 Balai Besar POM di Palangka Raya kembali

mempersiapkan pengajuan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBK telah diluncurkan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain e-UMKM HARATI yaitu aplikasi untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi UMKM Pangan kepada Masyarakat, inovasi KAHAYAN (Kemudahan Layanan Pengujian) dalam rangka peningkatan kecepatan pelayanan (*timeline*) pengujian sampel pihak ketiga dan layanan *on call* di hari libur bagi masyarakat, inovasi PENTOL ISI URAT (Paman Pentol Pemberi Informasi untuk Masyarakat) yaitu Program kegiatan pemberdayaan Komunitas Pedagang Pentol dalam rangka penyebaran informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat.

8. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk peraturan gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait

atas rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM Di Palangka Raya sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

9. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan seperti *advance robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan, dan kosmetik semakin beragam. Indonesia merupakan negara terbesar dalam penggunaan media internet untuk belanja secara daring (online) dimana komoditi makanan dan personal care menduduki nomor urutan pertama dan *fashion and beauty* di urutan berikutnya dalam hal kategori produk yang paling dicari secara online oleh masyarakat Indonesia

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam pilihan kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena masyarakat berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman masih rendah serta pengaruh gencarnya promosi iklan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik pada situs daring dan tawaran-tawaran menarik dari penjual menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan berupaya aktif melakukan patroli siber dalam rangka pengawasan obat dan

makanan secara daring untuk melindungi masyarakat dari obat ilegal, tidak bermutu dan berbahaya bagi kesehatan dengan mekanisme pengusulan takedown kepada idEA (Indonesian E-Commerce Association) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika - Direktorat Pengendalian Aptika atau pengusulan *digital offender profiling* ke direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI. Balai Besar POM di Palangka Raya aktif dalam patroli siber obat dan makanan dan upaya tindak lanjut dari temuan terkait peredaran obat dan makanan secara daring

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian BBPOM di Palangka Raya terus beradaptasi untuk melakukan digitalisasi *instrument* pengawasan yang berbasis kemandirian industri dan distribusi dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan.

10. Pandemi Global Covid-19

Pada 02 Maret 2020, diumumkan kasus pertama corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia dan pada 11 Maret 2021 WHO menyatakan coronavirus sebagai pandemi global.

Cara penularan melalui sistem pernafasan bawah yang berasal dari droplet manusia yang terinfeksi yang menempel pada benda-benda yang terkena droplet dan terbawa menempel ke daerah sekitar hidung manusia yang tertular. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah demi menekan laju penyebaran, diantaranya adalah *physical/social distancing* dan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dilakukan tes massal atau *rapid test*, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu

dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan, pelayanan publik dioptimalkan melalui media online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket berdasarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor KP.11.01.2.24.03.20.21 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan POM dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien.

Selain itu Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung pencegahan dan penyebaran Covid-19 dengan cara mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat covid-19 di wilayah BBPOM di Palangka Raya. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), berperan aktif dalam pengawasan mutu dan keamanan Vaksin Covid 19 serta menjaga Integritas Rantai Suplai Vaksin di Provinsi Kalimantan Tengah, berperan aktif pada peningkatan kapasitas testing uji RT PCR Covid-19, dalam hal ini BBPOM di Palangka Raya melakukan pembangunan Laboratorium berstandar *Biosafety* Level 2 yang dalam perkembangannya BBPOM di Palangka Raya menunggu penetapan Laboratorium BBPOM di Palangka Raya sebagai Laboratorium jejaring Laboratorium Covid-19 dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.



BAB 2

Perencanaan Kinerja

- *Rencana Strategis*
- *Rencana Kerja Tahun 2023*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
- *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)*
- *Metode Pengukuran*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2024

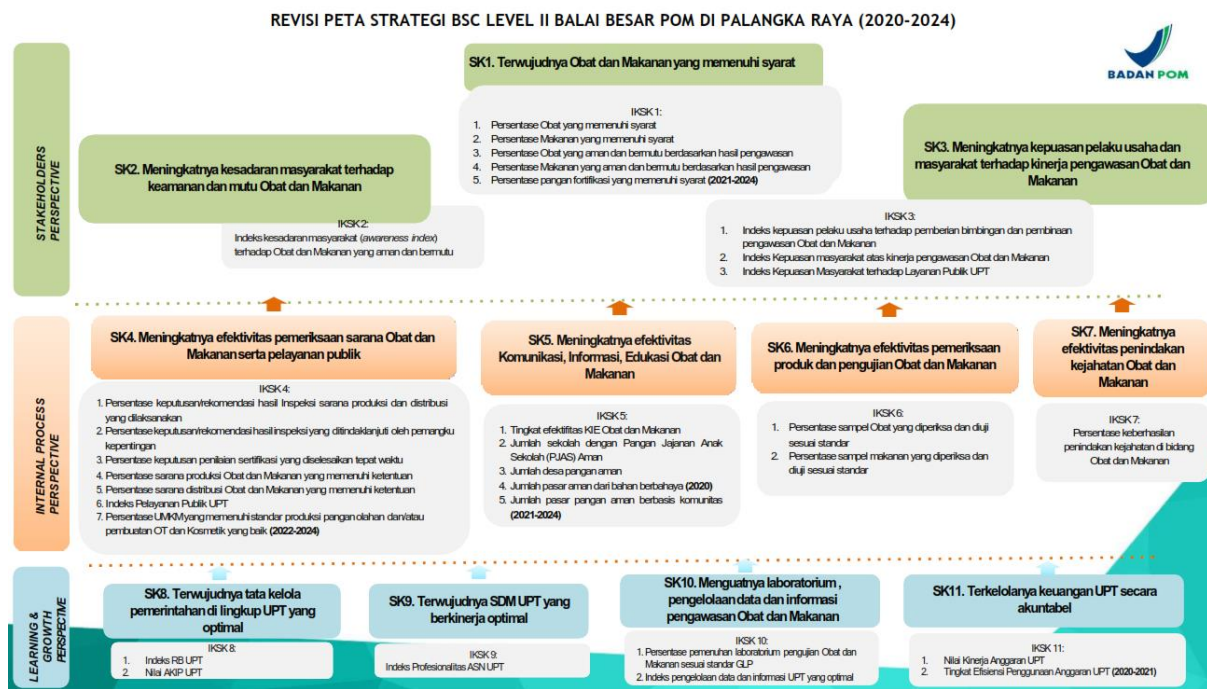
Perencanaan Tahun 2022 BBPOM Di Palangka Raya tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Di Palangka Raya tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.02.02.21A.21A5.21A51.12.21.2385 tanggal 17 Desember 2021. Reviu Renstra tersebut memuat visi, misi, budaya organisasi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja program dan kegiatan BBPOM di Palangka Raya. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BBPOM di Palangka Raya telah menetapkan Visi dan Misi BPOM 2020-2024 yaitu:



Gambar 2.1. Visi dan Misi BBPOM di Palangka Raya 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



Gambar 2.2. Peta Strategis Level II BBPOM di Palangka Raya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Palangka Raya maka BBPOM di Palangka Raya menggunakan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh

sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. RKT BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 6 Oktober 2021. Salah satu tujuan RKT disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga. Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.5
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.8
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	65.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63
		6. Indeks Pelayanan Publik	4.01
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya 2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	86.2 80.1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	82.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2.25
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93.6

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Palangka Raya

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja pada tanggal 16 Desember 2021 untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28.070.532.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.5
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.8
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	65.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63
		6. Indeks Pelayanan Publik	4.01
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	54
		3. Jumlah desa pangan aman	18
		4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	86.2
		2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	80.10
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	82.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2.25
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	93.6

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran kegiatan disusun berdasarkan target Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022 dan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-2024. Beberapa indikator mengalami perubahan target mengacu pada realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor HK.02.02.21A.21A51.12.21.2386 Tahun 2021 tentang Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-2024 tanggal 17 Desember 2021. Selain perubahan

target, terdapat pula perubahan nama indikator kinerja yaitu jumlah pasar aman dari bahan berbahaya menjadi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas serta terdapat penambahan indikator baru yaitu persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik. Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-2024, indikator kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Palangka Raya hanya dilakukan pengukuran pada tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2022 tidak lagi dilakukan pengukuran karena sudah tersedia pada indikator nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Palangka Raya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja, melaporkan capaian kinerja dan laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya selalu dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala. RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	Rp 259.011.780,-	
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Rp 146.201.300,-	
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	Rp 127.348.220,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	Rp 71.864.460,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Rp 41.367.000,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	Rp 220.948.000,-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.80	Rp 43.978.900,-	



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
	wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.51	Rp 706.665.490,-
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	Rp 101.909.200,-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	Rp 24.672.280,-
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Rp 62.065.650,-
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 194.178.800,-
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Rp 22.814.720,-
		5. Persentase sarana distribusi Obat yang	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	Rp 255.235.820,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		memenuhi ketentuan													
		6. Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.01	Rp 172.371.000,-
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	16	24	32	40	45	50	55	60	65	70	77	Rp 53.506.700,-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	0	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	93.80	Rp 162.000.000 ,-
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	5%	20%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	75%	90%	54	Rp 656.961.000,-
		3. Jumlah desa pangan aman	0	5%	20%	20%	30%	45%	50%	55%	60%	75%	90%	18	Rp 917.592.000,-
		4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	0	10%	25%	25%	35%	40%	45%	50%	60%	75%	90%	6	Rp 216.660.000 ,-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	15	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100	Rp 1.116.631.865 ,-
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	25	30	40	50	60	65	75	85	100	Rp 515.507.315,-
7	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	0	3	10	20	25	30	35	45	60	65	75	98	Rp 408.839.000,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	bidang Obat dan Makanan													
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.20	Rp 5.639.055.240,-
		2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.10	Rp 184.504.000,-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.50	Rp 5.639.034.760,-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	Rp 7.011.734.300,-
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	0	0	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	30	35	40	47	54	60	67	74	80	84	89	93.60	Rp 1.950.261.000,-

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 2.3. Kriteria penilaian capaian kinerja

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah.
2. Memanfaatkan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(bobot \times \% \text{ capaian})1 + (bobot \times \% \text{ capaian})n\}}{n}$$

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data BBPOM di Palangka Raya yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

2. Kepala BBPOM di Palangka Raya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap kelompok substansi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Palangka Raya.
3. Penanggungjawab data di setiap kelompok substansi menginput data kinerja pada RHPK di inovasi MONELAKU secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data BBPOM di Palangka Raya.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi, setiap bulannya digunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi internal dan pembuatan RAPK, menginput pada aplikasi SAKTI, SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIMAKIN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan di mana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward and punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- *Capaian Kinerja Organisasi*
- *Realisasi Anggaran*
- *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan realisasi IKU tahun 2023 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan pada masing-masing perspektif, membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan target tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target nasional, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang, dan efisiensi penggunaan sumber daya serta rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Palangka Raya Triwulan I tahun 2023 sebesar **105.74%**.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

- a. *Stakeholder perspective*, capaian kinerja **104.65%**
- b. *Internal process perspective*, capaian kinerja **100.58%**
- c. *Learning and growth perspective*, capaian kinerja **112.0%**

Untuk menjaga kesesuaian nilai NPS dengan e-performance, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 120% dihitung menjadi 120%. Dari 11 sasaran kegiatan tahun 2023, 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur pada triwulan I, 4 sasaran kegiatan lainnya dilakukan pada akhir tahun 2022. Pengukuran terhadap tujuh sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2022 terdapat 5 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil memenuhi ekspektasi dan tidak dapat disimpulkan dan 2 sasaran kegiatan dengan hasil belum memenuhi ekspektasi. Rincian capaian masing-masing sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2023 (Penyesuaian)

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
<i>Stakeholder perspective</i>				104.65
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	104.65 (104.65)	Memenuhi Ekspektasi	104.65 (104.65)
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	-		

No	Sasaran Kegiatan	Capaian (NPS)	Kriteria	Rerata (%)
<i>Internal process perspective</i>				<i>100.58</i>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	93.44 (117.29)	Memenuhi Ekspektasi	100.58 (218.52)
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	97.22 (98.47)	Belum Memenuhi Ekspektasi	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	91.65 (91.65)	Belum Memenuhi Ekspektasi	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	120 (566.67)	Tidak Dapat Disimpulkan	
<i>Learning and growth perspective</i>				<i>112.00</i>
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	-	-	112.00 (119.36)
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	104 (104)	Memenuhi Ekspektasi	
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	134.72 (120.0)	Tidak Dapat Disimpulkan	

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 11 sasaran kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
<i>Stakeholder perspective</i>									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95	100	105.26	105.26	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50	93.50	94.44	101.01	101.01	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.00	94.00	98.31	104.58	104.58	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	90.91	108.23	108.23	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		5. Persentase Pangan	96	96	100	104.17	104.17	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Fortifikasi yang memenuhi syarat								Ekspektasi	Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77	NA	NA	NA	NA		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.9	NA	NA	NA	NA		
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67.76	NA	NA	NA	NA		
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	93	NA	NA	NA	NA		
<i>Internal process perspective</i>									
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	69.15	76.83	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	23.96	31.95	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	72.73	111.89	111.89	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	88.37	133.90	133.90	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.4	NA	NA	NA	NA		
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT	79	22.5	56.07	NA	249.20	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
dan kosmetik yang baik									
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	90.74	94.82	94.82	Belum Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	68	20	25	NA	125		Tidak dapat disimpulkan
		19. Jumlah desa pangan aman	25	27	20	NA	74.07		Tidak Memenuhi Ekspektasi
		20. Jumlah pasar aman Berbasis Komunitas	9	25	25	NA	100		Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	18.43	18.43	92.15	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	18.23	18.23	91.15	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	3.75	21.25	21.46	566.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan
<i>Learning and growth persepective</i>									
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	89.2	NA	NA	NA	NA		
		25. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81.6	NA	NA	NA	NA		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	26. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	83	NA	NA	NA	NA		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	NA	NA	NA	NA		
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2.5	2.5	2.6	104.00	104.00	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara	29. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	92	50	67.36	73.22	134.72	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
			1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
	akuntabel								

Dari 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 20 indikator yang dapat diukur pada triwulan I. Sembilan indikator dengan “memenuhi ekspektasi”, 2 indikator dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi” , 4 indikator dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi” dan 5 indikator dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sementara Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori belum memenuhi ekspektasi dan tidak memenuhi ekspektasi perlu penguatan dan pengawalan secara serius serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar pada tahun mendatang memiliki capaian memenuhi ekspektasi. Keenam indikator kinerja utama yang perlu diperhatikan tersebut ialah :

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5. Jumlah desa pangan aman
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama yang berkriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Pencapaian keempat indikator kinerja tersebut, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain penetapan target yang tidak sesuai, capaian output yang tinggi

melebihi standar capaian output yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja, pengawalan pelaksanaan kegiatan pendukung indikator kinerja yang melebihi dari ekspektasi, sehingga perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut sebagai upaya perbaikan atas capaian kinerja yang berhasil lebih dari ekspektasi.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut :

1 Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 104.65 dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95	100	105.26	105.26	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	92.5	94.44	101.01	101.01	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	98.31	104.58	104.58	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	90.91	108.23	108.23	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	96	100	104.17	104.17	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran					104.65	104.65		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. **Persentase Obat yang memenuhi syarat**

a. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95	100	105.26	105.26	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat acak MS}}{\text{total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk nomor izin edar yang kedaluarsa); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2023, sistem pengujian sampel Obat dilakukan berdasarkan sistem regionalisasi pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. Unit kerja yang termasuk dalam Region Samarinda , yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu.

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 207 sampel Obat acak yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 205 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu 105.26% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
Persentase Obat yang memenuhi syarat	2023	95	95	100	105.26	105.26	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 207 sampel Obat acak yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 205 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palangka Raya sebesar 100%. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu 105.26% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dengan capaian 105.26%. Pelaksanaan sampling Obat oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda dilakukan secara langsung di sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid-19 yang masih belum berakhir.

Analisa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- Sistem pengujian sampel mengalami perubahan, yaitu sistem regionalisasi pengujian laboratorium. BBPOM di Palangka Raya tergabung dalam Region Samarinda. Region Samarinda yang terdiri dari 10 unit kerja, yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu.
Dengan adanya perubahan sistem menjadi regionalisasi pengujian laboratorium, BBPOM di Palangka Raya memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam pelaksanaan sistem regionalisasi tersebut dan terus melakukan perbaikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- Terdapat sampel Obat yang masuk ke laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya melewati tanggal 15 setiap bulan. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya pengiriman sampel dari beberapa unit kerja pengirim sampel yang terdapat dalam Region Samarinda. Keterlambatan sampel tersebut sangat mempengaruhi capaian pengujian tiap bulan.

- Instrumen HPLC, GCMS dan LCMSMS mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan karena pengadaan dan proses penggantian consumable parts oleh penyedia membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menghambat penyelesaian pengujian sampel.
- Terjadi kekosongan reagen etanol sehingga menghambat proses pengujian sampel.
- Sampel masuk tidak sesuai renlak (jumlah dan tanggal masuk) sehingga sampel menumpuk di waktu-waktu tertentu yang mengakibatkan adanya potensi *timeline* tidak tercapai (lewat *timeline*) apalagi didukung dengan ketidakterediaan reagen, bahan habis pakai laboratorium dan suku cadang.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium sebelum tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk timeline.
2. Merencanakan dan menganggarkan setiap tahun pelaksanaan verifikasi alat HPLC untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.
3. Merencanakan dengan matang dan melakukan pengadaan reagen di awal tahun sehingga terhindar dari kekosongan reagen.
4. Merencanakan dan menganggarkan kebutuhan untuk pengadaan suku cadang alat lab agar dapat memenuhi kebutuhan pengujian.
5. Melakukan intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait tata cara distribusi yang baik.
6. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.
7. Meningkatkan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh BPOM.
8. Meningkatkan kompetensi petugas.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

- Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 105.26 % diperoleh dari 207 sampel Obat yang diperiksa dengan hasil 205 sampel MS dan 2 sampel TMS. Memperhatikan capaian tersebut, tingginya persentase sampel Obat yang memenuhi syarat dipengaruhi salah satunya oleh kepatuhan produsen dan konsumen terkait ketentuan tentang penandaan/label produk Obat serta mutu produk yang dijual sehingga jumlah sampel TMK penandaan/label relatif sedikit dan tidak ditemukan sampel yang kadaluarsa, tanpa izin edar dan atau rusak.

- Pelaksanaan sampling acak di BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda dilakukan secara onsite walaupun masa pandemi Covid-19 belum berakhir dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
- Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian informasi mengenai CEK KLIK Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga pemahaman masyarakat menjadi semakin tinggi terhadap cara memilih produk Obat dan Makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut berimplikasi terhadap rendahnya permintaan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan dengan TMK penandaan, Tanpa Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga produk-produk tersebut relatif sulit ditemukan di pasaran.
- Penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat semakin efektif.
- Pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian semakin efektif.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium sebelum tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk timeline.	Menyusun renlak sampling di awal tahun	-	-
		Selalu mengingatkan Poksi Pemeriksaan saat Rapat evaluasi internal secara berkala setiap bulan	-	-
2	Merencanakan dan menganggarkan setiap tahun pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan dan verifikasi alat HPLC, GCMS dan LCMSMS untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.	Menyiapkan anggaran perbaikan/pemeliharaan dan verifikasi alat HPLC di awal tahun	-	-
		Meminta penawaran untuk perbaikan/pemeliharaan dan verifikasi alat HPLC, GCMS dan LCMSMS ke masing-masing	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		vendor		
3	Merencanakan dengan matang dan melakukan pengadaan reagen di awal tahun sehingga terhindar dari kekosongan reagen.	<p>Menyusun perencanaan pengadaan reagen di awal tahun</p> <p>Melaksanakan pengadaan reagen sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia</p>	-	-
4	Merencanakan dan menganggarkan kebutuhan untuk pengadaan suku cadang alat lab (termasuk kolom) supaya bisa memenuhi kebutuhan pengujian	<p>Menyiapkan anggaran untuk kebutuhan suku cadang alat lab</p> <p>Melakukan pengadaan suku cadang alat laboratorium</p>	-	-
5	Melakukan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait tata cara distribusi yang baik.	Merencanakan kegiatan intensifikasi pengawasan di awal tahun	-	-
6	Meningkatkan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.	Merencanakan dan melakukan kegiatan koordinasi untuk menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	-	-
7	Meningkatkan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat tentang adanya <i>Public</i>	Merencanakan dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan obat kepada pelaku usaha dan masyarakat	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	<i>Warning</i> Obat yang diterbitkan oleh BPOM.			
8	Meningkatkan kompetensi petugas.	Merencanakan dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas	-	-

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{jumlah sampel makanan acak MS}}{\text{total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

a. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Triwulan I	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	94,44	101,01	Memenuhi Ekspektasi

Pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 54 sampel Makanan acak dengan hasil pemeriksaan sebanyak 51 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel Tidak Memenuhi syarat (TMS) dengan realisasi sebesar 94,44%. Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat terhadap target triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 101,01% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Tahun 2023	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	94,44	101,01	Memenuhi Ekspektasi

Capaian kinerja dibandingkan dengan target tahunan pasti akan memberikan hasil yang sama dengan perbandingan terhadap target triwulan, karena antara target tahunan dan triwulan besarnya sama, yaitu sebesar 93,5 persen.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dengan capaian 101,01%.

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh melibatkan pihak pemeriksaan selaku yang melakukan sampling, ketersediaan sampel di pasaran dan pihak laboratorium sebagai pihak yang melakukan pengujian terhadap sampel. Dalam hal pengadaan sampel dilapangan sangat dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak pemeriksaan dan pihak laboratorium. Sehingga pada saat terjadi suatu kendala dapat segera diambil tindakan penanganannya.
2. Dilakukan pengecekan berkala oleh pihak pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan rencana sampling dan pihak laboratorium terhadap rencana masuknya sampel dari pemeriksaan.

Rekomendasi untuk peningkatan :

1. Membuat data base sampel yang rutin diisi dan dievaluasi secara berkala. Data base digunakan untuk mengontrol pelaksanaan sampling dan memastikan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium sesuai dengan target yang direncanakan.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain :

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya UMKM IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) terkait pemenuhan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Pelaksanaan sampling sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tepat waktu pada triwulan I tahun 2023.
- Dilakukan pengambilan sampel kembali terhadap sampel-sampel yang hasil pengujian pada tahun sebelumnya tidak memenuhi syarat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan sampling yang sudah disusun, sehingga pada saat ada penyimpangan akan segera terdeteksi dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan atau penanganan. Hal ini berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengujian dimana tidak terjadinya penumpukkan sampel dipengujian, sehingga sampel dpat segera dilakukan pengujian.	Telah dilakukan monev terhadap pelaksanaan sampling yang dilakukan oleh pihak pemeriksaan dan pihak laboratoorium	-	-



3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase Obat yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	98.31	104.58	Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{jumlah sampel obat acak MS}}{\text{total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk nomor izin edar yang kedaluarsa); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2023, sistem pengujian sampel Obat dilakukan berdasarkan sistem regionalisasi pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. Unit kerja yang termasuk dalam Region Samarinda , yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu.

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 58 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 adalah 104.58% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.



b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2022	Kriteria
Persentase Obat yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	98.31	104.58	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 58 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 adalah 104.58% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Palangka Raya mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dengan capaian 104,58%. Pelaksanaan sampling Obat oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda dilakukan secara langsung di sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pada pengujian sampel kosmetik tahun 2023 dilakukan berdasarkan sistem regionalisasi pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. Parameter uji spesifik Region Samarinda yang diujikan BBPOM di Palangka Raya adalah Identifikasi Klindamisin yang sampelnya berasal dari BBPOM di Palangka Raya dan seluruh Balai Besar, Balai, dan LOKA POM di Region Makassar (BBPOM di Makassar, BPOM di Kendari, BPOM di Manokwari, BBPOM di Jayapura, LOKA POM Palopo, LOKA POM Bau-bau). Parameter uji spesifik Region Samarinda lainnya yang diujikan BBPOM di Palangka Raya adalah Identifikasi Kloroform yang sampelnya berasal dari BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka POM di Kotawaringin Barat, Loka POM di Balikpapan, Loka POM di Hulu Sungai Utara, Loka POM di Sanggau, dan Loka POM di Tanah Bumbu.

Analisa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

1. Sistem pengujian sampel mengalami perubahan, yaitu sistem regionalisasi pengujian laboratorium. BBPOM di Palangka Raya tergabung dalam Region

Samarinda. Region Samarinda yang terdiri dari 10 unit kerja, yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu.

Dengan adanya perubahan sistem menjadi regionalisasi pengujian laboratorium, BBPOM di Palangka Raya memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam pelaksanaan sistem regionalisasi tersebut dan terus melakukan perbaikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

2. Realisasi sampling targeted khususnya OK dan Kos masih terdapat kekurangan sampel, meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi total (acak dan targeted)

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium sebelum tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk timeline.
2. Memberikan arahan kepada tim sampling khususnya Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk memperhatikan juga capaian pada targeted yang masih tidak sesuai dengan renlak

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium sebelum tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk timeline.	Menyusun renlak sampling di awal tahun	-	-
		Selalu mengingatkan Poksi Pemeriksaan saat Rapat evaluasi internal secara berkala setiap bulan	-	-
2.	Merencanakan dan menganggarkan setiap tahun pelaksanaan verifikasi alat HPLC untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.	Menyiapkan anggaran verifikasi alat HPLC di awal tahun	-	-
		Meminta penawaran verifikasi alat HPLC ke masing-masing vendor	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3.	Merencanakan dengan matang dan melakukan pengadaan reagen di awal tahun sehingga terhindar dari kekosongan reagen.	<p>Menyusun perencanaan pengadaan reagen di awal tahun</p> <p>Melaksanakan pengadaan reagen sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia</p>	-	-
4.	Melakukan komunikasi dengan Pusdatin terkait permasalahan SIPT untuk bisa menemukan solusi permasalahannya	Melaporkan semua kendala terkait SIPT ke pusdatin	-	-
5.	Merencanakan dan menganggarkan kebutuhan untuk pengadaan suku cadang alat lab (termasuk kolom) supaya bisa memenuhi kebutuhan pengujian	<p>Menyiapkan anggaran untuk kebutuhan suku cadang alat lab</p> <p>Melakukan pengadaan suku cadang alat laboratorium</p>	-	-
6.	Memperhatikan kembali instalasi listrik dan diatur sedemikian dengan menghitung beban dan keamanan untuk alat dan instrument	Melakukan pengecekan instalasi listrik di laboratorium	-	-
7.	Mengusulkan dan merencanakan untuk pengadaan UPS.	Mengusulkan dan merencanakan untuk pengadaan UPS.	-	-
8.	Melakukan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait tata cara distribusi yang baik.	Merencanakan kegiatan intensifikasi pengawasan di awal tahun	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
9.	Meningkatkan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.	Merencanakan dan melakukan kegiatan koordinasi untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder	-	-
10.	Meningkatkan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada <i>stakeholder</i> dan masyarakat tentang adanya <i>Public Warning</i> Obat yang diterbitkan oleh BPOM.	Merencanakan dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan obat kepada pelaku usaha dan masyarakat	-	-
11.	Meningkatkan kompetensi petugas.	Merencanakan dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas	-	-

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

- realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 58 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 adalah 104.58% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
- Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian informasi mengenai CEK KLIK Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga pemahaman masyarakat menjadi semakin tinggi terhadap cara memilih produk Obat dan Makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut

berimplikasi terhadap rendahnya permintaan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan dengan TMK penandaan, Tanpa Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga produk-produk tersebut relatif sulit ditemukan di pasaran.

- Penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat semakin efektif.
- Pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian semakin efektif.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Bulan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Evaluasi Tindak Lanjut
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline	
1	Januari	Laksanakan kegiatan sesuai dengan renlak	-	Laksanakan kegiatan sesuai dengan renlak	Desember	-
2	Februari	Sampling OK pada bulan berikutnya disesuaikan dengan target	-	Memberikan arahan kepada tim sampling untuk menyesuaikan jenis target (random / targeted) sesuai target bulanannya	Maret	-
3	Maret	Realisasi sampling targeted khususnya OK dan Kos masih terdapat kekurangan sampel, meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi total (acak dan targeted)	Rekomendasi Bulan Februari Close	Memberikan arahan kepada tim sampling khususnya OTOKSKKos untuk memperhatikan juga capaian pada targeted yang masih tidak sesuai dengan renlak	April	Rekomendasi Bulan Februari Close

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Yang dimaksud dengan Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{jumlah sampel Makanan Targeted MS}}{\text{total sampel Makanan Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	90,91	108.23	108.23	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan, BPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 52 sampel Makanan Targeted yang dilakukan oleh BPOM di Palangka Raya yang diuji di balai sendiri maupun di balai lain dalam Region Samarinda dengan jumlah total sampel yang telah diuji sebanyak 44 sampel, diperoleh hasil pengujian MS (memenuhi syarat) sebanyak 40 sampel dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 4 sampel. Capaian persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yaitu 108.23% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2022	83	83	100	120,48	120,48	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan
	2023	84	84	90,91	108.23	108.23	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palangka Raya sebesar 100% dengan capaian sebesar 120,48% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, sedangkan pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya sebesar 90,91% dengan capaian telah mencapai target yaitu 108.23% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan capaian pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria capaian terhadap target
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	90,91	105,71	Memenuhi ekspektasi

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 105.71% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Walaupun demikian, upaya perbaikan secara berkesinambungan perlu terus dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.



d. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target nasional

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Triwulan I Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria capaian terhadap target
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,50	90,91	117,30	Memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas tersebut diketahui bahwa realisasi persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2022 sebesar 90,91%. Hasil tersebut telah berada diatas target nasional, yaitu 77,50% dengan presentase capaian sebesar 117,30% dan masuk kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dengan capaian 108.23%. Analisa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

- Mekanisme pengambilan sampel PJAS yang termasuk dalam kategori Pangan targeted dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama terhadap sekolah yang telah diintervensi sedangkan pada tahap kedua dan ketiga dilakukan sampling terhadap sekolah-sekolah yang belum diintervensi. Adanya penetapan lokasi sekolah ini merupakan salah satu strategi penajaman sampling PJAS, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ditemukan sampel pangan PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan adanya penetapan lokasi sampling ini, hasilnya diperoleh dari sekolah yang belum dilakukan intervensi ditemukan lebih banyak sampel PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 3 sampel, yaitu Mie Basah (SDN 6 Bukit Tunggal), Syrup Merah (SMPN 3 Palangka Raya) dan Nasi Uduk Ayam (SMPN 9 Palangka Raya) dengan parameter uji APM E coli, sedangkan pada sekolah yang telah diintervensi ditemukan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu sampel Es Teh (MI Al Jihad) dengan parameter uji Penetapan Kadar Siklamat. Dengan adanya hasil ini, perlu penajaman kembali lokasi sampling sampel PJAS terhadap sekolah yang belum diintervensi agar dilakukan sampling kembali dan masuk dalam program intervensi pada tahun berikutnya. Selain itu, masih perlu juga penguatan terhadap tindakan intervensi yang dilakukan agar lebih mengena yaitu pembinaan langsung kepada para pedagang yang berjualan di lokasi kantin sekolah.



Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Melakukan intensifikasi pengawasan dalam bentuk penajaman lokus sarana lokasi sampling PJAS, yaitu sekolah-sekolah yang belum dilakukan intervensi KIE maupun terhadap pelaku usaha lainnya seperti sarana produksi maupun distribusi mie basah dan tahu untuk keperluan sampling pemahit formalin.
2. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu sekolah-sekolah maupun instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Agama setempat untuk melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengujian sampel Makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

- Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian cara produksi dan distribusi pangan yang baik terhadap para pelaku usaha dan pedagang-pedagang di kantin sekolah sehingga pemahamannya menjadi lebih baik terkait cara produksi Makanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi, terutama dalam hal hygiene dan sanitasi. Hal ini diharapkan dapat berimplikasi langsung terhadap berkurangnya jumlah sampel PJAS yang TMS baik secara parameter uji kimia maupun mikrobiologi.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menindaklanjuti hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada pihak yang berkepentingan dengan menyampaikan surat pemberitahuan hasil uji dan tindak lanjutnya berupa pembinaan terhadap pelaku usaha agar dapat menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.	.	Mermbuat surat tindak lanjut hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	TW 2
2	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kelompok Substansi Infokom dalam melakukan kegiatan KIE agar mempertimbangkan hasil uji tahun sebelumnya sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pemilihan sekolah yang akan dilakukan intervensi, termasuk penyampaian KIE secara langsung		Koordinasi dengan Kelompok Substansi Infokom untuk perencanaan intervensi	TW 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	terhadap para pedagang kantin di sekolah terkait cara produksi pangan siap saji yang aman.		PJAS pada tahun berikutnya.	

- Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**

a. Perbandingan realisasi terhadap target Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Triwulan I	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	100	104.17	Memenuhi Ekspektasi

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$\% \text{ pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{pangan fortifikasi MS}}{\text{total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sampel Makanan Fortifikasi dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel (100 %) Memenuhi Syarat (MS). Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat terhadap target Triwulan I tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 104.17 % dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Sampling fortifikasi ditetapkan mulai bulan Mei sudah dilakukan di bulan Januari tahun 2023 karena dari disarana Produksi bukan disarana distribusi sehingga mendahului sampling di awal tahun. Tempat samling ditetapkan di Kabupaten Gunung Mas dengan perencanaan 75 sampel yang diperiksa dan diuji di BBPOM di Palangka Raya.

b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Triwulan IV	Capaian terhadap target Tahun 2022	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	100	105,26	Memenuhi Ekspektasi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 72 sampel Makanan Fortifikasi dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel (100 %) Memenuhi Syarat (MS).

Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat terhadap target tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,26 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Yang dimaksud Pangan fortifikasi adalah Pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian sebesar 104.17%. Penyebab tingginya nilai capaian adalah sebagai berikut :

- 1) Sampel fortifikan yang sudah diuji adalah kategori Minyak Goreng Sawit dari sarana produksi di Kabupaten Sampit berjumlah 2 sampel dengan hasil uji seluruhnya memenuhi syarat.
- 2) Sampel diambil dari sarana produksi PT. Sukajadi Sawit Mekar dengan pembelian tanpa anggaran dengan sampel dikhususkan untuk quality control (khusus untuk pengujian).
- 3) Dari 2 sampel minyak goreng sawit dalam kemasan yang di pasarkan dalam skala produksi dan didistribusikan untuk umum.

Terhadap kemungkinan menurunnya capaian kinerja perlu dilakukan intervensi, dengan harapan dapat meningkatkan capaian kinerja. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pastikan sampel yang disampling adalah sampel yang memiliki ijin edar, diharapkan sampel dengan ijin edar produknya terjamin sehingga hasil ujinya dapat memenuhi syarat.
- 2) Pengaturan jadwal sampling dan pengujian, sehingga tidak ada pengujian yang melewati batas waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan renlak yang dibuat.

Sampling memegang peranan penting dalam pencapaian target kinerja, sehingga bila sampling dilakukan mengacu pada renlak yang dibuat diawal tahun diharapkan capaian akan maksimal.

- 2) Penyusunan renlak sampling yang baik memperhatikan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan pengujian.
- 3) Perubahan dalam pedoman sampling dapat mengakibatkan perubahan pada pencapaian kinerja. Terutama jika terjadi penambahan parameter uji terhadap sampel tertentu.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
1.	Masih terdapat beberapa sampel yang menjadi target pangan fortifikasi, pastikan bahwa pelaksanaan sampling dan pemeriksaan sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan.	Sudah dilakukan sampling sesuai dengan renlak yang dibuat diawal tahun	-	-

2 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan & mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran TW 1 sebesar 0 dengan kriteria Sangat kurang. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77	0	0	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran				0	0	0		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria capaian terhadap target
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77	0	0	Belum Memenuhi Ekspektasi

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *margin of error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasar Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tanggal yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik *interview*/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner yang telah diinstal pada *smartphone enumerator*.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan BPOM yang dilakukan pada akhir tahun 2023.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang

benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program BPOM. Interpretasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan	Interpretasi
> 90.01	Sangat Baik
> 75.01 sd 90	Baik
> 60.01 sd 75	Cukup Baik
> 45.01 sd 60	Kurang Baik
< 45	Tidak Baik

Target Nilai Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2023 adalah 77 dan nilai indeks pada TW 1 2023 belum dapat disimpulkan dan sedang dalam tahap pelaksanaan survei oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan BPOM sampai dengan akhir tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77	0	0	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target Nilai Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2023 adalah 77 dan nilai indeks pada TW 1 2023 belum dapat disimpulkan dan sedang dalam tahap pelaksanaan survei oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat dan Makanan BPOM sampai dengan akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Efek manfaat dari pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan yang dirasakan oleh masyarakat secara bertahap terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu sehingga

mampu melindungi diri sendiri serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.

- Pemeriksaan sarana distribusi/pelayanan obat dan makanan semakin intensif dilakukan sehingga meminimalkan terjadinya kasus pelanggaran hukum terkait obat dan makan
- Produk obat dan makanan TIE/palsu/TMS lainnya semakin berkurang karena semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan aman dan bermutu

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Palangka Raya melaksanakan layanan informasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pada TW 1 2023 telah dilakukan layanan informasi dan pengujian sampel sebanyak 149, media sosial sebanyak 58 postingan di 3 media sosial milik Balai (Instagram, Facebook dan Twitter), media elektronik berupa subsite BBPOM Palangka Raya sebanyak 41 berita.

Strategi lain yang dilakukan dalam melaksanakan KIE, BBPOM di Palangka Raya memanfaatkan dan memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat sejalan dengan pelaksanaan program prioritas nasional Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Tidak hanya itu, BBPOM juga intensif melakukan pengawasan obat dan makanan melalui pemeriksaan sarana distribusi bersama lintas sektor terkait (Pemerintah daerah, Dinas kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) serta pengawasan dan KIE melalui mobil laboratorium keliling kepada pelaku usaha pangan siap saji dan ritel.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan berkelanjutan	Kondisi pandemi yang berangsur membaik menjadikan kegiatan KIE bisa dilaksanakan secara tatap muka dimodifikasi secara daring dan melalui media sosial	Melakukan KIE dengan tema yang diberikan oleh pusat (BPA Free) pada botol kemasan dan tema lain sesuai kebutuhan masyarakat	TW II-TW IV
		Intensifikasi jumlah dan konten KIE	Melakukan KIE melalui media sosial dengan	TW II-TW IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		dengan pemanfaatan semua kanal yang dimiliki oleh BBPOM di Palangka Raya	tema/materi berbeda setiap bulan yang telah ditetapkan oleh Badan POM	
		Optimalisasi Kegiatan KIE bersama Mobil Laboratorium keliling dengan menjangkau seluruh wilayah kerja provinsi Kalteng	Memberikan pengetahuan kepada pedagang pangan jajanan/siap saji dan masyarakat akan pentingnya keamanan pangan hygiene dan sanitasi serta bahan tambahan pangan	TW II-TW IV
4.	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya peningkatan berkelanjutan	Intensifikasi pelaksanaan rencana aksi masing-masing kader Duta Milenial Kosmetik Aman yang telah dibentuk.	Memberdayakan kader yang dimiliki agar indeks efektivitas KIE meningkat	TW II-TW IV
5.	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Laura Jempol dan Pentol Isi Urat	Mengembangkan inovasi Laura Jempol dan optimalisasi kinerja Pentol Isi Urat	Memperluas cakupan komunitas yang akan diberdayakan agar pengetahuan masyarakat semakin banyak	TW II-TW III
6.	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas dan terhadap sarpras yang tersedia	Melaksanakan peningkatan kompetensi kepada petugas KIE dan pengembangan sarana dan prasarana yang memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat	Melakukan identifikasi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan agar kualitas pelaksanaan KIE lebih baik di masa mendatang	TW IV

3 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perhitungan indikator tersebut dilaksanakan di alhir tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan IV
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.9	0	0	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67.76	0	0	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	93	0	0	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran					0	0		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan	90.9	0	0	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Dapat Disimpulkan

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan mencakup desk, bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah: a. Aspek Tangible (T) b. Aspek Reliability (R) c. Aspek Assurance (A) d. Aspek Responsiveness (Re) e. Aspek Empathy (E).

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	0	0	0	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 pada TW I belum dapat diukur, karena indeks Kepuasan pelaku usaha ini merupakan nilai kumulatif dari hasil pendampingan selama tahun berjalan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan	90.9	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 pada TW I belum dapat diukur, karena indeks Kepuasan pelaku usaha ini merupakan nilai kumulatif dari hasil pendampingan selama tahun berjalan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain, Upaya Balai Besar POM di Palangka raya dalam memberikan pelayanan prima berupa pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha. Selain itu pelayanan yang dilakukan di beberapa Mall pelayanan public juga menjadi salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan pelaku usaha ini. Penurunan capaian terjadi akibat pendampingan yang dilaksanakan oleh fasilitator mahasiswa melalui program inovasi UMKM BERDIKARI serta kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara hybrid, tidak mampu mengikat pelaku usaha dalam mengisi survey yang diberikan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

- Program Pendampingan/Fasilitasi UMKM, Balai Besar POM di Palangka Raya dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelaku usaha dengan melakukan bimbingan berupa pendampingan/fasilitasi terhadap UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik diwilayah kerja BBPOM di Palangka Raya .
- Upaya pelayanan prima yg di berikan berupa jemput bola dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan secara intens baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun melalui telepon atau whatsapp terhadap pelaku usaha/UMKM produk pangan olahan, obat tradisional maupun kosmetik yang ingin mengembangkan produknya memiliki ijin edar BPOM.
- Dalam rangka mepermudah pelakuku usaha mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan, dilakukan pendampingan/ fasilitasi yang berupa bimtek mandiri bagi pelaku usaha dengan menggunakan aplikasi UMKM BERDIKARI, dimana dilakukan pembelajaran secara online sehingga pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan pengetahuan tentang penerapan CPPOB, CPOTB, CPKB.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/ eksternal).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya Pelaku usaha melalui pembinaan serta fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha.	Melakukan pembinaan serta fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha.	-	-
			-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
2	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam hal pembinaan terhadap pelaku usaha baik dalam produksi maupun distribusi produk obat dan makanan.	Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam hal pembinaan terhadap pelaku usaha		

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online dengan desain sampling menggunakan stratified random sampling. Responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan kriteria usia 17-65 tahun sebagai konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa nilai persentase. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat berupa kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat terhadap *outcome* kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur kelima indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Nasional = \sum[\sum(\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}a$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

a. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	Tidak memenuhi ekspektasi

Hasil survei pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023 adalah 0 dengan capaian 0% (target 0) termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Nilai indeks ini masih belum didapatkan di triwulan I dan baru didapatkan di akhir tahun. Survei dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi BPOM yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67.76	0	0	Tidak memenuhi ekspektasi

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang telah diterima pada Triwulan I sebesar 0% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (nilai indeks baru diperoleh di akhir tahun).

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Indikator ini dinilai oleh masyarakat berdasarkan konsep *Service Quality (servequal)* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya meliputi upaya pengawasan pada saat hari raya keagamaan dan momen khusus tertentu meliputi intensifikasi pengawasan produk seperti pengecekan produk kadaluarsa, kemampuan BBPOM di Palangka Raya dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan berbahaya/merugikan kesehatan melalui pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan, memberikan jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat melalui pengawasan pre dan post market serta pengujian dan juga tindakan BBPOM di Palangka Raya atas produk berbahaya melalui penarikan produk dan penindakan kejahatan.

Harapan dan ekspektasi masyarakat Kalimantan Tengah yang tinggi terhadap peran BBPOM di Palangka Raya merupakan landasan kuat untuk melakukan kinerja terbaik. Penetapan target kinerja dari semua aspek dan pengawalan pencapaiannya sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya mendapatkan *outcome* yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat disimpulkan mengingat hasil survei didapatkan pada akhir tahun dan proses serta pelaksanaan survei bersifat independen melalui pihak ketiga. Akan tetapi BBPOM di Palangka Raya akan terus berupaya dan berkomitmen melakukan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dari hulu ke hilir dengan mengutamakan pembinaan dan penyebarluasan informasi.

d. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator pencapaian kinerja namun masih belum berhasil menjadi pengungkit pencapaian kinerja, yaitu :

- Layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan melalui tatap muka, whatsapp, telepon, email dan media sosial, namun media layanan tersebut belum terpublikasi optimal tepat sasaran dapat dikenal oleh masyarakat luas.
- Pengembangan Inovasi UMKM BERDIKARI dalam upaya BBPOM di Palangka Raya melakukan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM pangan dan obat tradisional yang ada di Kalimantan Tengah untuk memperoleh no izin edar dari Badan POM. Inovasi/program ini baru dinisiasi dan diluncurkan pada tanggal 27 Maret 2023, sehingga dampak/aspek manfaatnya masih belum dapat terukur dengan baik pada triwulan I ini.
- KIE secara luring dan daring serta melalui infografis tentang Obat dan Makanan, namun frekuensi dan variatif tema infografis dirasa masih kurang
- Publikasi kegiatan dan kinerja pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal serta strategi publikasi yang belum tepat dengan waktu yang tepat
- Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta pengujian Obat dan Makanan berdasarkan kajian risiko
- Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang memberikan efek jera

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Intensifikasi pengawasan atas isu terkait Obat dan Makanan serta kolaborasi lintas sektor		Intensifikasi pengawasan menjelang dan selama bulan Ramadhan dan idul fitri	TW II
		Peningkatan Koordinasi dan kolaborasi pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor	Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengawasan obat dan makanan bersama lintas sektor di daerah	TW 4
			Peningkatan cakupan wilayah pengawasan Intensifikasi pengawasan menjelang hari raya besar keagamaan	TW 4
2	Intensifikasi Publikasi terkait giat/kinerja/program kerja/inovasi BBPOM di Palangka Raya di media sosial		Melakukan publikasi secara rutin setiap bulannya di media sosial BBPOM di Palangka Raya dengan tampilan	TW 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			yang lebih menarik	
3	Fasilitasi/pendampingan UMKM dalam rangka mendapatkan no izin edar dari Badan POM bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Palangka Raya (Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya)		Implementasi UMKM berdikari	TW 4
4	Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan BBPOM di Palangka Raya		Melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka menampung saran dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Tengah	TW 4

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	Tidak Dapat disimpulkan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Interpretasi
88.31 – 100	A	Sangat Baik
76.61 – 88.30	B	Baik
65.00 – 76.60	C	Cukup Baik
25.00 – 64.99	D	Kurang Baik

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya terhadap 3 layanan yang dimiliki, yaitu: layanan informasi/pengaduan, penerimaan layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor) dan layanan pendampingan pendaftaran produk obat dan makanan. Survei dilaksanakan dalam kurun waktu dan jumlah responden yang telah ditentukan, untuk selanjutnya diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Sapa Apip. Pada triwulan I ini nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum diperoleh hasilnya sehingga masih termasuk kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	93	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Target Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palangka Raya tahun 2023 sebesar 93% dan pada TW 1 ini, belum diperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat sehingga tidak dapat disimpulkan. Hal ini bisa sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya memenuhi kepuasan dan harapan

masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya sampai dengan tahun 2024 sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini juga merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 di lingkungan BPOM.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya didukung oleh beberapa upaya perubahan yang telah terus dilakukan antara lain:

- Tersedia Duta Layanan yang siap dan ramah melayani setiap tamu yang berkunjung dengan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari dengan Semangat melayani untuk memberi Solusi)
- Peningkatan kenyamanan area pelayanan bagi pelanggan dalam upaya pemenuhan harapan masyarakat.
- Tersedianya fasilitas bermain anak dan laktasi bagi ibu menyusui serta coffe corner bagi pelanggan
- Tersedianya nomor antrian secara elektronik dan terpisah untuk setiap jenis layanan
- Tersedianya fasilitas bagi tamu difabel antara lain kursi roda, jalur masuk, tempat parkir mobil khusus, toilet khusus dan meja layanan terpisah
- Tersedia Inovasi garansi layanan apabila menemukan petugas layanan tidak berada ditempat atau ruang layanan kosong tanpa petugas
- Tersedia Inovasi layanan pengujian sampel pihak kepolisian 1 (satu) hari kerja dan layanan di hari libur (sabtu, minggu atau tanggal merah)
- Pengembangan Inovasi e-UMKM Harati menjadi UMKM BERDIKARI yang merupakan salah satu bentuk layanan prima yang diberikan BBPOM di Palangka Raya kepada masyarakat khususnya pelaku usaha melalui pendampingan 1 (satu) fasilitator 1 (satu) UMKM dalam memperoleh no registrasi produk

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 9 unsur penilaian SKM yang selalu harus diperbaiki setiap tahunnya, yaitu :

- U1 adalah Persyaratan: adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- U2 adalah Sistem, mekanisme dan prosedur: adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- U3 adalah Waktu penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- U4 adalah Biaya/ tarif: informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- U5 adalah Produk spesifikasi jenis pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- U6 adalah Kompetensi pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- U7 adalah Perilaku pelaksana: sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- U8 adalah Penanganan pengaduan, saran dan masukan: tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- U9 adalah Sarana dan prasarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Upaya perbaikan di setiap unsur akan menjadikan kualitas pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya menjadi lebih baik. Masukan dan saran dari pengguna layanan adalah petunjuk dan harapan, sehingga seyogyanya harus selalu dipenuhi. Jika monitoring dan evaluasi SKM oleh Badan POM dilaksanakan setahun sekali, demi mendapatkan kualitas layanan yang semakin baik dan cepat, BBPOM di Palangka Raya melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Sehingga dilakukan tindak lanjut segera setelah saran dan perbaikan dari pengguna layanan disampaikan ke BBPOM di Palangka Raya.

Sejak Pandemi Covid-19 BBPOM di Palangka Raya terus berupaya dan menyusun strategi serta inovasi-inovasi untuk selalu memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Kegiatan konsultasi/layanan informasi yang semula lebih terfokus secara langsung/tatapmuka dialihkan melalui pemanfaatan kanal lain yang disediakan

secara online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, google review, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat sehingga kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh BBPOM di Palangka Raya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Salah satu sasaran strategis Badan POM yakni Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat dan makanan, merupakan salah satu upaya Badan POM dalam mewujudkan salah satu misi Badan POM pada Renstra 2020 – 2024 yaitu Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Sasaran strategis Badan POM ini diukur keberhasilannya melalui indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Berdasarkan hasil capaian pada TW 1, BBPOM di Palangka Raya menyusun rencana tindak lanjut dalam upaya mencapai target nilai indeks di tahun 2023 serta mempertahankan bahkan meningkatkannya, antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan intensifikasi layanan informasi dan pengaduan secara langsung/tatap muka di BBPOM di Palangka Raya maupun melalui Hotline Halo Infokom "0811-555-633" serta melalui media sosial Facebook, Instagram dan Twiter	Update konten secara berkala di media sosial dan kanal-kanal lainnya yang dimiliki oleh BBPOM di Palangka Raya	Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap harapan dan masukan masyarakat terhadap layanan BBPOM di Palangka Raya serta penggunaan media sosial setiap bulannya	Setiap akhir triwulan
2	Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi dan pengaduan BBPOM di Palangka Raya		Melaksanakan Peningkatan Kompetensi petugas Infokom	TW 4
3	Meningkatkan implementasi dan pengembangan inovasi Kahayan (Kemudahan dalam Layanan Pengujian)		Melakukan pengembangan aplikasi Inovasi Kahayan	TW 4
4	Meningkatkan implementasi dan pengembangan Inovasi	Transformasi e-UMKM Harati menjadi UMKM	Melaksanakan dan melakukan monitoring dan	Setiap akhir triwulan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	e-UMKM Harati	BERDIKARI	evaluasi aspek manfaat dari implementasi inovasi tersebut	
5	Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana di ruang pelayanan untuk memberikan suasana yang menyenangkan dan nyaman bagi konsumen		Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap harapan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	Setiap akhir triwulan
6	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana penunjang, seperti, menyediakan petugas untuk melayani kopi dan teh bagi tamu gratis yang diletakkan di minibar, arena bermain anak, ruang laktasi.		Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap harapan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	Setiap akhir triwulan
7	Meningkatkan kompetensi petugas Duta Layanan		Melaksanakan Peningkatan Kompetensi petugas Duta Layanan	TW 4
8	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya dalam upaya memenuhi saran, kritik dan masukan serta harapan dari pelanggan.	Monitoring dan evaluasi terhadap SKM setiap bulannya	Menindaklanjuti nilai masing-masing unsur SKM yang mengalami penurunan nilai dalam upaya memenuhi harapan dan kepuasan pengguna layanan	Setiap akhir triwulan

Sasaran Kegiatan

4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 7 (tujuh) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan ketujuh indikator tersebut,

diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.54 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target		
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	69.15	76.83	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	23.96	31.95	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi	
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	72.73	111.89	111.89	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi	
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	133.90	133.90	133.90	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan	
6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.4	0	0	0	0	Tidak Dapat disimpulkan	Tidak Memenuhi Ekspektasi	
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	22.5	56.07	NA	249.2	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran						64.94	100.54		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	69.15	76.83	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus =

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

- A. *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- B. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT/jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*
- C. *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPTlain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- D. *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;

- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; dan
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada Triwulan I tahun 2023, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 19 keputusan/ rekomendasi dari 42 keputusan/ rekomendasi yang diterima termasuk rekomendasi *carry over* tahun 2022. Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 76.83% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”.

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT tercapai 100%, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat tercapai 77.78%, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT tercapai sebesar 66.67%, sedangkan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dengan capaian terendah sebesar 32.14%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan I fokus pada pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan rutin dan optimalisasi tindak lanjut surat-surat dari kedepujian I, II dan III terkait penarikan dan pengamanan produk, maupun promosi/iklan produk, serta menindaklanjuti permintaan pengawasan bersama dari stake holder terkait.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	69.15	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Apabila dilakukan perbandingan realisasi TW I tahun 2023 dengan target TW I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan menunjukkan capaian yang sama yaitu “Tidak Memenuhi ekspektasi”. Pada triwulan pertama ini, capaian indikator ini masih memerlukan pengawalan agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai memenuhi ekspektasi dengan melakukan evaluasi secara cermat.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	69.15	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target 2023 menunjukkan bahwa target tahun 2023 tercapai sebesar 76.83 % dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I tahun 2023, capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 76.83% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”.

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT tercapai 100%, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat tercapai 77.78%, dan Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT tercapai sebesar 66.67%, sedangkan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dengan capaian terendah sebesar 32.14%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dipengaruhi oleh rendahnya keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh Pusat berupa perintah pemantauan/monitoring penarikan produk obat/*recall* yang dikeluarkan bulan Maret 2023 belum dapat terlaksana sehingga output tindak lanjutnya diperhitungkan sebagai capaian triwulan berikutnya.

Pada komponen indikator ini, target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdampak pada meningkatnya intensitas pemeriksaan sarana. Hal yang menjadi kendala adalah pelaksanaan kegiatannya bersamaan dengan kegiatan lain yaitu sampling obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan maupun pangan, sehingga menyebabkan petugas harus melaksanakan dua output yang berbeda secara bersamaan dan menjadi kurang fokus dalam penanganan tindak lanjut. Hal ini terjadi akibat tidak dianggarkannya perjalanan dinas untuk pelaksanaan Sampling Obat dan Makanan dalam Mata Anggaran Kegiatan yang sesuai dan relevan.

Dari pelaksanaan kegiatan pada surat rekomendasi yang dikeluarkan BBPOM di Palangka Raya berupa surat perintah pemeriksaan sarana dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Sebagian besar surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat yang berupa perintah pemeriksaan setempat ke sarana terkait temuan produk ilegal, produk palsu maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Surat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang berupa permintaan narasumber, permintaan dari pelaku usaha sebagai saksi pemusnahan juga dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya.

Pada Triwulan I tahun 2023, komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II dan Kedeputian III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BBPOM di Palangka Raya yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat telah dilakukan dengan optimal. Fokus pengawasan sarana produksi dan distribusi pada tahun 2023 adalah pada penanganan isu keamanan produk Obat dan Makanan, antara lain Smoke Snack (Cikibul), monitoring penarikan Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional yang mengandung EG-DEG, pembersihan OT BKO dan Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Monitoring keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya untuk tahun 2023	- Masih terdapat surat kedeputian I, II,III dalam hal pembersihan pasar dan atau produk ilegal yang disampaikan bulan Maret, masuk dalam perhitungan data yang belum	Selesai TW 3 tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			ditindaklanjuti triwulan I, sebagai kompilasi perhitungan di triwulan II tahun 2023 - Menyusun prioritas/perencanaan pengawasan dalam rangka tindak lanjut surat Pusat dengan mempertimbangkan beban petugas dalam pelaksanaannya yang bersamaan dengan kegiatan sampling Obat dan Makanan	
		Pengisian data RHPK Tindak Lanjut secara tepat waktu		Selesai Tahun 2023

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	23.96	31.95	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus =

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} = (A+B)/2$$

- A. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*
- B. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Palangka Raya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberikan kepada sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan farmasi baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah ditentukan.

Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT BPOM kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 99 surat rekomendasi termasuk rekomendasi hasil pengawasan *carry over* tahun 2022 sebanyak 78 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 15 sarana/ pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback* secara tertulis dalam bentuk *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sampai dengan bulan Maret 2023. Adapun hasil pengawasan yang sifatnya telah ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan di lapangan berupa pemusnahan produk TIE dan pengamanan produk sesuai ketentuan yang berlaku, sarana yang terkait diberikan tindak lanjut berupa surat peringatan atau peringatan keras.

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 31.95% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”. Pada triwulan I intensitas kegiatan pengawasan di lapangan fokus pada penanganan isu keamanan produk Obat dan Makanan,

antara lain Smoke Snack (Cikibul), monitoring penarikan Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional yang mengandung EG-DEG, pembersihan OT BKO, pengawasan rutin pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dan Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	23.96	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 31.95 %, tercapai dengan kriteria “tidak memenuhi ekpektasi” terhadap target triwulan I.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2022	Realisasi TW III	Capaian terhadap target tahun 2022	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	23.96	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2022 sebesar 31.95 %, tercapai dengan kriteria “tidak memenuhi ekpektasi” terhadap target tahun 2023.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I tahun 2023, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha sangat rendah yaitu sebesar 14.58%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor sebesar 33.33%. Dari 99 rekomendasi yang diterbitkan, 5 tindak lanjut berupa peringatan/peringatan keras kepada sarana yang telah disertai dengan tindakan pada saat pelaksanaan pemeriksaan (pemusnahan produk TIE, kadaluwarsa atau pengamanan produk setempat). Sedangkan 51 rekomendasi tindak lanjut adalah berupa tindakan perbaikan tertulis dalam lembar *Corrective Action Preventive Action* (CAPA).

Kendala atau hambatan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

- ii. Tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan tertulis kepada petugas BPOM di Palangka Raya
- iii. Pelaku usaha/ stake holder kurang memahami tindakan perbaikan yang harus dilakukan
- iv. Pelaku usaha/stake holder telah melakukan perbaikan namun tidak melakukan penyampaian bukti tindakan perbaikan secara tertulis
- v. Masih terdapat rekomendasi pelaku usaha yang merupakan carry over tahun 2022

Alternatif solusi yang perlu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan
- Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpian Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam memenuhi peraturan perundang-undangan. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha/stake holder untuk secara aktif dan persuasif melakukan tindakan perbaikan melalui pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mengoptimalkan komunikasi baik formal maupun informal kepada penanggung jawab sarana maupun stake holder untuk melakukan perbaikan dalam bentuk CAPA serta pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara berkesinambungan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Monitoring keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara rutin setiap bulannya	1. Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk rekomendasi carry over tahun 2022 kepada pelaku usaha/stake holder terkait berdasarkan prioritas 2. Melakukan prioritas inspeksi terhadap sarana fasyanfar berdasarkan analisis risiko (dengan salah satu kriteria sarana yang belum melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi pada tahun sebelumnya)	s.d Triwulan 3 Tahun 2023
		Pengisian data RHPK Tindak Lanjut secara tepat waktu		s.d Triwulan 4 Tahun 2023
2	Meningkatkan kepatuhan pemangku kepentingan (pelaku usaha dan stake holder) dalam memberikan tindakan perbaikan terhadap hasil inspeksi dalam bentuk CAPA	Mengoptimalkan komunikasi baik formal maupun informal kepada penanggung jawab sarana maupun stake holder untuk melakukan perbaikan dalam bentuk CAPA Pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha		s.d Triwulan 4 Tahun 2023

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;

- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan);
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Memenuhi Ekapektasi	Memenuhi Ekapektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus =

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = (\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah permohonan sertifikasi}) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

No.	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Permohonan	Jumlah Keputusan Sertifikasi Tepat Waktu
1.	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	12	12
2.	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	247	247
	TOTAL	259	259

Dari tabel diatas, keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan pengujian sampel sebanyak 247 sertifikat hasil pengujian (95,36%) dan sisanya 12 rekomendasi (4,64%) adalah layanan sertifikasi. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga yang telah diterbitkan terdiri dari 244 sampel barang bukti tindak pidana, 3 sampel pangan berasal dari Instansi/OPD. Sedangkan surat rekomendasi yang telah diterbitkan terdiri dari 5 Izin Penerapan CPPOB, 2 rekomendasi Sertifikat CDOB, 5 Hasil Pemeriksaan dalam

rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekapektasi

Realisasi keputusan sertifikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW I tahun 2023 (100,0%) jika dibandingkan dengan target TW I (100,0%), telah tercapai sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekapektasi

Realisasi keputusan sertifikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW I tahun 2023 (100,0%) jika dibandingkan dengan target 1 tahun (100,0%), telah tercapai sebesar 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh permohonan baik sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan tepat waktu. Penyelesaian 247 sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan inovasi yang dimiliki oleh laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya yaitu KAHAYAN dimana sampel barang bukti tindak pidana narkoba diselesaikan dengan timeline satu hari saja. Sebanyak 12 keputusan Sertifikasi yang dapat diselesaikan sesuai service level agreement (SLA) / janji layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan inovasi UMKM BERDIKARI, UMKM dibimbing oleh 1 orang fasilitator dari awal hingga diperoleh izin edar. Penerbitan keputusan Sertifikasi mengalami perubahan proses bisnis dengan berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Perubahan proses tersebut antara lain untuk penerbitan

Izin Penerapan CPPOB sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dimana pelaku usaha yang termasuk dalam skala Usaha Mikro Kecil dan memiliki produk pangan dengan risiko kategori rendah dan sedang maka tidak perlu dilakukan audit sarana. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen persyaratan saja, sedangkan pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak IP CPPOB terbit. Walaupun penerbitan Izin Penerapan CPPOB tersebut tanpa dilakukan pemeriksaan sarana, namun kendala masih ada karena pemahaman pelaku usaha terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan masih kurang yang mengakibatkan perlunya pendampingan dalam penyusunannya. Salah satu upaya yang ditempuh petugas adalah dengan menyediakan dokumen contoh yang dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan bagi pelaku usaha dan melaksanakan bimbingan untuk penyusunan dokumen yang dilakukan langsung oleh fasilitator pendamping. Selain itu, dilakukan desk kepada pelaku usaha untuk perbaikan terhadap dokumen yang belum sesuai. Perubahan juga terjadi pada sistem elektronik / aplikasi yang digunakan untuk penerbitan Izin Penerapan CPPOB dan Sertifikat CPOTB Bertahap melalui e-sertifikasi yang telah terintegrasi dalam sistem One Single Submission Risk Based Analysis (OSS RBA). Sedangkan Surat Pemenuhan Aspek CPKB langsung diajukan melalui OSS RBA. Penggunaan sistem elektronik menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang tidak paham baik keterkaitan integrasi sistem OSS dengan sistem Badan POM maupun cara penggunaan sistem elektronik itu sendiri. Oleh sebab itu, petugas memberikan tahapan detil proses dalam sistem elektronik dan melakukan bimbingan atau desk secara langsung kepada pelaku usaha yang masih mengalami kendala.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat memenuhi target karena telah dilakukan program – program kegiatan, antara lain:

- Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian untuk pemenuhan standar laboratorium (GLP)
- Kecepatan waktu pelayanan, percepatan pengujian sampel sidik Pihak ketiga dengan one day service melalui inovasi KAHAYAN.
- Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga petugas dapat mengikuti perkembangan pengetahuan.
- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan yang dilakukan langsung dengan program pendampingan 1 UMKM 1 Fasilitator sehingga dapat berdampak langsung terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan pelaku usaha untuk

mendorong pertumbuhan UMKM baik yang memproduksi pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dengan inovasi UMKM BERDIKARI.

- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kinerja pengujian sampel pihak ketiga	Perawatan peralatan uji secara berkala	Menjadwalkan kunjungan service peralatan	selesai
		Pengadaan suku cadang dan reagen	Kontrak pengadaan reagen dan suku cadang	selesai
		Menerapkan inovasi KAHAYAN	-	-
2	Meningkatkan pendampingan UMKM	Desk pendaftaran	Desk pelaku usaha	selesai
		Desk CAPA	Desk pelaku usaha	selesai

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW IV		1 tahun	TW IV	1 tahun	TW IV
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	72.73	111.89	111.89	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus =

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan. Adapun makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau

tidak lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Proses pengawasan sarana produksi obat dan makanan pada triwulan 1 2023 dengan jumlah sarana produksi yang diperiksa adalah sejumlah 22 sarana dengan hasil sebanyak 16 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 72.73%. Capaian pada indikator ini 111.89% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian terhadap target TW IV	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72.73	111.89	Memenuhi Ekspektasi

Apabila dilakukan perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target triwulan berjalan, sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu "Memenuhi Ekspektasi".

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW IV	Capaian terhadap target tahun 2022	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72.73	111.89	Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target tahun 2023, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat sarana Industri produk obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit), serta kosmetik golongan A dan B. Terdapat sarana khusus, yaitu Unit Transfusi

Darah (UTD) PMI. Sesuai dengan karakteristik daerahnya, BBPOM di Palangka Raya fokus melakukan optimalisasi pembinaan pada sarana produksi pangan yaitu seluruh sarana MD dan sarana produksi pangan IRTP serta sarana produksi obat tradisional bentuk usaha U MOT Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan produsen terhadap peraturan perundang-undangan dan pedoman cara produksi yang baik yaitu pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pedoman Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) serta meningkatkan monitoring CAPA dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke produsen dan stakeholder terkait.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 2023 antara lain :

- Pemutakhiran data sarana produksi di kabupaten/kota wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder antara lain Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM, khususnya dengan memanfaatkan kolaborasi data dan pengawasan sarana produksi dengan Kabupaten/Kota penerima DAK NF BPOM
- Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian risiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan
- Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I, dilakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan olahan yang telah mendapatkan sertifikat CPPOB dan telah mendapatkan atau memiliki memiliki NIE (Nomor Ijin Edar). Selain itu, pada triwulan I juga dilakukan pengawasan sara produksi pangan oalahan IRTP. Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan juga meningkat sehingga berkontribusi positif terhadap capaian indikator ini. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya intervensi dan pembinaan dan pendampingan secara intensif oleh BBPOM di Palangka Raya serta pembinaan oleh dinkes dengan adanya DAK Non Fisik Pangan oleh Badan POM untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pengawasan IRTP semakin baik. Adapun sarana TMK pada sarana IRTP didominasi oleh temuan tidak adanya dokumentasi produksi serta alat timbang untuk penimbangan Bahan Tambahan Pangan. Pada sarana IRTP yang memang sarana produksi rumahan masih belum terbiasa dengan pendokumentasian kegiatan produksi dan penakaran BTP menggunakan timbangan serta higiene dan sanitasi.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sesuai rencana	Membuat POA per triwulan dan per bulan Bersinergis dengan kegiatan sertifikasi khususnya pemberdayaan sarana IRTP agar jumlah IRTP yang memenuhi persyaratan CPPOB semakin meningkat.	POA	Selesai Tahun 2023
		Monitoring dan evaluasi capaian /realisasi pemeriksaan sarana sesuai target	POA	Selesai Tahun 2023
		Membuat surat tindak lanjut kepada sarana	TL	Selesai Tahun 2023
2	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi	Update data sarana produksi IRTP Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM, khususnya dengan memanfaatkan kolaborasi data dan pengawasan sarana produksi dengan Kabupaten/Kota penerima DAK NF BPOM tahun 2023		Selesai Tahun 2023
		Koordinasi kepada stake holder terhadap tindak lanjut hasil pengawasan IRTP di wilayah kabupaten/kota dan upaya pembinaan		Selesai Tahun 2023
		Menyediakan pelayanan <i>help desk</i> untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi		Selesai Tahun 2023

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	88.37	133.9	133.9	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus =

$$\text{Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} = \left(\frac{\text{jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada :

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan triwulan I diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya kepada 86 sarana, dengan hasil 76 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya mencapai target sebesar 133.90% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	88.37	133.90	Tidak Dapat Disimpulkan

Apabila dilakukan perbandingan realisasi TW IV tahun 2023 terhadap target triwulan berjalan, persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu "Tidak Dapat Disimpulkan".

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	88.37	133.90	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target tahun 2022, persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu "Tidak Dapat Disimpulkan".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Pada awal tahun 2023 mencuat informasi kasus kesakitan (foodborne disease) pada anak di Ponorogo, Tasikmalaya dan Bekasi karena diduga mengonsumsi chikibul/smoke snack. Chikibul/smoke snack merupakan pangan olahan siap saji golongan pangan ekstrudat yang dituang/dicelup Nitrogen cair/Liquid Nitrogen (LN2) untuk mendinginkan pangan tersebut secara cepat serta menghasilkan efek dingin dan berasap. Sebagai langkah kehati-hatian, BPOM melalui Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menginstruksikan untuk melakukan pemantauan dan penertiban produk Chikibul/smoke snack di pusat keramaian (mall, pasar, pasar malam, pelabuhan dan lokasi pameran/expo). Penertiban kasus ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di seluruh wilayah pengawasan BBPOM di Palangka Raya.

- Fokus pengawasan dan monitoring penarikan produk Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional (sirup anak) yang mengandung EG-DEG melalui pengawasan intensif maupun rutin.
- Kegiatan pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik, OT, SK dalam rangka pengawasan rutin, penarikan dan pengamanan produk dalam rangka menindaklanjuti surat pusat sampai dengan Maret 2023 adalah 21 sarana diperiksa.
- Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023 sampai bulan Maret 2023 pada 31 sarana distribusi pangan olahan (kios, toko, swalayan, mini market, hypermart dan distributor).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana disitribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- Kesiapan dan kesigapan dalam melaksanakan instruksi BPOM dalam penanganan kasus khusus pada triwulan I tahun 2023, antara lain: pengawasan smoke snack/Cikibul, monitoring penarikan produk sirup Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional yang mengandung cemara EG-DEG. Keberhasilan ini juga didukung dengan koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang solid dalam penanganan kasus di lapangan.
- Kesiapan *tools*, perangkat dan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan dalam rangka pengawalan Mutu dan Keamanan mutu obat dan pengelolaan Vaksin Covid-19 pada sarana pelayanan kefarmasian dengan asistensi dari Direktorat Pengawasan ONPP BPOM secara intensif.
- Pembinaan kepada pelaku usaha, penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi/pelayanan obat yang tidak memenuhi ketentuan;

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sesuai rencana	Membuat POA per triwulan dan per bulan		Selesai TW I Tahun 2023
			Monitoring dan evaluasi capaian /realisasi pemeriksaan sarana sesuai target	s.d TW 4 Tahun 2023
			Membuat surat tindak	s.d TW 4 Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			lanjut kepada sarana Kajian risiko penyusunan prioritas pengawasan sarana distribusi dan fasyanfar sesuai dengan juknis terbaru	s.d TW 2 Tahun 2023
			Optimalisasi pengawasan rutin terhadap sarana distribusi masih perlu dilakukan dengan cara sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha, serta meningkatkan kompetensi petugas.	s.d TW 4 Tahun 2023

6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria capaian terhadap target
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.44	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian indeks pelayanan publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai :

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D. penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik ditetapkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)
- 2) Profesionalitas SDM (18%)
- 3) Sarana Prasarana (15%)
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)

5) *Konsultasi dan Pengaduan (15%)*

6) *Inovasi (7%).*

Hasil penilaian enam aspek Indeks Pelayanan Publik, dikategorikan sebagai berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna
4,51-5,0	A	Pelayanan Prima
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
3,51-4,0	B	Baik
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51-3,0	C	Cukup
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51-2,0	D	Buruk
1,01-1,5	E	Sangat Buruk
0-1,0	F	Gagal

Pada TW I tahapan penilaian UPP oleh Badan POM belum dilaksanakan, sehingga belum didapatkan hasil penilaiannya. Pada TW I, Balai melakukan pembenahan sistem dan perbaikan serta penambahan sarana prasarana untuk melengkapi kekurangan data dukung agar mencapai hasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 ini.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.44	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Target penilaian IPP ditetapkan untuk capaian 1 tahun dikarenakan penilaian dilakukan 1 kali dalam setahun. Tahapan penilaian akan dilaksanakan pada TW II dan hasilnya akan diketahui pada TW III. Capaian kinerja pada TW I Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya adalah 0 dengan kriteria "Tidak Memenuhi Ekspektasi".

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW I tahapan penilaian UPP oleh Badan POM belum dilaksanakan, sehingga tidak ada tahapan penilaian yang dilakukan di TW ini. Dalam upaya perbaikan secara kontinyu, Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan pembenahan sistem dan sarana prasarana untuk melengkapi kekurangan data dukung pada tahapan penilaian yang akan dimulai TW II. Perbaikan terus menerus dilakukan terhadap unsur-unsur pelayanan agar kualitas pelayanan bisa dipertahankan dengan baik. Unsur-unsur pelayanan yang akan selalu ditingkatkan meliputi :

- 1) kebijakan pelayanan melalui pengumuman maklumat pelayanan di berbagai kanal media (cetak, elektronik, sosial dll), maklumat juga diumumkan menggunakan bahasa daerah/Dayak agar maknanya lebih dipahami oleh masyarakat daerah. Selain itu ada Inovasi Garansi Layanan Prima kepada pelanggan, jika pelanggan menemui kondisi tidak ada petugas di ruang pelayanan pada saat jam layanan bisa melaporkan langsung ke Kepala BBPOM di Palangka Raya sebagai andil untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- 2) peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kompetensi (bimbingan teknis, pelatihan, capacity building, sosialisasi, konsultasi dan koordinasi ke Badan POM sebagai konstitusi induk dll) baik mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Badan POM
- 3) Perbaikan Sarana Prasarana melalui penambahan jumlah sarana baru yang diperlukan dan pemeliharaan kebersihan sarana prasarana yang sudah ada. Sarana prasarana yang telah dilengkapi meliputi: penambahan wallpaper dengan warna cerah agar memberikan suasana yang baru, sofa tunggu yang menarik agar memberi kesan menarik, tanaman di ruang pelayanan agar kegiatan pelayanan tidak terkesan monoton
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) disampaikan kepada masyarakat luas agar mengetahui jenis dan standar layanan publik yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya, masyarakat bisa turut andil membantu dalam hal pengawasan pelayanan yang telah diberikan. Telah dibuat 'Etika dalam Pelayanan terhadap Masyarakat' yang mengacu pada Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan POM
- 5) Konsultasi dan Pengaduan merupakan salah satu jenis layanan yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya, demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, area pelayanan dibuat terpadu satu pintu (PTSP) dan disediakan ruangan khusus pengaduan (tidak terjangkau kamera CCTV) terkait pengawasan obat dan makanan, integritas dan kredibilitas petugas
- 6) Inovasi demi perbaikan kualitas layanan terus dilakukan, hal yang telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya terkait inovasi layanan ini adalah tahun 2022 membuat Inovasi LAURA JEMPOL (Layanan Uji Gratis Jemput Bola). Inovasi ini berasal dari masukan lintas sektor pada saat FKP yang menginginkan agar jangkauan layanan yang dimiliki diperbanyak dan diperluas dalam hal tempat dan segmen masyarakat yang dilayani. Pelaksanaan Lauran Jempol diintegrasikan dengan kegiatan mobil laboratorium keliling dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2023.

Rekomendasi yang telah disampaikan pada TW sebelumnya telah dilaksanakan dalam upaya perbaikan kualitas layanan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan dikaitkan dengan maklumat pelayanan dan inovasi Garansi Layanan Prima
2. Meningkatkan kompetensi petugas layanan melalui Capacity Bulding tentang "*Be a Professional Master of Ceremony*"

3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik, meningkatkan kebersihan dan kerapian ruang pelayanan
4. Monitoring dan evaluasi Kebijakan *Reward and Punishment* bagi Pemberi dan Penerima Layanan setiap triwulan
5. Melaksanakan, monitoring dan evaluasi LAURA JEMPOL serta inovasi lain di area peningkatan kualitas pelayanan publik

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya perbaikan demi peningkatan pencapaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2023 sebelum dan sesudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai adalah melanjutkan upaya perbaikan yang sudah dilakukan, yaitu :

- Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana ruang pelayanan publik secara kontinyu, antara lain: tersedianya ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu pintu untuk seluruh jenis layanan yang dimiliki, yaitu : (1) Layanan Informasi/Pengaduan; (2) Layanan Pengujian sampel pihak ketiga; (3) Layanan Pendampingan Pendaftaran Produk. Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan *free coffee*, akses wifi gratis, kantin kejujuran, kotak saran, media cetak/media siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan berbagai fasilitas lain untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- Memperbarui maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dikarenakan terjadinya perubahan pimpinan dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Palangka Raya yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat antara lain: melalui aplikasi APIK (Anda Perlu Informasi Klik disini) yang dapat diakses oleh seluruh tamu BBPOM di Palangka Raya dan spanduk di depan kantor BBPOM di Palangka Raya dan penerapannya dilakukan secara konsisten serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sosialisasi juga disampaikan melalui berbagai kanal media sosial milik BBPOM di Palangka Raya, media cetak dan media elektronik.
- Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya antara lain: (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai melalui: Aplikasi e-UMKM Harati; (2) Garansi Layanan Prima melalui pemberian kompensasi apabila ditemukan layanan kosong; (3) Duta Layanan; (4) Kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan setiap triwulan. Pada tahun 2022 layanan publik menambah inovasi baru, yaitu : Laura Jempol (Layanan Uji Gratis Jemput Bola). Inovasi ini bertujuan untuk lebih mendekatkan BBPOM di Palangka Raya kepada masyarakat luas mengingat pelanggan layanan milik Balai sejatinya hanya pada kalangan terbatas pelaku usaha.
- Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya telah disosialisasikan melalui media sosial BBPOM di Palangka Raya. Kedepannya BBPOM di Palangka Raya akan

berupaya membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.

- Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan budaya kerja yang baik dan berdaya saing. Pelatihan dilaksanakan secara kontinu guna mendapatkan hasil yang maksimal.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan dikaitkan dengan maklumat pelayanan dan inovasi Garansi Layanan Prima	Monitoring dan evaluasi layanan informasi dan pengaduan dilaksanakan setiap bulan	Peningkatan monev pada saat penginputan data layanan ke aplikasi simpellpk	Tiap TW
		Monitoring dan evaluasi jadwal layanan informasi dan pengaduan dilaksanakan setiap bulan	Identifikasi kegiatan layanan dengan agenda program yang lain sehingga layanan tidak terabaikan	Tiap TW
		Mengidentifikasi layanan yang dirujuk ke kelompok substansi lain	Identifikasi, monitoring, dan evaluasi layanan yang memerlukan rujukan ke kelompok substansi lainnya agar layanan tidak melebihi SLA	Tiap TW
2	Meningkatkan kompetensi petugas layanan melalui Capacity Bulding tentang " <i>Be a Professional Master of Ceremony</i> "	Menghubungi vendor	Pelaksana kegiatan dari eksternal telah ditunjuk	Selesai dilaksanakan
		Revisi anggaran	Telah dilakukan revisi anggaran dari optimalisasi anggaran	Selesai dilaksanakan
		Kriteria dan jumlah peserta	Ditentukan peserta berasal dari kelompok substansi infokom dan petugas layanan penerimaan sampel	Selesai dilaksanakan
		Pelaksanaan capacity building	Dilaksanakan di luar kota selama 2 hari ditambah 2 hari	Selesai dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			untuk perjalanan pada bulan November 2022	
3	Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik, meningkatkan kebersihan dan kerapian ruang pelayanan	Identifikasi jenis sarana prasarana dan perlengkapan layanan yang tidak lengkap/habis	Membuat daftar kebutuhan sarana untuk selalu disediakan di area pelayanan	1 tahun
		Pemantauan terhadap kebersihan dan kerapian sarana prasarana	Meminta petugas kebersihan membuat checklist pembersihan area/ruang yang menjadi tanggung jawabnya	1 tahun
		Pemantauan terhadap kinerja petugas kebersihan layanan		
4	Monitoring dan evaluasi Kebijakan <i>Reward and Punishment</i> bagi Pemberi dan Penerima Layanan setiap triwulan	Melaksanakan, Monitoring dan evaluasi Kebijakan <i>Reward and Punishment</i> bagi Pemberi dan Penerima Layanan setiap triwulan	Mendata dan menganalisis capaian dari petugas pemberi layanan atas kepuasan/komplain dari pelanggan	Tiap TW
			Membuat laporan monev	Tiap TW
			Membuat tindak lanjut atas monev Kebijakan <i>Reward and Punishment</i> bagi Pemberi dan Penerima Layanan	1 tahun
5	Melaksanakan, monitoring dan evaluasi LAURA JEMPOL serta inovasi lain di area peningkatan kualitas pelayanan public	Melaksanakan, Monitoring dan evaluasi LAURA JEMPOL serta inovasi lain di area peningkatan kualitas pelayanan publik	Mendata dan menganalisis capaian dari inovasi	Tiap TW
			Membuat laporan monev	Tiap TW
			Membuat tindak lanjut atas monev LAURA JEMPOL serta inovasi lain di area peningkatan kualitas pelayanan publik	1 tahun

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar

Persentase UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator baru yang mulai diukur tahun 2022, indikator ini sebelumnya hanya diukur di unit kerja pusat. terdapat perbedaan Definisi UMKM yang 114 memenuhi standar untuk masing-masing jenis komoditi produk. UMKM Pangan yang memenuhi standar yaitu UMK yang menerima surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai sesuai Pedoman Pendampingan Penerapan CPPPOB bagi UMK Pangan. Namun perhitungan untuk UMK pangan olahan disesuaikan berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPPOB) yang memberikan batas waktu maksimal pemeriksaan sarana hingga 12 bulan setelah izin terbit sehingga perhitungan capaian dilakukan terhadap UMK Pangan yang telah memiliki IP CPPPOB dan telah dilakukan pemeriksaan sarana. UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar yaitu UMKM yang menerima surat rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap baik untuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tahap I atau Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Tahap I. Sedangkan UMKM Kosmetik yang memenuhi standar yaitu UMKM yang menerima Persetujuan denah atau Surat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) atau SK penerbitan nomor notifikasi kosmetik atau Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	22.5	56.07	NA	249.2	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase keputusan UMKM yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =

$$(A + B + C)/3$$

Dimana :

A = Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar dibagi Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan kali 100%

B = Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar dibagi Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan kali 100%

C = Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar dibagi Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan kali 100%

Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2023

No.	Jenis komoditi	Target UMKM yang Didampingi	Jumlah UMKM yang MS	% UMKM yang MS
1.	Obat Tradisional	3	1	32.5 %
2.	Pangan Olahan	13	5	43.2 %
3.	Kosmetik	1	1	92.5%
	Total	17	7	168.2 %
	Rata-Rata			56.07 %

UMK Pangan Olahan telah terbit Izin Penerapan CPPOB sebanyak 5 sarana produksi dan telah dilakukan pemeriksaan sarana sebelum batas waktu maksimal 12 bulan. UMKM Obat Tradisional telah masuk permohonan Surat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara Bertahap tahap 2, untuk 1 sarana UMOT. Sedangkan UMKM Kosmetik yang menerima rekomendasi persetujuan denah dan telah dilakukan pembimbingan terhadap 1 sarana.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	22.5	56.07	249.2	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik TW 1 tahun 2023 sebesar 56,07% telah melewati target TW I 22.5% dengan nilai pencapaian indikator sebesar 249,2% dengan kriteria " Tidak Dapat Disimpulkan". Terdapat 7 sarana UMKM yang telah memenuhi syarat.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	56.07	NA	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2023 sebesar 56,07% dengan target tahun 2023 (79%) dengan kriteria " Tidak Dapat Disimpulkan". Terdapat 7 sarana UMKM yang telah memenuhi syarat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingginya capaian indikator tahun 2023 disebabkan pendampingan intensif yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya kepada pelaku usaha baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Pendampingan dilakukan dengan inovasi UMKM BERDIKARI untuk membantu dan memantau kemajuan yang telah dicapai oleh pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen persyaratan. Belum optimalnya capaian di UMKM OT disebabkan kesulitan pelaku usaha UMOT untuk memperoleh penanggung jawab dikarenakan terkendala modal dan pembuatan NIB pada proses pembuatan PT perseorangan. Pendampingan dilakukan terhadap 3 sarana UMOT yang telah menjadi target, dan 1 sarana yang telah mengajukan SPA CPOTB Bertahap Tahap 2. Capaian untuk UMKM Pangan Olahan juga tidak optimal disebabkan oleh belum terlaksananya tahapan Bimbingan Teknis CPPOB sampai dengan akhir TW I. Untuk meningkatkan capaian ini, perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- Melaksanakan pendampingan UMKM secara intensif sesuai perencanaan yang telah dibuat.
- melaksanakan Inovasi UMKM BERDIKARI dengan bekerjasama dengan pihak Universitas sebagai fasilitator UMKM.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Inovasi UMKM BERDIKARI untuk mensinergikan pendampingan UMKM yang ada di masing-masing instansi dan pembangunan Fasilitator mahasiswa
- Pelaksanaan pendampingan teknis terhadap pelaku usaha UMKM dan Layanan konsultasi 24 jam bagi pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar baik secara daring maupun luring
- Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi BBPOM di Palangka Raya yang melaksanakan pendampingan kepada UMKM
- Pelaksanaan pelayanan di beberapa Mall Pelayanan Publik.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan capaian kinerja pendampingan UMKM Obat Tradisional	Fasilitasi pendampingan umkm OT di Kab. Kapuas	Melakukan desk registrasi UMKM OT di Kab Kapuas	TW II tahun 2023
		Sertifikasi izin penerapan CPOTB	Sertifikasi izin penerapan CPOTB Bertahap	TW IV tahun 2023
2	Meningkatkan capaian kinerja pendampingan UMKM Pangan Olahan	Fasilitasi pendampingan UMKM Pangan olahan	Bimtek CPPOB	TW II tahun 2023
		Desk Sertifikasi UMKM	Desk UMKM	TW III tahun 2023
		Sertifikasi izin penerapan CPPOB	Sertifikasi izin penerapan CPPOB	Akhir triwulan IV tahun 2023
3	Meningkatkan capaian kinerja pendampingan UMKM Kosmetik	Desk Sertifikasi UMKM	Desk sertifikasi UMKM Bawi Bakena	Akhir triwulan IV tahun 2023
		Desk Registrasi notifikos	Desk notifikos	Akhir triwulan IV tahun 2023
4	Pengembangan aplikasi UMKM Harati	Up grade aplikasi UMKM Harati menjadi UMKM BERDIKARI	Upload contoh dokumen dan pembelajaran	Selesai

5

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 98.47 dengan kriteria "Baik". Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	90.74	94.82	94.82	Belum Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100	20	25	25	125	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Jumlah desa pangan aman	25	27	20	80	74.07	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi
4	Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	100	25	25	25	100	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran					98.47	98.47	Baik	Baik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria capaian terhadap target
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	90.74	94.82	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat baik dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau pernah mendapatkan KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online* survei.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada triwulan I tahun 2023 diperoleh nilai 90.74 dengan capaian sebesar 94.82% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	90.74	94.82	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah target kumulatif per tahun. Jika membandingkan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 90.74 dengan target tahun 2023 sebesar 95.7, maka capaian yang diperoleh sebesar 94.82% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada indikator efektivitas KIE ini didapat capaian pada TW I ini 94.82% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Penyebab tidak tercapainya indeks efektivitas KIE ini adalah :

- jumlah responden yang mengisi survei yang melebihi target yang ditentukan, sehingga hasil penilaian masyarakat menjadi sangat beragam.
- latar belakang demografi responden survei bervariasi dari segi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan memengaruhi hasil survei dan merupakan tantangan yang cukup kompleks untuk membuat KIE bisa diterima oleh peserta

Atas capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023, untuk perbaikan kinerja pada triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut :

- 1) Meningkatkan jumlah dan variasi konten berita pada media sosial dengan kemasan yang lebih menarik terutama di kalangan milenial dan Ibu Rumah Tangga sebagai pengguna terbanyak.
- 2) Mengaktifkan media Youtube dan Tiktok sebagai sarana publikasi dan KIE
- 3) Memperhatikan target KIE agar peserta mampu mengambil manfaat yang sebaik-baiknya sehingga lebih paham terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan KIE yang dilaksanakan
- 4) Monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada responden survei, mendengarkan/menerima saran atau masukan dari peserta agar kualitas KIE semakin baik lagi

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa agenda KIE dan pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung dan akan dilaksanakan oleh BBPOM POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan selama TW I tahun 2023, antara lain:

- KIE Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan pada 16 Maret 2023 di Aula Bapelkes Kalimantan Tengah. Narasumber berasal dari lintas sektor (Dinas Kesehatan, DPMPSTP) dan narasumber Balai, peserta berjumlah 60 orang berasal dari lintas sektor, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.
- Penyebaran informasi dengan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet/brosur tentang keamanan pangan di setiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Palangka Raya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.
- Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan melalui kegiatan Operasional Mobil Laboratorium Keliling sampai tingkat desa dan kelurahan dengan pembagian brosur/leaflet, pemasangan spanduk, KIE langsung kepada pelaku usaha.
- Sosialisasi/Bimtek secara langsung mengenai 5 Kunci Keamanan Pangan terhadap pedagang takjil di Jl. Kecipir, Kelurahan Langkai dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- KIE melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok) tentang obat dan makanan aman sebanyak 37 postingan selama Triwulan I 2023.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan jumlah dan variasi konten berita pada media sosial dengan kemasan yang lebih menarik terutama di kalangan milenial dan Ibu Rumah Tangga sebagai pengguna terbanyak.	Identifikasi tema dan materi	Konten yang bervariasi dengan tema mengenai pangan, obat, obat tradisional, suplemen, obat dan kosmetik.	Triwulan IV tahun 2023
		Persiapan kegiatan	Menyiapkan rancangan materi konten medsos	Triwulan IV tahun 2023
		Pelaksanaan	Postingan di berbagai medsos balai mengenai masing-masing tema KIE	Triwulan IV tahun 2023
		Monitoring dan evaluasi	Dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang sama di waktu mendatang	Triwulan IV tahun 2023
2	Meningkatkan kolaborasi dengan pentaheliks termasuk media dan influencer yang potensial	Identifikasi tema dan materi	Konten dengan tema pangan	Triwulan IV tahun 2023
		Persiapan kegiatan	Menyiapkan rancangan materi konten medsos	
		Pelaksanaan	Postingan di berbagai medsos balai dan medsos influencer	
		Monitoring dan evaluasi	Dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang sama di waktu mendatang	
2	Melakukan KIE melalui media elektronik dengan tema beragam yang informasinya diperlukan oleh masyarakat	Identifikasi tema dan materi	Pelaksanaan KIE akan mengusung tema Kosmetika Aman	Triwulan II tahun 2023
		Persiapan kegiatan KIE di TVRI	Menghubungi TVRI, penawaran dari TVRI, durasi acara, narasumber	Triwulan II tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		Pelaksanaan	Acara dihadiri narasumber luar (Dokter Kecantikan), narasumber balai dan disiarkan secara live	Triwulan II tahun 2023

1. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria capaian terhadap target
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) aman	20	25	125	Tidak Dapat Disimpulkan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman.

Kegiatan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan pemilihan wilayah didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di kedua Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang belum diintervensi pada tahun sebelumnya dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman. Capaian indikator pada TW I tahun 2023 dihitung dari persentase penyelesaian tahapan program, sedangkan target jumlah sekolah yang telah berhasil menerapkan keamanan pangan dengan diterbitkannya sertifikat PJAS Aman merupakan target akhir tahun yang mana pada tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya mendapatkan target 100% sebanyak 68 sekolah. Capaian pada TW I diperoleh 25% dari target 20% sehingga didapat kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2022	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) aman	100	25	25	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada triwulan I tahun 2023 sebesar 25% terhadap target akhir tahun 100% sebanyak 68 sekolah, dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator pada TW I tahun 2023 berdasarkan penyelesaian tahapan kegiatan adalah 25% dari target 20%. Faktor penyebab keberhasilan capaian ini adalah kepatuhan pelaksana program kegiatan untuk memenuhi jadwal yang telah ditetapkan dan ditetapkannya perolehan output tiap minggu agar tidak mengganggu agenda kegiatan lainnya. Minimnya jumlah pelaksana program dibutuhkan komitmen tinggi dan kerja sama dari seluruh staf. Faktor lain adalah dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota/Daerah lokasi pelaksanaan Program.

Rekomendasi perbaikan agar kualitas pelaksanaan program lebih meningkat, yaitu :

- a. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi sekolah yang diintervensi
- b. Pemberian paket edukasi
- c. Bimbingan Teknis bagi Kader Sekolah

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk mewujudkan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman di TW I antara lain :

1. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor pada Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau
2. Sosialisasi Keamanan Pangan di sekolah perluasan (di luar sekolah yang diintervensi dengan syarat dilaksanakan di Kabupaten berbeda dari Kabupaten yang diintervensi). Sosialisasi Keamanan Pangan tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan sebanyak 63 (enam puluh tiga) sekolah atau sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang berasal dari komunitas guru dan murid.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, yang terdiri dari : Pembentukan Tim Keamanan Pangan	Tidak menunda kegiatan	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
		Meningkatkan koordinasi	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai	Selesai pada

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	sekolah dan Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh kader Keamanan Pangan sekolah	dengan kader sekolah	100% (54 sekolah)	TW IV 2022
		Monev kegiatan secara berkala	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
2	Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman	Tidak menunda kegiatan sampling dan pengujian	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
		Meningkatkan koordinasi dengan kader sekolah	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
		Monev kegiatan secara berkala	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
3	Pengawasan Sekolah	Tidak menunda kegiatan pengawasan	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
		Meningkatkan koordinasi dengan kader sekolah	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022
		Monev kegiatan secara berkala	Telah selesai dilaksanakan sehingga realisasi tercapai 100% (54 sekolah)	Selesai pada TW IV 2022

2. Jumlah desa pangan aman

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman

sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam program desa pangan aman, desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target adalah desa . Tahapan program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi keamanan pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman Ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	27	20	74.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi dan desa yang mendapatkan pengawalan pengawasan keamanan pangan.

Pada TW I 2023 tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah dilakukan adalah tahapan advokasi kelembagaan desa di Kabupaten yang menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau. Tahapan ini merupakan tahapan awal pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam upaya mensukseskan Program Prioritas Nasional khusus Program Desa Pangan. Persentase Realisasi tahapan

program desa pangan aman pada TW I ini sebesar 20% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 74.07% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam penetapan target desa yang akan diintervensi di Kabupaten Pulang Pisau dan keterlambatan dalam pengadaan rapid testkit dan paket edukasi.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25	20	80	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian kinerja TW I tahun 2023 sebesar 80% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” . Realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2024 sehingga perbandingan yang dapat dilakukan adalah capaian kinerjanya. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 serta segera mengatasi masalah yang menyebabkan capaian kinerja belum memenuhi ekspektasi pada triwulan 1 ini.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I ini, BBPOM di Palangka Raya belum memenuhi ekspektasi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kendala dalam penetapan target desa dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau sehingga pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan belum dilakukan pengadaan rapid testkit dan paket edukasi. Upaya yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Menyusun roadmap seluruh tahapan pelaksanaan sampai akhir tahun
2. Percepatan pelaksanaan masing-masing tahapan
3. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada TW I 2023 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Desa Pangan Aman di Kabupaten Barito Utara dan Pulang Pisau antara lain:

- Melaksanakan tahapan Advokasi Kelembagaan dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sector terkait untuk mensukseskan program Desa Pangan Aman menuju kemandirian pangan. Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait Kabupaten Barito Utara dan Pulang Pisau berkomitmen mendukung penuh program Prioritas Nasional khususnya Desa Pangan Aman sesuai tugas dan fungsinya masing-masing di daerah.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan kepada Desa/Kelurahan yang diintervensi program Desa Pangan Aman dalam pelaksanaan keamanan pangan di desanya serta tetap memonitor komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil capaian TW I dan rekomendasi di tahun 2022, BBPOM di Palangka Raya masih harus menyusun langkah-langkah strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Renstra 2020-2024, antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian dan kendala untuk setiap tahapan program Desa Pangan aman	Evaluasi melekat setiap bulannya terhadap capaian dan kendala yang dihadapi di lapangan	Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Setiap akhir triwulan
2	Menyusun roadmap seluruh tahapan kegiatan program Desa Pangan Aman	Matriks rencana pelaksanaan kegiatan setiap bulannya	Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan	Setiap akhir triwulan

3	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait rencana pelaksanaan setiap tahapan program di kabupaten/kota yang diintervensi	Koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendapatkan dukungan dan komitmen dalam mensukseskan program Desa pangan Aman	Koordinasi berkelanjutan dengan pemda dan lintas sektor terkait	TW 4
---	---	--	---	------

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria capaian terhadap target
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100	Memenuhi Ekspektasi

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Indikator Pasar pangan aman berbasis komunitas mengalami perubahan nama setelah ditetapkannya Reviu Renstra 2021-2024 pada bulan Oktober 2020, yang semula bernama Pasar aman bebas dari bahan berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar aman berbasis komunitas, mengalami penurunan persentase Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev tahap 1 dibandingkan Monev tahap 2, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada TW I tahun 2023 capaian indikator dihitung dari tahapan kegiatan pasar yang telah dilaksanakan dengan persentase capaiannya 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	25	25	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 25%, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 100% sebanyak 9 pasar, maka capaian yang diperoleh dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW I 2023 sebanyak 25% tahapan program, jadi jika dibandingkan target triwulan I maka capaiannya adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini didukung oleh komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah lokasi pelaksanaan program.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya dalam rangka mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di TW I 2023 di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau, antara lain:

- **Advokasi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah**
Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Gedung Balai Antang yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Bapak Drs. Muhlis. Sedangkan Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Pulang Pisau Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ibu Reliasi S. Sos., M. Si.
- **Survei Pasar**
Dari hasil survei pasar di Kabupaten Barito Utara terpilih Pasar Dermaga dan Pasar Pendopo yang akan diintervensi, sedangkan di Kabupaten Pulang Pisau terpilih Pasar Handep hapakat yang akan diintervensi di tahun 2023.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeli ne
1	Bimtek Petugas Pasar dan Fasilitator Pasar	Jadwal Kegiatan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal direncanakan pada TW II tahun 2023	TW II
		Meningkatkan koordinasi dengan petugas pasar	Petugas yang akan di bimtek sebanyak 5 orang	TW II
		Monev kegiatan secara berkala	Menjalankan kegiatan monev dan pelaporan tepat waktu	TW II
2	Sampling Tahap 1	Jadwal Kegiatan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan dikoordinasikan dengan petugas pasar yang telah di bimtek	TW II
		Meningkatkan koordinasi dengan petugas pasar	Permintaan laporan sampling tepat waktu dan menyerahkan honor petugas sesuai dengan jadwal	TW II
		Monev kegiatan secara berkala	Menjalankan kegiatan monev dan pelaporan tepat waktu	TW II

6

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 91.65 % dengan kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		Kriteria capaian
		1 Tahun	TW 1		1 Tahun	TW 1	
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	18.43	18.43	92.15	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	18.23	18.23	91.15	Belum Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran						91.65	Belum Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran penyesuaian						91.65	

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat mencakup obat terapan, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta kosmetik. Sampel Obat yaitu sampel yang di sampling berdasarkan prioritas sampling yang telah ditetapkan. Diperiksa yaitu pengecekan terhadap nomor izin edar, kemasan sampel, tanggal kadaluarsa, serta penandaan atau label. Diuji meliputi pengujian laboratorium baik pengujian kimia maupun mikrobiologi. Sesuai standar adalah pemenuhan terhadap pengujian parameter uji kritis serta *timeline* pengujian yang ditetapkan pada pedoman/SOP.

Target sampel Obat yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah target sampel DIPA balai dengan ketentuan apabila jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar melebihi target sampel DIPA, maka target sampel menyesuaikan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Pada tahun 2023 perhitungan sampel yang diuji sesuai standar tidak hanya berasal dari sampel rutin BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM Kotawaringin Barat namun juga berasal dari sampel regionalisasi Laboratorium Region Samarinda yang terdiri dari BBPOM di Samarinda sebagai Balai Koordinator, dengan anggota sebagai berikut BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka POM di Kotawaringin Barat, Loka POM di Balikpapan, Loka POM di Hulu Sungai Utara, Loka POM di Sanggau, dan Loka POM di Tanah Bumbu.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

- A. $(\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$
- B. $(\text{jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar} / \text{jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$

Selama triwulan I Tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 313 sampel Obat sesuai standar terhadap 1436 target sampel yang harus diperiksa dan 272 sampel Obat yang telah diuji sesuai parameter uji kritis dan memenuhi timeline pengujian terhadap dengan 1806 sampel yang harus diuji. Hasil uji yang telah diselesaikan pada triwulan I telah mencakup sampel regional sebanyak 52 sampel dari target 84 sampel yang telah diterima oleh laboratorium.

Persentase obat yang diperiksa diperoleh dari jumlah sampel yg disampling dari wilayah pengawasan BBPOM di Palangka Raya dan tidak termasuk sampel hasil pengawasan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat serta sampel regionalisasi Laboratorium, sedangkan persentase obat yang diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel yang diuji yang telah memenuhi parameter uji kritis dan timeline termasuk sampel yang berasal dari Loka POM di Kotawaringin Barat serta sampel regionalisasi laboratorium yang berasal dari region Samarinda.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan terhadap target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Triwulan I	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	18.43	92.15	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 18.43 % belum dapat mencapai target triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20 %. Capaian indikator kinerja yaitu sebesar 92.15 % dengan kriteria “ Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Tahun 2023	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	18.43	18.43	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 18.43 % masih belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja yaitu sebesar 18.43 % dengan kriteria “ Tidak Memenuhi ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian target indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 92.15 % sehingga memperoleh kriteria capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya :

- Sampel obat yang diterima laboratorium tidak sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan jumlah sampel yang diterima tidak seragam bahkan bisa terjadi penumpukkan jumlah sampel pada waktu tertentu dan berpotensi tidak tercapainya timeline pengujian.
- Kegiatan pengadaan pada awal Tahun 2023 masih berproses, sehingga pengadaan suku cadang alat laboratorium, reagen dan media belum dapat terealisasi pada Triwulan I. Hal menyebabkan proses pengujian tidak berjalan secara optimal.
- Pada Bulan Februari 2023, Laboratorium difokuskan untuk mengawal sampel kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada produk Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan (SK). Hal ini menyebabkan terjadinya antrian penggunaan instrumen GCMS dimana instrumen yang tersedia hanya 1 (satu) unit dan digunakan untuk menguji

sampel dari berbagai komoditi seperti produk obat terapan, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.

- Telah dilaksanakan kegiatan Surveilans pertama dan *Witness* ISO 17025 pada akhir Januari 2023 sehingga kegiatan pada Triwulan I diprioritaskan untuk melaksanakan perbaikan hasil temuan. Beberapa kegiatan diantaranya seperti pelaksanaan verifikasi metode guna pemutakhiran Ruang Lingkup Akreditasi yang dimiliki oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Palangka Raya.
- Kegiatan tambahan seperti beberapa Uji Banding Antar Laboratorium dan Uji Profisiensi yang diikuti oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Palangka Raya menyebabkan tertundanya pengerjaan sampel rutin. Hal ini dikarenakan jumlah personel pengujian yang terbatas.
- Peningkatan kerusakan alat laboratorium yang disebabkan keterbatasan pengadaan suku cadang dari tahun sebelumnya sehingga beberapa alat laboratorium masih menunggu perbaikan agar dapat dipergunakan untuk pengujian. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama keterlambatan kegiatan perawatan dan verifikasi alat serta beberapa alat sebelum dilakukan verifikasi memerlukan penggantian suku cadang.
- Ketersediaan suku cadang terutama kolom HPLC yang digunakan untuk pengujian terbatas, beberapa kolom telah mengalami penurunan performa atau kerusakan (kolom HPLC dan GC, peak analit tidak keluar/peak analit tidak bagus/muncul *ghost peak* karena kontaminasi yang tidak bisa dihilangkan walaupun sudah dilakukan *treatment/cuci/regenerasi*). Beberapa penyebab penurunan performa kolom diantaranya penggunaan Metode Analisa (MA) terbaru dengan komposisi reagensia yang lebih kompleks sebagai dasar analisa pengujian, seperti menggunakan fase gerak berupa dapar (kebanyakan bentuk garam fosfat dengan pH ekstrim, sangat basa atau sangat asam). Selain itu penggunaan kolom secara simultan untuk beberapa analit dapat menyebabkan penurunan performa kolom menjadi lebih cepat.

Rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya yaitu :

- Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal terutama terkait perencanaan sampling baik ke kelompok substansi pemeriksaan maupun antar balai dan loka di region Samarinda dan region Makassar.
- Mengawal proses pengadaan yang sedang berlangsung dan mengupayakan untuk terealisasi tepat waktu.
- Melakukan perencanaan kebutuhan barang habis pakai secara berkesinambungan, tidak hanya bergantung pada perencanaan yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal ini guna meminimalisir ketidakterersediaan barang/reagen yang sering terjadi di pertengahan tahun maupun akibat dari penggunaan metode analisa yang baru.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sehingga belum dapat memenuhi ekspektasi terhadap indikator Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

- Perencanaan pengadaan yang telah tersusun sejak awal tahun diharapkan dapat mempercepat proses realisasi sehingga pengujian dapat berjalan optimal.
- Kerjasama yang baik dengan universitas setempat dan balai terdekat sehingga dapat membantu mengisi kekosongan reagen tertentu dan memperlancar proses pengujian di laboratorium.
- Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yaitu pendingin ruangan sehingga persyaratan suhu dan kelembaban terpenuhi. Hal ini membuat instrumen dapat berfungsi secara optimal.
- Kegiatan Surveilans pertama dan Witness ISO 17025: 2017 yang dilaksanakan di awal tahun lebih efektif apabila dibandingkan dengan pelaksanaan di pertengahan maupun akhir tahun. Hal ini dikarenakan perbaikan yang diperoleh dari proses asesmen dapat memberikan masukan positif bagi keberlangsungan laboratorium selama Tahun 2023.

Sedangkan kegiatan yang belum efektif dilaksanakan sehingga menunjang kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

- Proses peningkatan kompetensi personel pengujian yang masih dilakukan secara bertahap. Hal ini menjadi tidak sebanding dikarenakan tenaga penguji senior dimutasi ke kelompok substansi lainnya, sementara personel yang menggantikan masih memerlukan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
- Proses sampling yang tidak sesuai perencanaan dikarenakan tempat sampling yang dituju tidak menyediakan sampel yang sesuai dengan ketentuan sampling.
- Perbaikan serta kalibrasi terhadap alat laboratorium belum berjalan maksimal disebabkan menunggu ketersediaan suku cadang alat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan terhadap pengadaan reagen dan media, baku pembanding, suku cadang dan alat laboratorium yang belum terlaksana, pada triwulan III tahun 2022	Proses Tender Pengadaan Alat Laboratorium	-	-
		Proses Pengadaan Langsung Media Sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Melakukan identifikasi kebutuhan pereaksi dan media mikrobiologi sampel makanan yang belum terpenuhi		
		Proses Tender dan Pengadaan Langsung Suku Cadang Alat laboratorium Melakukan identifikasi kebutuhan suku cadang yang belum terpenuhi		
		Proses pengadaan Baku Pembanding Melakukan identifikasi kebutuhan baku pembanding yang masih dibutuhkan pada triwulan IV		
2	Meningkatkan koordinasi antar balai terkait pengujian sampel regionalisasi agar pengujian sampel regionalisasi dapat dilakukan tepat waktu dan memenuhi timeline pengujian yang telah ditetapkan	Aktif dalam whatsapp grup regionalisasi dalam menginformasikan kesiapan laboratorium terkait pengujian sampel regionalisasi Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		pengujian sampel regionalisasi		
		Melakukan peminjaman reagen ke balai POM terdekat (BBPOM Banjarmasin) untuk memenuhi kebutuhan reagen pengujian Monitoring dan evaluasi peminjaman reagen karena terkait data BMN		
3	Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengujian parameter uji spesifik yang belum terlaksana sampai dengan triwulan II tahun 2022 serta mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai terdekat.	Melakukan revisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan eksternal		
		Melakukan revisi anggaran untuk pelaksanaan bimtek internal		
		Kegiatan pelatihan Internal komoditi Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan internal		
4	Melaksanakan kalibrasi eksternal alat ukur untuk menjamin validitas hasil pengujian serta kalibrasi dan verifikasi instrumen.	Kalibrasi eksternal alat ukur tahap I Kalibrasi eksternal alat ukur tahap II		
		Perbaikan dan perawatan alat AAS dan HPLC Shimadzu		
		Kalibrasi Alat Ekstraksi Otomatis dan PCR yang digunakan dalam pengujian DNA Terlaksananya kegiatan kalibrasi dan verifikasi seluruh instrumen		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel makanan yang dimaksud meliputi sampel yang telah ditetapkan pada pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling, pemenuhan pengujian parameter uji kritis serta timeline pengujian yang ditetapkan pada pedoman/SOP. Diperiksa yaitu pengecekan terhadap nomor ijin edar, kemasan sampel, tanggal kedaluarsa, serta penandaan atau label. Diuji meliputi pengujian laboratorium baik pengujian kimia maupun mikrobiologi.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

- A. $(\text{jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$
- B. $(\text{jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}) \times 100\%$

f. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Triwulan I	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	18,23	91,17	Kurakng Efektif

Pada triwulan I tahun 2023 telah diperiksa 117 sampel Makanan sesuai standar terhadap 624 sampel yang harus diperiksa dan 146 sampel Makanan yang telah diuji sesuai parameter uji kritis dan memenuhi timeline pengujian terhadap dengan 824 sampel yang harus diuji. Sampel yang diperiksa dan diuji merupakan sampel yang berasal dari wilayah pengawasan BBPOM di Palangka Raya sedangkan untuk sampel yang diuji berasal dari BBPOM di Palangka Raya, Loka Kabupaten Kotawaringin Barat dan loka/BPOM/BBPOM di wilayah regional 4 Samarinda. Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 18,23% dengan capaian 91,17% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi".

g. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan I	Capaian terhadap target Tahun 2023	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	18,23	18,23	Kurang Efektif

Pada triwulan I tahun 2023, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memperoleh capaian 18,23%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka diperoleh kriteria capaian terhadap target yaitu “Belum Memenuhi Target”.

h. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kendala dalam pemenuhan capaian Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023, disebabkan oleh antara lain :

- Perhitungan realisasi dan capaian terhadap target berbanding lurus dengan pemenuhan rencana sampling yang disusun pada saat perencanaan. Pemenuhan rencana sampling memberikan pengaruh yang sangat besar, pada saat sampling sesuai dengan yang direncanakan maka otomatis akan memberikan hasil yang sesuai dengan target. Dimana pada triwulan I ini jumlah sampe yang diperiksa oleh pihak pemeriksaan kurang dari target yang ditentukan.
- Alternatif solusi dalam pemenuhan persentase Makanan yag diperiksa dan diuji sesuai standar adalah melakukan evaluasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dengan menyesuaikan target indikator serta pelaksanaan pada POA dengan memperhitungkan kondisi laboratorium yaitu ketersediaan reagensia dan media, serta rencana pengadaan reagen dan media untuk pengujian, serta metode uji yang telah disesuaikan dengan pedoman sampling tahun 2023 sehingga diharapkan target triwulan II dapat tercapai.

Rekomendasi untuk peningkatan :

- Pembuatan dan pengisian secara rutin data base sampel akan memudahkan dalam memonitor palaksanaan sampling apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Sekaligus dapat melihat apakah target sampel masuk ke laboratorium sudah sesuai atau belum. Sehingga pada saat terjadi kondisi yang perlu intervensi dapat segera dilakukan intervensi dengan segera

i. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain :

1. Kurangnya evaluasi terhadap pemenuhan pelaksanaan sampling apakah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana yang disusun pada saat perencanaan.
2. Petugas sampling kurang mematuhi rencana yang telah disusun.
3. Pengujian tidak maksimal, karena jumlah sampel yang masuk ke laboratorium tidak sesuai dengan rencana.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
1.	evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian, terkait dengan ketersediaan reagen, baku pembanding suku cadang dan alat laboratirum yang digunakan.	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.	-	-

7 Sasaran Kegiatan

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 566,67% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	3,75	21,25	21,46	566,67	Tidak memenuhi ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
	Nilai Pencapaian Sasaran				21,46	566,67	Tidak memenuhi ekspektasi	Tidak dapat disimpulkan
	Nilai Pencapaian Sasaran Penyesuaian				21,46	120		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

1. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**
 - a. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	21,25	566,67	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase keberhasilan penindakan triwulan I sebesar 21,25%. Jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 3,75% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 566,67% dengan kriteria "tidak dapat disimpulkan".

Penilaian persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [$(a + b + c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [$(b + c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [$(c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [$(d) / \text{jumlah perkara}$]

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian}) / \text{target perkara}^n$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per-UU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	21,25	21,46	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan triwulan I sebesar 21,25%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebesar 99% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 21,46% dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”. Indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan merupakan gambaran *progress* penanganan perkara sekaligus pencapaian output perkara. Target sebesar 99% pada akhir tahun tercapai jika target sebanyak 4 perkara dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada pihak kejaksaan).

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan BBPOM di Palangka Raya mencapai realisasi persentase keberhasilan penindakan

kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang cukup tinggi disebabkan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Kerja sama internal yang baik tim penindakan dan fungsi terkait (laboratorium, ahli)
- Dukungan intelijen Badan POM RI dengan memberikan informasi yang A1 (pasti) terkait adanya pengiriman obat ilegal ke wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya
- Dukungan kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM di Palangka Raya. Terhadap tersangka seluruhnya dilakukan penahanan

di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Tengah sehingga penanganan perkara juga dilakukan dengan cepat

- BBPOM di Palangka Raya aktif melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) terkait dengan penanganan dan penyelesaian perkara dalam bentuk kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelesaian berkas perkara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalteng

Atas capaian indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023, untuk perbaikan kinerja pada triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian indikator persentase keberhasilan penindakan dan upaya-upaya peningkatannya
- 2) Melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) dan aparat penegak hukum lainnya di Wilayah Kalimantan Tengah dalam penanganan perkara dan terkait dengan pelayanan berbasis elektronik
- 3) Melakukan koordinasi sekaligus penggalangan pihak ekspedisi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pintu masuk pengiriman Obat dan Makanan ilegal ke wilayah Kalimantan Tengah

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya” dilaksanakan program pengawasan obat dan makanan melalui 2 kegiatan utama yang tertuang dalam POK BBPOM di Palangka Raya tahun 2023, yaitu : Penyidikan Obat dan Makanan (Mata anggaran QCD) dan Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (Mata anggaran AEA). Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 pada tanggal 12 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu pelaksanaan cegah tangkal, intelijen termasuk siber dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

1. Penyidikan Obat dan Makanan

Pada triwulan I tahun 2023 dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas organisasi dengan melakukan *Capacity Building* Internalisasi Core Value ASN BerAKHLAK yang memberikan dampak penyegaran dan peningkatan motivasi ASN BBPOM di Palangka Raya termasuk PPNS yang melakukan penanganan perkara

- Operasi intelijen menindaklanjuti informasi pengiriman Obat dan Makanan, terhadap pelaku dilakukan pembinaan dan pemusnahan terhadap produk berupa obat bebas terbatas dengan kandungan dekstrometorphan campuran
- Operasi penindakan pada tanggal 19 Januari 2023 berdasarkan informasi intelijen dari Direktorat Intelijen BPOM tentang pengiriman paket yang diduga berisi obat ilegal
- Operasi tematik yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan informasi intelijen dari Direktorat Intelijen BPOM tentang pengiriman paket yang diduga berisi obat ilegal
- Kegiatan pendalaman informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil patroli siber

Berikut rincian nilai keekonomian barang bukti yang diperoleh dari kegiatan operasi penindakan, operasi tematik maupun operasi intelijen:

No	Jenis komoditi dan pelanggaran terhadap UU	Taksiran nilai ekonomi	
		Pro Justitia	Non Pro Justitia
1.	Obat-obat tertentu (Tanpa Izin Edar)	Rp 330.158.000,00	-
2.	Pembungkus Paket	-	-
3.	Obat Psikotropika	Rp. 450.000,00	-
4.	Obat Tradisional (Tanpa Izin Edar)	Rp. 13.825.000,00	-
5.	Obat Keras (Tanpa Keahlian dan Kewenangan)	Rp. 9.619.388,00	-
6.	Alat Komunikasi	Rp. 5.700.000,00	-
7.	Perlengkapan penjualan	Rp. 720.000,00	-
8.	Obat Bebas Terbatas (Tanpa Keahlian dan Kewenangan)	-	Rp. 3.000.000,00
	TOTAL	Rp. 360.472.388,00	Rp. 3.000.000,00

2. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Palangka Raya

Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari analisis penjejak digital dan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan.

Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan TW I tahun 2023 telah menyelesaikan 3 (tiga) laporan analisis penjejak digital bulan Januari sd Maret 2023 dan dalam tahap proses penyusunan laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan. Dalam hal ini laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan ini menjadi dasar untuk melakukan operasi intelijen dan penindakan kejahatan obat dan makan di wilayah Kalimantan Tengah.

Dari 2 kegiatan utama tersebut, pada triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil mendapatkan 3 (tiga) perkara. Tahapan dari 3 perkara tersebut sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 3 (tiga) perkara dalam tahap:
 - 1 (satu) perkara dalam tahap pemenuhan P19 atas petunjuk jaksa dan akan diterbitkan P21
 - 2 (dua) perkara dalam tahap penyerahan SPDP ke Kejaksaan Tinggi

Target output perkara tercapai yaitu sebanyak 3 (tiga) perkara pada triwulan I dengan target indikator persentase keberhasilan penindakan melebihi target yaitu 566.67%. dengan kriteria capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2023 “tidak dapat disimpulkan”. Pencapaian ini merupakan hal yang positif yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya karena realisasi melebihi target yang ditetapkan dan penyidik dapat menyelesaikan berkas perkara ini dalam waktu yang cepat. Output 3 (tiga) perkara ini juga membuktikan bahwa informasi hasil dari kegiatan dan operasi intelijen memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan dapat dilanjutkan ke proses penyidikan sebagai tahapan yang dapat berkontribusi memberikan realisasi pada persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Realisasi output perkara sebanyak 3 (tiga) perkara dengan rincian 2 (dua) perkara merupakan tindak lanjut informasi intelijen tentang tindak pidana Obat dan Makanan yang diperoleh dari Direktorat Intelijen Badan POM RI dan 1 (satu) perkara merupakan pengembangan dari perkara yang ditangani. Perkara pertama diperoleh pada akhir bulan Januari 2023, sedangkan perkara kedua dan ketiga diperoleh pada akhir bulan Maret 2023. *Progress* penanganan perkara sampai dengan akhir triwulan I 2023, 1 (satu) perkara sampai pada tahap pemenuhan P19 atas petunjuk JPU dan 2 (dua) perkara dalam tahap penyampaian SPDP ke Kejati dengan bobot sebesar 566,67% terhadap realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dibandingkan target TW I tahun 2023 adalah 3,75%. Penetapan target dilakukan dengan asumsi bahwa pada triwulan I diperoleh 1 (satu) perkara dan sampai tahap penyampaian SPDP.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Selesai	Belum		
			Rencana Aksi	Timeline	
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian indikator persentase keberhasilan penindakan dan upaya-upaya peningkatannya	Laporan Internal	Evaluasi		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Berpartisipasi aktif melakukan koordinasi dengan <i>Criminal Justice System</i> (CJS) dan aparat penegak hukum lainnya di Wilayah Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif melakukan koordinasi/konsultasi penyelesaian berkas perkara - Kolaborasi penanganan perkara dengan Polda Kalteng 		
3	Aktif dalam penggalangan kepada masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan obat dan makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi sekaligus penggalangan kepada pihak ekspedisi sehingga kegiatan operasi penindakan terhadap pelaku tindak pidana berhasil dilakukan 	Melaksanakan kegiatan koordinasi perkuatan kerjasama dengan perusahaan ekspedisi di wilayah Kalimantan Selatan sebagai ekspedisi jalur modus baru distribusi OOT illegal ke wilayah Kalimantan Tengah	Triwulan II tahun 2023
4	Aktif dalam pengawasan obat dan makanan dalam media daring melalui patroli siber	Pembaharuan terhadap tim patroli siber BBPOM Palangka Raya Perluasan link/platform yang dilakukan pengawasan daring		
5	Sosialisasi/publikasi inovasi ELAMAHAMEN (<i>E-commerce</i> dan pelaku usaha nakal masyarakat harap melaporkan) secara intensif dan berkala di Media sosial BBPOM di Palangka Raya untuk menjaring informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Sosialisasi di media social maupun kegiatan BBPOM di Palangka Raya yang melibatkan masyarakat/lintas sektor		

8

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil penilaian indikator akan diterima pada Triwulan IV sehingga perhitungan pencapaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
1	Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	89,2	0	0	0	0	NA	NA
2	Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81,6	0	0	0	0	NA	NA
Nilai Pencapaian Sasaran								

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	NA

Indeks RB BBPOM di Palangka Raya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BBPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi,

khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Rincian bobot komponen penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM berpredikat WBK/WBBM sebagai berikut:

Komponen Pengungkit	Bobot
Manajemen Perubahan	8%
Penataan Tata Laksana	7%
Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
Penguatan Pengawasan	15%
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Komponen Hasil	Bobot
Birokrasi Bersih dan Akuntabel : Nilai Survei Persepsi Korupsi 17,5% dan Capaian Kinerja Lebih Baik dari Capaian Kinerja Sebelumnya 5%	22,5%
Pelayanan Publik yang Prima: Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	17,5%

Penilaian indeks RB BBPOM di Palangka Raya dilakukan oleh Inspektorat Utama Tahun 2022 dengan hasil penilaian sebesar 87,95 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Pengungkit (60)	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
Manajemen Perubahan	8%	3,52	3,34	6,86
Penataan Tata Laksana	7%	2,88	2,83	5,71
Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4,88	4,25	9,13
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	4,84	4,45	9,29
Penguatan Pengawasan	15%	6,59	6,88	13,47
Penguatan Kualitas Pelayanan	10%	3,77	3,75	7,52

Publik

TOTAL PENGUNGKIT				51,98
Komponen Hasil (40)		Bobot		Bobot
I. Birokrasi Bersih dan Akuntabel		22,50		19,39
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi		17,50		16,89
2. Capaian Kinerja lebih baik		5,00		2,50
II. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)		17,5		16,58
TOTAL HASIL				35,97
NILAI PMPZI/RB				87,95

Capaian Indeks RB Tahun 2022 diatas menjadi dasar perbaikan dan tindak lanjut untuk capaian Tahun 2023 ini. Penilaian indeks RB BBPOM di Palangka Raya dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diterima pada triwulan IV Tahun 2023, sehingga belum ada realisasi capaian pada triwulan I. Namun demikian telah dilaksanakan pengumpulan LKE ZI beserta data dukung dan surat pernyataan reviu dari auditor internal. Desk penitaian tahap I oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, terdapat perubahan mekanisme penilaian dimana pada tahap ini Kepala Unit langsung memaparkan pelaksanaan zona integritas.

Konsistensi dan peningkatan berkelanjutan sangat diperlukan untuk pencapaian yang dapat memenuhi target. Komponen penilaian Indeks RB Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 202. Pada komponen pengungkit terdapat penilaian pemenuhan dan reform untuk masing-masing kelompok kerja dimana pada setiap aspek pemenuhan dilengkapi dengan reform yang telah dicapai meliputi implementasi, monitoring dan tindak lanjut serta kondisi sebelum dan setelah adanya suatu program/kegiatan yang dijalankan (analisa dampak/manfaat).

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	89.2	0	0	NA

Capaian indikator Indeks RB akan diterima pada Triwulan IV berdasarkan penilaian Inspektorat Utama sebesar. Pada Triwulan ini belum terdapat penilaian.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan evaluasi capaian Indeks RB BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022 yang telah mencapai target yang diharapkan, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian adalah:

1. Pembangunan ZI telah dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas;
2. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain UMKM Harati (pendampingan dan sertifikasi UMKM pangan), Pentol Isi Urat (Paman Pentol Pemberi Informasi Untuk Masyarakat), Kahayan (kemudahan layanan pengujian), dan Laura Jempol (Layanan Uji Gratis Jemput Bola).
3. Beberapa pelaksanaan operasionalisasi perkantoran telah dilakukan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi sharing folder berupa Gerobak TU, Monelaku dan Sang Prabu sehingga proses administrasi lebih sistematis dan efisien.
4. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,79 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,86 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.
5. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal kendala yang masih perlu perbaikan sebagai catatan Tahun 2022 yang perlu dilakukan tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan ZI namun belum terdapat prosedur pemilihan personel di setiap area perubahan.
2. Terdapat penurunan indeks persepsi budaya organisasi yang perlu digali penyebab adanya kemungkinan resistensi terhadap perubahan serta mitigasi yang akan dilakukan.
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik namun laporan monev belum memuat informasi terkait ada atau tidaknya permintaan informasi melalui PPID.
4. Publikasi terkait penerapan SPI belum terdapat cukup bukti telah dilakukan kepada semua pegawai dan stakeholder.
5. Inovasi pada area penguatan pengawasan berupa BAJAKAH OK (Bersama Jaga Integritas Kalimantan Tengah) sebagai media sosialisasi anti gratifikasi, pelaporan WBS

dan pengaduan masyarakat namun belum menggambarkan dampak atas implementasinya.

6. Pelaksanaan reviu dan perbaikan standar pelayanan belum terdokumentasi secara memadai termasuk keterlibatan stakeholder dalam penyusunannya serta pemanfaatan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
7. Belum seluruh hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri didukung dengan hasil analisis, rencana tindak lanjut (RTL) dan pemantauan atas RTL yang disusun.
8. Telah terdapat mekanisme reward dan punishment yang memuat kriteria penilaian kinerja namun masih belum diimplementasikan ke seluruh pegawai. Selain itu, mekanisme reward dan punishment untuk petugas pemberi pelayanan namun belum memuat unsur penilaian minimal yaitu disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan.
9. Belum seluruh inovasi yang dikembangkan telah dilakukan analisis dampak implementasi terhadap target atau tujuan inovasi tersebut.

Atas capaian indikator Indeks RB BBPOM di Palangka Raya tahun 2022, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2023 direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyempurnakan mekanisme pembentukan tim pembangunan ZI yang memuat prosedur pemilihan pegawai yang terlibat pada masing-masing area perubahan.
2. Melakukan analisis adanya kemungkinan resistensi terhadap perubahan, menyusun rencana tindak lanjut serta melakukan pemantauan atas implementasi tindak lanjut tersebut.
3. Menyempurnakan monitoring dan informasi terkait keterbukaan informasi publik yang menyajikan informasi terkait data permintaan informasi melalui PPID secara memadai.
4. Melakukan perluasan publikasi penerapan SPI kepada seluruh pegawai dan stakeholder.
5. Menyempurnakan konsep inovasi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan target dampak implementasinya terhadap stakeholder dan cara pengukuran keberhasilannya.
6. Melaksanakan reviu dan perbaikan standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder, memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat serta mendokumentasikannya secara memadai.
7. Melakukan analisis, menyusun RTL serta memantau implementasi RTL dari seluruh hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan baik mandiri maupun terpusat.
8. Menyempurnakan kebijakan reward dan punishment sehingga dapat diberlakukan kepada seluruh pegawai serta kebijakan reward dan punishment untuk petugas pemberi layanan yang memuat unsur penilaian minimal.

9. Menyempurnakan pengembangan inovasi yang sudah ada serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap target atau tujuan inovasi yang telah ditetapkan.
10. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Target Indeks RB BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2023 sebesar 89,2. Langkah awal pelaksanaan RB tahun 2023 adalah peningkatan kapasitas organisasi yang dilakukan kepada seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya untuk meletakkan landasan budaya kerja yang baik dan unggul untuk melaksanakan tupoksi secara optimal. Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I Tahun 2023 untuk mencapai target antara lain: melakukan sosialisasi RB secara intens baik secara langsung pada setiap pelaksanaan apel disiplin maupun secara online di media WhatsApp grup kantor, monitoring pelaksanaan kegiatan, keteladanan pimpinan, optimalisasi peran agent of change, workshop dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, kaji ulang dokumen (SOP), penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, intensifikasi komunikasi publik, pelaksanaan manajemen kinerja pegawai secara tepat waktu meliputi penyusunan SKP, penilaian dan monitoring, penguatan akuntabilitas kinerja melalui reviu rencana strategis, monitoring dan evaluasi internal secara ketat, pelatihan SAKIP, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan, penetapan standar pelayanan publik, pelayanan prima kepada pelanggan dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat serta persepsi anti korupsi. Rencana aksi tersebut telah dilakukan BBPOM di Palangka Raya sejak awal tahun 2023 dan telah dilakukan monitoring serta evaluasi. Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala dilaporkan sebagai data dukung pelaksanaan RB BBPOM di Palangka Raya tahun 2023.

Rencana aksi prioritas yang ditetapkan dan hingga akhir triwulan I meliputi monitoring dan evaluasi LKE ZI serta data dukung yang memadai, penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi di Badan POM serta sistem informasi internal yaitu Sistem Informasi Manajemen Arsip Surat (SiMAS), Rack2Filler utk mengakomodir database kepegawaian, pemanfaatan googlesite sebagai data center untuk melakukan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja dan keuangan (Monelaku) serta penggunaan aplikasi e-UMKM berdikari sebagai pengembangan dari e-UMKM Harati untuk fasilitasi dan pendampingan UMKM, pemakaian media sosial (twitter,

facebook dan instagram) dalam pemberian informasi keamanan obat dan makanan, penerapan sistem manajemen SDM melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai, pelatihan SAKIP dalam rangka pengelolaan akuntabilitas kinerja, pencegahan resiko dan tindakan pengendalian melalui inovasi Elamahamen dan Sang-Prabu, penetapan roadmap dan pelaksanaan inovasi-inovasi baru dan unggulan antara lain UMKM Berdikari, Kahayan (Kemudahan Layanan Pengujian), Pentol Isi Urat (Paman Pentol Pemberi Informasi pada Masyarakat), Laura Jempol serta penerapan budaya pelayanan prima melalui kebijakan pemberian reward dan punishment bagi pemberi dan penerima layanan publik (kompensasi).

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indeks RB antara lain penguatan pemahaman budaya organisasi melalui internalisasi budaya organisasi PIKKIR dan BerAKHLAK yang dilakukan oleh perwakilan *agent of change*, pelaksanaan inovasi oleh setiap Agent perubahan meliputi Liga Pikkir, Inner Area, Yel-yel RB, POKSI (pojok inspirasi, pojok inovasi, pojok diskusi, pojok konsultasi), Mini Studio Seberataan, Gerakan Happy Staff Create Happy Customer, Buletin Basewut, Pemantapan Area Pelayanan Publik (Tangga RB, Tembok RB) dan Senam Peregangan (Sera). Inovasi-inovasi oleh Agen Perubahan tersebut selalu dipantau dan dievaluasi serta dilakukan tindak lanjut perbaikan dan peningkatannya. Monitoring dan evaluasi inovasi pada setiap pokja RB dilakukan secara konsisten, sistematis dan terjadwal disertai tindak lanjut dan rencana tindak lanjut. Pemanfaatan media whatsapp group pegawai BBPOM di Palangka Raya untuk membagi pengetahuan dan informasi-informasi terkait pembangunan ZI. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk mental yang kuat supaya pegawai memahami dan menyadari pentingnya Reformasi Birokrasi.

Kegiatan selanjutnya adalah penyebarluasan dan pengenalan BBPOM di Palangka Raya kepada masyarakat termasuk informasi kegiatan/kinerja melalui berita aktual, infografis pada media sosial, media elektronik dan media cetak, pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan publik, penggunaan aplikasi dan pemanfaatan media online. Kampanye antigratifikasi dilakukan melalui banner yang diletakkan di tempat strategis dan mudah dibaca oleh seluruh pegawai dan peserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Selain itu inovasi Bajakah OK (Bersama Jaga Integritas Kalimantan Tengah) yang merupakan media sosialisasi antigratifikasi menggunakan video tarian dayak dan musik karungut khas Kalimantan Tengah menyerukan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada praktik gratifikasi yang ditemui. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas dan penanganan pegawai yang

terdapat potensi Conflict of Interest (COI). Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022 dan akan dilakukan secara konsisten dan berkala.

Melakukan perumusan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan sub standar dalam bentuk revisi surat keputusan pemberian reward-punishment pelayanan publik. Melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja yang dituangkan dalam narasi pada LKE ZI dan paparan Desk Tahap I.

Kegiatan yang telah disampaikan diatas diharapkan mampu mengakselerasi capaian pada tahun sebelumnya. Tahap yang telah dilalui adalah BBPOM di Palangka Raya adalah melengkapi LKE ZI dan data dukung secara lengkap dan tepat waktu, Konsistensi sangat diperlukan sehingga data dukung dapat tersaji dengan lengkap dan mutakhir yang menggambarkan reformasi birokrasi yang telah dijalankan dengan melibatkan seluruh unsur anggota organisasi dan lintas sektor terkait.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang dilakukan dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan perumusan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan sub standar	Melakukan revisi surat keputusan pemberian reward-punishment pelayanan publik Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian reward-punishment pelayanan publik	Konsistensi penerapan dan peningkatan kompetensi pelayanan publik pegawai	Tahun 2023
2	Melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja	Monitoring dan evaluasi dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja yang dituangkan dalam narasi pada LKE ZI dan paparan Desk Tahap II dan Desk Menpan	Melakukan analisis dampak seluruh inovasi terhadap perbaikan unit kerja	Tahun 2023
3	Membuat	Membuat	Melakukan	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	pernyataan maklumat standar pelayanan menggunakan Bahasa Dayak Kalimantan Tengah	publikasi maklumat pelayanan secara lebih luas kepada pegawai dan masyarakat	
4	Melaksanakan bimbingan teknis dan capacity building pembangunan zona integritas dan melakukan internalisasi BerAKHLAK kepada seluruh pegawai	Melaksanakan Bimtek dan CB internalisasi BerAKHLAK kepada seluruh pegawai	Penyegaran materi BerAKHLAK dan capacity building pembangunan zona integritas	Tahun 2023
		Monitoring dan evaluasi hasil survei pegawai terkait budaya organisasi	Melakukan analisis hasil survei dan melakukan tindak lanjut perbaikan dan peningkatan	Tahun 2023
4	Pelaksanaan program-program baru AoC sebagai katalisator pembangunan zona integritas secara menyeluruh	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program AoC dan analisis dampak		
		Melakukan sinergi kegiatan AoC bersamaan dengan momentum perayaan HUT Badan POM dan HUT RI	Melaksanakan peningkatan kompetensi AoC	Tahun 2023
5	Pembuatan prosedur pemilihan personil pada setiap area perubahan	Penyusunan prosedur pemilihan personil pada setiap area perubahan	Evaluasi Penyusunan prosedur pemilihan personil pada setiap area perubahan	Tahun 2023
6	Peningkatan indeks persepsi budaya organisasi	Melakukan analisis penyebab penurunan	Menggali penyebab kemungkinan resistensi pegawai terhadap perubahan	Tahun 2023
7	Peningkatan kualitas	Monitoring dan evaluasi yang	Monitoring dan evaluasi yang	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	keterbukaan informasi publik	memuat informasi permintaan informasi melalui PPID TW I	memuat informasi permintaan informasi melalui PPID secara berkala	
8	Peningkatan penerapan SPI		Melakukan publikasi SPI kepada seluruh pegawai	Tahun 2023
9	Analisis Dampak inovasi Penguatan Pengawasan	Melakukan analisis dampak terhadap inovasi Bajakah OK secara terukur TW I	Melakukan analisis dampak terhadap inovasi Bajakah OK secara terukur secara berkala	Tahun 2023

2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	NA

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dengan rentang sebagai berikut :

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 sd 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 sd 90	A	Memuaskan
> 70 sd 80	BB	Sangat Baik
> 60 sd 70	B	Baik
> 50 sd 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 sd 50	C	Kurang

Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2023 merupakan hasil penilaian Inspektorat Utama yang akan diterima pada triwulan IV. Upaya-upaya peningkatan Nilai AKIP telah mulai dilaksanakan pada triwulan I dan akan terus dilaksanakan sampai dengan triwulan IV dengan harapan hasil penilaian menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Palangka Raya akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal. Penilaian AKIP sejak tahun 2022 menggunakan mekanisme yang baru berdasar Permenpan 88 Tahun 2021 dan Keputusan Ka Badan POM No 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.

Berdasarkan peraturan tersebut, LKE sudah dikondisikan untuk dapat disampaikan melalui LHE, sehingga dapat dengan mudah menuangkan informasi dalam LKE ke dalam LHE. Pengisian LKE sudah disederhanakan dengan langsung melakukan proses penilaian pada subkomponen dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria, penilaian tidak lagi pada kriteria. Subjektivitas yang cukup tinggi dalam pengisian LKE, dibutuhkan kehandalan evaluator dalam menilai, khususnya dalam memberikan catatan penjelasan dan bukti dukung yang relevan pada setiap subkomponen yang dinilai LKE juga sudah mempertimbangkan gambaran minimum requirement yang dapat digunakan oleh evaluator dalam memprediksi atau menargetkan evaluasi ke dalam kelas apa dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	81.6	0	0	NA

Capaian indikator Nilai AKIP akan diterima pada Triwulan IV berdasarkan penilaian Inspektorat Utama. Pada triwulan I belum terdapat capaian Nilai AKIP

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam pelaksanaan SAKIP.

Berdasarkan evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022 yang telah mencapai target yang diharapkan, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan pencapaian namun juga masih perlu perbaikan serta komitmen terkait pelaksanaan SAKIP sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dalam rangka mengakomodir perubahan lingkungan strategis, Balai Besar POM di Palangkaraya menyesuaikan indikator dan target melalui revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Palangkaraya Tahun 2020-2024, namun terhadap perubahan target tersebut belum didukung basis data maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai.
- b. Balai Besar POM di Palangkaraya telah menyusun pemetaan sub kegiatan/komponen rinci terhadap indikator kinerja beserta anggarannya, namun belum diinput pada aplikasi Simetris, terdapat perbedaan target antara RAPK untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan PK serta dokumen RKT dan RAPK belum diupload pada subsite Balai Besar POM di Palangkaraya.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai Besar POM di Palangkaraya telah menetapkan IKU, PK dan RAPK. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan telah dilakukan pengukuran target kinerja setiap triwulan, namun SOP belum memuat penjelasan timeline dan mekanisme perbaikan data apabila terdapat kesalahan penyampaian data serta penanggungjawab yang jelas apabila terdapat kesalahan penyampaian data kinerja.
- b. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian punishment melalui pemotongan tunjangan kinerja, namun pengukuran kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3) Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palangkaraya telah dilakukan secara berkala, diformalkan dan dipublikasi tepat waktu melalui esr.menpan.go.id, website BPOM (pom.go.id) dan subsite (palangkaraya.pom.go.id). Namun Laporan Kinerja Tahunan masih menyajikan rencana aksi untuk peningkatan pencapaian indikator tahun 2021 yang sama dengan rencana aksi tahun 2020.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Monitoring rencana aksi telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan, serta sudah mencantumkan rincian anggaran untuk

memastikan bahwa program/kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan dapat dicapai. Namun evaluasi hasil monitoring rencana aksi belum dilakukan secara optimal yang mengakibatkan target indikator tidak tercapai.

- b. Masih terdapat ketidakselarasan antara tindaklanjut yang disajikan pada laporan evaluasi internal dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun pada periode pengukuran sebelumnya.
 - c. Balai Besar POM di Palangkaraya telah mengisi capaian kinerja pada aplikasi simetris, namun belum menuangkan hambatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom catatan di aplikasi simetris.
 - d. Belum seluruh rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Utama ditindaklanjuti.
- 5) Capaian Kinerja Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Palangkaraya, dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator capaian output dan 9 (sembilan) indikator capaian outcome yang belum tercapai sesuai target. Balai Besar POM di Palangkaraya belum memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan interim dalam rangka pemantauan kinerja dan upaya perbaikan serta belum mengoptimalkan data kinerja yang terukur dan andal untuk meningkatkan keandalan data.

Atas capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2022, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2023 direkomendasikan beberapa hal berikut:

1) Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun justifikasi perubahan target yang didukung dengan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.
- b. Mengisi pemetaan sub kegiatan/komponen rinci pada setiap indikator sasaran strategis beserta anggarannya pada aplikasi Simetris.
- c. Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja
- d. Memastikan dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan/ disosialisasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat/ stakeholder.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria timeline dan mekanisme perbaikan data apabila terdapat kesalahan penyampaian data dan penanggungjawab yang jelas apabila terdapat kesalahan penyampaian data kinerja.

- b. Meningkatkan komitmen Unit Kerja untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan hasil pengukuran kinerja dalam untuk dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 3) Pelaporan Kinerja
Memastikan rencana aksi yang disusun setiap periode sesuai dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja Unit.
- 4) Evaluasi Internal
 - a. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi dengan menindaklanjuti rencana aksi dalam upaya perbaikan sehingga target indikator kinerja dapat tercapai.
 - b. Menyelaraskan tindaklanjut yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang disusun pada periode pengukuran/triwulan sebelumnya.
 - c. Memastikan pengisian hambatan dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja.
- 5) Capaian Kinerja
 - a. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan kinerja.
 - b. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).
 - d. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Palangka Raya telah menyusun Renstra 2020-2024 yang memuat penjabaran tujuan terhadap sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator keberhasilan. Rumusan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil dan dipetakan melalui indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahunan dan rencana. Rencana aksi telah mencantumkan sub kegiatan/komponen secara rinci dan telah ditetapkan/diformalkan oleh Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya, indikator kinerja utama (IKU) telah diformalkan dan dipublikasikan melalui subsite pom.go.id dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, publikasi IKU juga

dilakukan pada media sosial, media cetak Kalteng Pos dan banner yang diletakkan di tempat strategis sehingga dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pegawai.

Pengumpulan data kinerja yang dituangkan dalam SOP serta SK Kepala Balai terkait Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, telah ditetapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon III dan ketua tim ke tingkat individu beserta penjelasan tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim dan tergambar dalam SOP. *Cascading indikator* kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu telah selaras. Reward and punishment diberlakukan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran dan capaian kinerja di tingkat Koordinator dan Kepala Bagian.

Laporan Kinerja Interim ini telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan dilaporkan tepat waktu sehingga proses monitoring dan evaluasi kinerja dapat berjalan sesuai jadwal yang telah dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai dasar pengawalan capaian.

Sebagai tindak lanjut hasil hasil evaluasi sebelumnya, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palangra Raya melakukan langkah sebagai berikut:

- **Aspek Perencanaan:** Melakukan usulan perubahan target dengan basis data memadai dan kertas kerja analisis dan perhitungan logis. Melakukan input sub kegiatan/komponen rinci pada setiap indikator sasaran strategis beserta anggarannya pada aplikasi Simetris. Melakukan revidi dan revisi Renstra dan pengusulan perubahan target dilengkapi data dukung memadai. Publikasi indikator kinerja secara internal dan eksternal melalui sosialisasi forum pegawai dan di media cetak.
- **Aspek Pengukuran:** Melakukan revisi mekanisme pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria timeline dan PIC setiap indikator kinerja yang mencantumkan prosedur mekanisme perbaikan data dan penanggungjawab yang jelas apabila terdapat kesalahan penyampaian data.
- **Aspek Pelaporan:** Melakukan revidi Laporan kinerja oleh Ketua Tim dan Kepala Balai untuk laporan kinerja Interim TW I 2023.
- **Aspek Evaluasi Internal:** Melakukan notulensi pembahasan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi pada Triwulan I 2023 yang menunjukkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi. Membuat format dokumen RATL berkesinambungan selama periode triwulan I sehingga tindak lanjut selaras dengan rencana aksi yang ditetapkan. Melakukan fasilitasi pengisian antara pada inovasi Monelaku terhadap kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut oleh masing-masing ketua tim sebagai bahan untuk memastikan pengisian pada aplikasi simetris sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. Melakukan monitoring dan evaluasi

Triwulan I termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi inspektorat utama untuk perbaikan SAKIP

- **Aspek Capaian:** Melakukan penetapan RATL dan strategi perbaikan capaian kinerja pada target indikator yang berpotensi tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan pada periode Triwulan I. Direncanakan pula akan dilaksanakan desk capaian kinerja pada setiap indikator kinerja, mendorong penciptaan inovasi pada setiap Kelompok Substansi/Bagian, melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk pencapaian kinerja serta melakukan peningkatan kompetensi dalam hal pemantauan dan pengendalian data kinerja.

Keterbatasan jumlah SDM secara umum di BBPOM di Palangka Raya ditindaklanjuti dengan menugaskan pegawai yang menjadi Tim SAKIP dan Monev Internal untuk mengikuti Bimtek SAKIP dan Monev Online yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Pelibatan seluruh pejabat fungsional jenjang madya dan muda sebagai ketua tim kerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM BBPOM di Palangka Raya dalam pelaksanaan SAKIP.

Rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama menjadi dasar penyusunan rencana aksi terutama pada komponen evaluasi kinerja. Tindak lanjut telah dimulai sejak awal tahun 2023.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan-kegiatan yang merupakan langkah tindak lanjut rekomendasi sebelumnya secara rutin dan berkala dilaksanakan dengan prinsip konsistensi dan peningkatan berkelanjutan. Pelaporan secara tepat waktu akan menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kualitas dalam kajian analisis capaian. Pembagian tugas penanggungjawab pembahasan setiap indikator kinerja pada penyusunan Lakip Interim triwulan akan dipastikan berjalan dengan baik dan perlu dukungan seluruh penanggungjawab kegiatan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang dilakukan dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyusun justifikasi	Melakukan usulan perubahan target		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	perubahan target yang didukung dengan basis data yang memadai, berdasar argumen dan perhitungan logis	dengan basis data memadai dan kertas kerja analisis dan perhitungan logis		
2	Mengisi pemetaan sub kegiatan/komponen rinci pada setiap indikator sasaran strategis beserta anggarannya pada aplikasi Simetris	Melakukan input pemetaan sub kegiatan/komponen rinci pada setiap indikator sasaran strategis beserta anggarannya pada aplikasi Simetris		
3	Melakukan kajian dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target pada dokumen perencanaan kinerja	Melakukan reviu dan revisi Renstra dan pengusulan perubahan target dilengkapi data dukung memadai		
4	Memastikan dokumen perencanaan telah dipublikasikan/disosialisasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat/stakeholder	Publikasi Indikator kinerja secara internal dan eksternal melalui sosialisasi forum pegawai dan di media cetak serta media sosial		
5	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria timeline dan mekanisme perbaikan data dan penanggungjawab yang jelas apabila terdapat kesalahan penyampaian data	Revisi mekanisme pengumpulan data kinerja dan PIC setiap indikator kinerja		
6	Meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan hasil pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar		Inovasi self assesment kegiatan rutin pengawasan Obat dan Makanan untuk memperluas jangkauan dalam	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		rangka efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia dan anggaran	
7	Memastikan rencana aksi sesuai dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja	Reviu laporan Kinerja oleh ketua Tim dan Kepala Balai TW I	Reviu laporan Kinerja oleh ketua Tim dan Kepala Balai secara berkala	Tahun 2023
8	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi dengan menindaklanjuti rencana aksi dalam upaya perbaikan sehingga target indikator kinerja dapat tercapai	Notulensi pembahasan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi TW I	Notulensi pembahasan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi secara berkala tiap triwulan	Tahun 2023
9	Menyelaraskan tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja sesuai dengan RATL yang disusun pada periode pengukuran/triwulan sebelumnya	Dokumen RATL berkesinambungan Triwulan I	Dokumen RATL berkesinambungan sampai dengan akhir TW IV	Tahun 2023
10	Memastikan pengisian hambatan dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan eriode pelaporan yang telah ditetapkan	Fasilitasi pengisian antara pada Inovasi Monelaku yang harus diinput oleh masing-masing penanggungjawab Triwulan I	Fasilitasi pengisian antara pada Inovasi Monelaku yang harus diinput oleh masing-masing penanggungjawab	Tahun 2023
11	Menindaklanjuti hasil evauasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi	Monev Triwulan I	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi SAKIP pada agenda evaluasi internal	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	SAKIP			
12	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan kinerja	Penetapan RATL dan strategi perbaikan capaian kinerja pada target indikator yang berpotensi tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan periode Triwulan I	Penetapan RATL dan strategi perbaikan capaian kinerja pada target indikator yang berpotensi tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan	Tahun 2023
13	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala		Desk capaian kinerja pada setiap indikator kinerja tiap bulan	Tahun 2023
14	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan/triwulan/tahunan		Mendorong penciptaan inovasi setiap Kelompok Substansi/bagian Koordinasi dan kolaborasi pencapaian kinerja	Tahun 2023
15	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya		Peningkatan kompetensi Pemantauan dan pengendalian data kinerja	Tahun 2023

9

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur indikator Indeks Profesionalitas ASN. Hasil penilaian indikator akan diterima pada Triwulan IV sehingga perhitungan pencapaian akan dilakukan pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

1. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	83	0	0	0	0	NA	NA

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survey sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

Nilai Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
0 – 60	Sangat Rendah

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya Tahun 2023 akan diterima pada Triwulan IV berdasarkan penilaian dari Biro SDm Badan POM. Target yang ditetapkan sebesar 83 yang merupakan jumlah indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya dibagi total jumlah pegawai BBPOM di Palangka Raya. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya dilaporkan pada triwulan IV. Meskipun demikian, upaya peningkatan capaian profesionalitas ASN dimulai dari triwulan I.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	83	0	0	NA

Hasil penilaian indikator profesionalitas ASN akan diterima pada Triwulan IV sehingga perhitungan pencapaian akan dilakukan pada Triwulan IV

b. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tuntutan peran aktif dan melayani bagi seluruh ASN tidak terkecuali ASN Badan POM dan khususnya BBPOM di Palangka Raya telah berhasil merubah paradigma ASN menjadi lebih fungsional berbasis kompetensi baik teknis maupun manajerial sesuai dengan budaya organisasi. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu parameter keberhasilan pembangunan SDM pada tingkat unit kerja yang menjadi aset penting dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator-indikator kinerja lainnya. Komponen Kualifikasi pendidikan menjadi komponen penilaian terendah dibanding komponen penilaian lainnya dimana masih terdapat 9 (Sembilan) orang dengan latar belakang SLTA (Kejuruan dan Umum). Lima orang diantaranya telah melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan secara mandiri namun belum memperoleh pengakuan resmi, sedangkan 4 orang lainnya telah berusia diatas 50 tahun belum dilakukan peningkatan kualifikasi pendidikan. Komponen penilaian lainnya yaitu kompetensi, kinerja dan disiplin telah memperoleh hasil optimal dan terus dipertahankan.

Terhadap permasalahan yang ada yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan, BBPOM di Palangka Raya secara berkesinambungan menugaskan pegawai untuk melaksanakan tugas belajar dan berupaya untuk mendapatkan solusi maupun kebijakan Badan POM terkait pengakuan ijazah pendidikan tinggi yang telah diperoleh pegawai. Peningkatan kualifikasi pendidikan juga akan diprioritaskan kepada pegawai yang potensial sebagai pemimpin dan berada pada kuadran talentpool.

c. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Motivasi pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi berasal dari kebutuhan atas pemenuhan standar kompetensi dan target yang telah ditetapkan pada setiap pegawai yang tercantum pada SKP sesuai rencana kinerja yaitu pengembangan kompetensi pegawai

diselesaikan tepat waktu dengan kuantitas persentase pengembangan kompetensi pegawai yang diselesaikan 100% dan ketepatan waktu penyelesaian 1 tahun.

Tuntutan penilaian Indeks RB dan optimalisasi pengelolaan SDM mendorong untuk dilakukannya pengembangan kompetensi yang lebih variatif. BBPOM di Ralangka Raya selama triwulan I tahun 2023 telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis (manajerial/softskill) diantaranya peningkatan kapasitas organisasi, pelatihan terkait laboratorium, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa serta ketatausahaan.

Peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai BBPOM di Palangka Raya telah dilakukan melalui tugas belajar. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sampai dengan triwulan I Tahun 2023 berjumlah 2 orang, 1 orang diantaranya telah aktif kembali sejak Maret 2023. Beberapa pegawai melakukan peningkatan kompetensi meningkatkan kualifikasi pendidikan sebelum mendapatkan ijin belajar resmi dari Badan POM (PPSDM) sehingga meskipun telah memiliki ijazah Sarjana namun belum dapat diakui peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai tersebut.

Pada Tahun 2022 Penilaian Kinerja telah dilakukan melalui aplikasi SIMAKIN (Sistem Manajemen Kinerja) yaitu pengelolaan kinerja atas komitmen cascading indikator kinerja hingga level individu dan Pada akhir triwulan I Tahun 2023 ini sedang berproses untuk penilaian SKP TW I.

Kehadiran apel nasional yang dilakukan setiap hari senin dan apel disiplin pada hari peringatan yang telah ditetapkan dilakukan dengan tertib oleh pegawai dan pelaporan dilakukan tepat waktu sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman disiplin yang dapat menurunkan nilai indeks profesionalitas ASN.

Penegakan disiplin dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin seluruh pegawai. Pada triwulan I Tahun 2023 hukuman disiplin ringan telah dijatuhkan kepada 1 (satu) orang CPNS atas ketidakdisiplinan yang dilakukan sedangkan hukuman sedang dan berat belum pernah dijatuhkan kepada pegawai BBPOM di Palangka Raya. Meskipun penilaian kedisiplinan tidak 100% akibat penjatuhan hukuman disiplin namun menunjukkan bahwa BBPOM di Palangka Raya konsisten dalam penegakan aturan disiplin.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Selesai *	Belum **		
			Rencana Aksi	Time Line	
1.	Peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi pejabat	Sudah dilakukan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui tugas	Melakukan usulan Pegawai	Tahun 2023	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
	struktural dan fungsional serta mendorong pegawai untuk berkinerja lebih baik lagi dengan output lebih yang secara nyata diberikan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan dirasakan manfaatnya secara langsung baik terhadap individu pegawai, maupun terhadap capaian indikator yang didukungnya.	belajar, peningkatan kompetensi pegawai melalui pengembangan kompetensi pegawai sesuai hasil GAP pemetaan kompetensi	Tugas Belajar	
2.	Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui inovasi pengelolaan manajemen SDM yang dapat mendukung pembangunan Zona Integritas BBPOM di Palangka Raya.	Sudah dilakukan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui inovasi pengelolaan manajemen SDM yang dapat mendukung pembangunan Zona Integritas BBPOM di Palangka Raya	Monev pelaksanaan inovasi	Tahun 2023
3	Pelaksanaan Reward dan Punishment Pegawai berdasar mekanisme yang telah ditetapkan	Pelaksanaan Reward Punishment TW I	Pelaksanaan Reward Punishment secara berkala	Tahun 2023

Sasaran Kegiatan

10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut,

diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar dengan kriteria Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	Triwulan I		1 tahun	Triwulan I	1 tahun	Triwulan I
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	0	0	0	0	NA	NA
2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2,5	2,5	2,6	104,00	104,00	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran					119.20	112.53		

Indikator Kinerja 27

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2021 tentang Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BPOM yang berlaku untuk tahun 2021-2024. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Batasan terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium adalah 70% dengan komposisi penilaian yang dilakukan sebagai berikut :

1) Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang *inlier*, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara

menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2) Penilaian Standar Kompetensi

Pada tahun 2022, penilaian kompetensi dilakukan terhadap seluruh personil laboratorium termasuk Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Substansi.

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%).
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

Pada penilaian standar kompetensi, sejak tahun 2022 kompetensi tidak hanya berdasarkan kompetensi teknis secara umum sesuai dengan jenjang jabatan, namun terkait juga dengan kompetensi terhadap parameter uji spesifik sesuai dengan penugasan balai berdasarkan regionalisasi laboratorium.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan struktur organisasi di laboratorium dimana jabatan koordinator dan subkoordinator dihilangkan dan adanya rotasi beberapa personil pengujian. Pada struktur organisasi yang baru, laboratorium dikepalai oleh Manager Teknis Laboratorium yang mana memiliki kompetensi yang lengkap baik di bidang kimia maupun mikrobiologi.

3) Penilaian Standar Peralatan

- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.

- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlahkan persentase seluruh peralatan laboratorium dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Pada tahun 2023 tidak ada pengadaan peralatan seperti instrumen pengujian namun terdapat pengadaan untuk alat pendukung seperti *thermohygrometer* digital untuk memenuhi kebutuhan pengecekan suhu dan kelembaban ruangan di laboratorium dan lemari pendingin serta juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam mengurangi penggunaan termometer raksa yang jika pecah, limbahnya berbahaya bagi lingkungan.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-rata, dan menjadi nilai realisasi indikator.

Metode penilaian terhadap pemenuhan SKL dilakukan secara *selfassessment* dengan melakukan pengisian pada link bit.ly yang telah disediakan oleh PPPOMN yang bertugas sebagai evaluator pencapaian SKL. Pengisian dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah disampaikan dengan mengunggah data dukung sehingga memudahkan bagi Tim Evaluator untuk melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan.

Pengisian data terhadap pemenuhan SKL dilakukan setiap akhir triwulan sedangkan penarikan data dilakukan pada akhir triwulan IV.

a. Perbandingan realisasi triwulan terhadap target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	NA

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai assessment yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional.

Hasil perhitungan sementara terhadap pemenuhan SKL pada triwulan I yaitu sebesar 85,91 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	0	0	N/A

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil penilaian sementara terhadap pemenuhan SKL pada triwulan I tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 85,91 % dengan komposisi antara lain realisasi Penilaian standar ruang lingkup sebesar 79,00 %, realisasi penilaian standar kompetensi sebesar 94,45 % dan realisasi penilaian standar peralatan sebesar 84,30%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 terdapat peningkatan terhadap realisasi pemenuhan SKL pada triwulan 1 2023. Adanya rotasi pegawai, pelaksanaan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi serta rekalkulasi terhadap jumlah alat laboratorium sangat mempengaruhi penilaian SKL.

Peningkatan terhadap realisasi penilaian sementara pada triwulan I tahun 2023 didukung oleh terlaksananya *roadmap* peningkatan SKL baik itu ruang lingkup, kompetensi, dan peralatan yang telah disusun pada awal tahun. *Roadmap* disusun berdasarkan analisa kebutuhan dengan melihat pedoman sampling tahun berjalan khususnya untuk kebutuhan parameter uji spesifik berdasarkan sistem regionalisasi laboratorium yang mana membutuhkan kompetensi, pemenuhan peralatan khusus serta peningkatan kemampuan uji terhadap standar ruang lingkup yang telah di tetapkan.

Adapun kendala dalam pencapaian SKL antara lain :

1. Terdapat personil yang baru bergabung dengan laboratorium pengujian yang memiliki gap kompetensi yang cukup jauh, sehingga membutuhkan langkah-langkah pemenuhan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi laboratorium.
2. Terdapat beberapa peralatan yang membutuhkan perawatan maupun perbaikan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya yaitu :

- Evaluasi terhadap *roadmap* upaya pemenuhan standar Kemampuan Laboratorium masing-masing komoditi mengacu terhadap standar kompetensi laboratorium yang ditetapkan.
- Meningkatkan koordinasi dengan kelompok substansi pemeriksaan terkait perencanaan sampling agar dapat menyediakan sampel-sampel khusus yang ditujukan untuk peningkatan standar ruang lingkup.
- Menyusun perencanaan kalibrasi/verifikasi dan perbaikan/perawatan alat serta pengadaan suku cadang untuk menjaga performa alat laboratorium sehingga *roadmap* pemenuhan ruang lingkup dan kompetensi dapat berjalan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga indikator Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang mengalami rotasi yaitu dengan kegiatan *on the job training* sesuai dengan komoditi yang di tempati.
- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis terkait pengujian parameter uji spesifik pada sampel makanan yaitu identifikasi DNA Porcine pada Gelatin menggunakan LCMSMS dan Deteksi DNA Porcine pada produk pangan DNA rendah dengan RT-PCR
- Terlaksananya pelatihan yang berkaitan dengan Mutu Laboratorium antara lain Bimbingan Teknis Internal Awareness Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan Training of Trainer (TOT) Evaluasi Sertifikat Kalibrasi dengan peserta pelatihan seluruh personel pengujian.
- Adanya perubahan terhadap baseline standar ruang lingkup pada pengujian mikrobiologi menyebabkan terjadinya peningkatan % penilaian standar ruang lingkup mikrobiologi.
- Terlaksananya kegiatan pengujian pada 5 sampel obat sesuai dengan roadmap yang telah disusun antara lain pada sediaan Domperidon suspensi, Hyoscine butyl bromide injeksi, Lanzoprazole injeksi, Methylergometrine Maleate Injeksi, Sulfasalazine tablet

Sedangkan kegiatan yang belum efektif dilaksanakan sehingga menunjang kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

- Belum terlaksananya beberapa kegiatan pengembangan kompetensi seperti bimbingan teknis internal, pengembangan kemampuan dalam rangka pemenuhan standar laboratorium, TOT dan deseminasi hasil pelatihan kepada seluruh personel pengujian sehingga peningkatan kompetensi hanya pada meningkat pada beberapa personel.

Pengadaan suku cadang yang diperlukan dalam proses uji sekaligus untuk menjaga performa alat laboratorium, baru dapat terlaksana pada akhir triwulan I.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan proses pengadaan alat laboratorium serta pembelian reagen dan media untuk menunjang peningkatan pemenuhan standar alat laboratorium dan pemenuhan Ruang lingkup dan kompetensi personil.	Melakukan monitoring evaluasi terhadap pemenuhan alat laboratorium	-	-
		Melakukan monitoring evaluasi terhadap kebutuhan reagensia dan media untuk pemenuhan standar ruang lingkup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-
		Melakukan monitoring evaluasi terhadap kebutuhan reagensia dan media untuk pemenuhan standar ruang lingkup Makanan	-	-
		Melakukan monitoring evaluasi terhadap pemenuhan suku cadang alat laboratorium	-	-
		Kegiatan	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		pelatihan Internal komoditi Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional dan Pangan		
2	Melakukan koordinasi dengan balai terdekat maupun instansi dalam hal peminjaman reagensia untuk mengantisipasi keterlambatan pengadaan reagensia yang disebabkan pemesanan yang inden disebabkan faktor produksi pabrik maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikendalikan.	Monitoring dan evaluasi peminjaman reagen karena terkait data BMN	-	-
		Membuat PO pemesanan reagen sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia	-	-
			-	-
3	Melakukan revisi anggaran dengan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi berupa keikutsetaan dalam kegiatan bimbingan teknis eksternal dengan berkoordinasi dengan balai terdekat	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimtek	-	-
		Kegiatan pelatihan Internal komoditi Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional dan Pangan	-	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
4	Melakukan evaluasi terhadap mitigasi yang dilakukan terhadap faktor-faktor resiko yang dapat menghambat pemenuhan standar GLP untuk mengetahui efektifitas dari mitigasi yang telah dilakukan.	Melakukan evaluasi manajemen risiko	-	-

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
	1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2,5	2,5	2,6	104,00	104,00	Memenuhi Ekspektasi	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal diperoleh nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

Indeks pengelolaan data dan informasi	Kategori
2.26-3	Optimal
1,51-2.25	Cukup
0.76-1.5	Kurang Optimal
0-0.75	Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bisnis proses pada masing-masing unit kerja menunjang dalam pencapaian output. Sistem informasi yang dimanfaatkan terdiri dari pemanfaatan *email*, pemanfaatan *sharing folder*, pemanfaatan *dashboard* BOC, dan pemberitaan kegiatan melalui berita aktual pada subsite balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian maupun individu.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2,5	2,6	104,00	Memenuhi Ekspektasi

Pada triwulan I tahun 2023 didapat realisasi indikator kinerja pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal yaitu sebesar 2,6 dengan Capaian 104,00 % dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”. Hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran serta pemanfaatan sistem informasi telah dilakukan secara optimal.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kendala pelaksanaan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator pada triwulan I tahun 2023, telah melebihi target 2,5 yang telah ditetapkan dengan kriteria optimal. Hal yang mempengaruhi capaian indikator antara lain nilai yang maksimal pada indeks pemanfaatan sistem informasi yaitu pemanfaatan *email*, *sharing folder*, *dashboard BOC* dan Berita Aktual serta nilai maksimal pada indeks pemutakhiran yaitu pada aplikasi SPIMKer sedangkan nilai indeks yang dicapai belum optimal yaitu pada pemutakhiran data SIPT.

Breakdown terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi dapat dilihat pada data berikut :

	Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC		Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM			
	Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKer	Pemanfaatan email	Pemanfaatan sharing folder	Dashboard BCC	Berita aktual
Nilai Indeks maksimal	3	3	3	3	3	3
Realisasi	2	3	3	3	3	3

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai maksimal pada indeks pengelolaan data dan informasi, antara lain :

1. Pemutakhiran SIPT

Pada triwulan I 2023 perhitungan indeks pemutakhiran data melalui SIPT dihitung berdasarkan % pemutakhiran data pemeriksaan sarana dan sampling, namun belum termasuk pelaporan data hasil uji dari laboratorium pengujian. Pemutakhiran data pemeriksaan sarana pada triwulan I diperoleh persentase rata-rata sebesar 79,50 % sedangkan rata-rata data sampling sebesar 83,15% dengan rata-rata kedua kegiatan tersebut sebesar 81,34 %.

Masalah yang dihadapi dalam melakukan input data sarana dan sampling antara lain adanya kendala pada saat melakukan input data berupa foto penandaan sampel yang tidak dapat tersimpan setelah diupload pada SIPT, hal ini menyebabkan seluruh sampel tidak dapat diproses ke tahap berikutnya. Kendala input pada SIPT telah dilaporkan melalui Help Pusdatin serta berkoordinasi dengan personel penanggungjawab data SIPT di Pusdatin. Pada kegiatan pemeriksaan sarana, telah dilakukan penginputan data sarana secara konsisten namun, diperlukan waktu verifikasi oleh supervisor sehingga terdapat beberapa data yang di input belum dilaporkan ke pusat.

Beberapa faktor yang mendukung nilai maksimal pada pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi antara lain :

1. Pemutakhiran SPIMKer merupakan pemutakhiran informasi kasus keracunan/kejadian luar biasa keamanan pangan yang terjadi di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya, bekerjasama dengan rumah sakit untuk mengisi data kasus keracunan dan UPT BPOM melakukan verifikasi data tersebut. Nilai pemutakhiran SPIMKer BBPOM di Palangka Raya yang dientry dan terverifikasi triwulan I Tahun 2023 sebesar 100% dengan nilai indeks 3 masuk kategori sangat dimanfaatkan, Maksimalnya pencapaian pada triwulan I 2023 terhadap indeks pemutakhiran data SPIMKer disebabkan control pengawasan yang baik terhadap entry data kasus keracunan,serta koordinasi yang dilakukan secara intensif terhadap rumah sakit yang ada di wilayah Kalimantan tengah sehingga data kasus keracunan dapat di mutakhirkan tepat waktu.
2. Pemanfaatan email
Pemanfaatan email *corporate* individu maupun unit mendukung kinerja organisasi. Dari total akun individu dan unit sebanyak 61 di bulan maret total akun yang aktif dan login sebanyak 61 akun atau sebesar 100%. Total akun di bulan Februari dan Maret 2023 total akun yang aktif dan login sebanyak 61 akun atau sebesar 100%. Hal ini memberikan nilai pemanfaatan email BBPOM di Palangka Raya 3 yang artinya sangat dimanfaatkan.
3. Pemanfaatan sharing folder
Sharing folder dimanfaatkan dalam melakukan pengawasan penandaan. Pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan akses ke sharing folder sebanyak 384 kali sehingga rata-rata 128 memberikan nilai 3 yang artinya sangat dimanfaatkan.
4. Pemanfaatan BOC
Dashboard BOC ditujukan untuk melakukan monitoring data SIPT dan SPIMKer yang telah dimutakhirkan serta pemanfaatan penggunaan *email, sharing folder* dan berita aktual yang telah diwartakan. Pada triwulan I tahun 2023, pemanfaatan dashboard BCC mendapat nilai 3 atau sangat dimanfaatkan.
5. Pemanfaatan berita aktual
Berita aktual merupakan pemberitaan kegiatan yang diunggah pada subsite BPOM. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan *stakeholder* eksternal seperti KIE, *talkshow*, bimtek, workshop dan lain sebagainya. Pada triwulan I tahun 2023 berita aktual yang telah diupload sebanyak 41 berita dengan rata-rata 13 berita/bulan, dan jumlah viewer 1762 dengan rata-rata perhitungan rata-rata pengunjung 42,97/berita mendapat indeks 3 atau sangat dimanfaatkan.

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan yang menunjang keberhasilan peningkatan nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal antara lain :

- Penetapan tim publikasi media dengan perwakilan anggota dari seluruh Kelompok Substansi dan Bagian Tata Usaha.
- Penetapan target penayangan berita aktual oleh setiap Kelompok Substansi dan Bagian Tata Usaha
- Pengiriman dokumen antar unit menggunakan *email corporate*
- Pengiriman informasi antar pegawai yang dilaksanakan setiap hari menggunakan *email corporate*
- Pengumuman yang disampaikan dalam kegiatan apel pagi ataupun pada saat apel alin darling untuk mengingatkan menggunakan *email corporate*, *sharing folder*, pemutakhiran data SIPT dan SPIMKer serta informasi berita aktual yang diunggah pada subsite melalui kanal *whatsapp* grup Balai Besar POM di Palangka Raya.
- Koordinasi aktif dengan tim penanggungjawab masing-masing aplikasi pada Pusat Data dan Informasi Badan POM.
- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan *email corporate* individu dan unit, penayangan berita aktual kegiatan yang dilaksanakan masing-masing kelompok substansi dan bagian secara berkala.
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam ketepatan pelaporan kasus keracunan di wilayah Kalimantan Tengah pada aplikasi SPIMKer.

Dalam upaya peningkatan pemutakhiran informasi khusus nya pemutakhiran data pada SIPT perlu dilakukan penekanan terhadap monitoring dan evaluasi data yang telah dimutakhirkan serta kendala dan rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara berkala.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
1.	Penetapan cascading indikator kinerja sampai dengan level individu organisasi disesuaikan dengan fungsi kelompok substansi/bagian. Dengan penetapan cascading indikator kinerja sampai level individu maka dilakukan pengukuran kinerja individu dalam	- Sudah dilakukan penetapan cascading indikator kinerja sampai dengan level individu organisasi disesuaikan dengan fungsi kelompok substansi/bagian - Sudah dilakukan pengukuran kinerja individu setiap triwulan - Sudah dilakukan	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Time Line
	mendukung capaian indikator ini setiap triwulan dan setiap bulan pada Koordinator Kelompok Substansi dalam kegiatan evaluasi internal.	evaluasi internal pada setiap kelompok substansi tiap bulan.		
2.	Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan penggunaan email corporate individu dan unit.	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan email corporate individu dan unit per bulan		
3.	Telah dibentuknya tim media yang melibatkan seluruh bidang/bagian untuk mempublikasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan	Sudah dibentuk tim media yang melibatkan seluruh bidang/bagian		

11

Sasaran Kegiatan

Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 134.72% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	92	50	67.36	73.22	134.72	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran					73.22	134.72	Tidak Memenuhi	Tidak Dapat

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian terhadap target		Kriteria capaian terhadap target	
		1 tahun	TW I		1 tahun	TW I	1 tahun	TW I
							Ekspektasi	Disimpulkan
	Nilai Pencapaian Sasaran penyesuaian				73.22	134.72		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian negara/Lembaga. IKPA dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Fokus formulasi penilaian IKPA terdapat pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dengan 8 indikator kinerja yaitu revisi DIPA (10%), deviasi halaman III DIPA (10%), data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%), dispensasi SPM (5%), penyerapan anggaran (20%) dan capaian output (25%).

f. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian terhadap target TW I	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	50	67.36	134.72	Tidak Dapat Disimpulkan

*Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diperoleh dengan rumus :
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
EKA = Evaluasi Kinerja Anggaran*

IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Realisasi indikator Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya pada triwulan I tahun 2023 adalah 67.36. Diperoleh dari nilai IKPA 97.61 dan nilai EKA sebesar 47.19. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya berhasil mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 134.72% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

g. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi TW I	Capaian terhadap target tahun 2023	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	92	67.36	73.22	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya pada triwulan I tahun 2023 adalah 67.360. Diperoleh dari nilai IKPA 97.61 dan nilai EKA sebesar 47.19. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya belum berhasil memenuhi target tahun 2023 yaitu 73.22% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

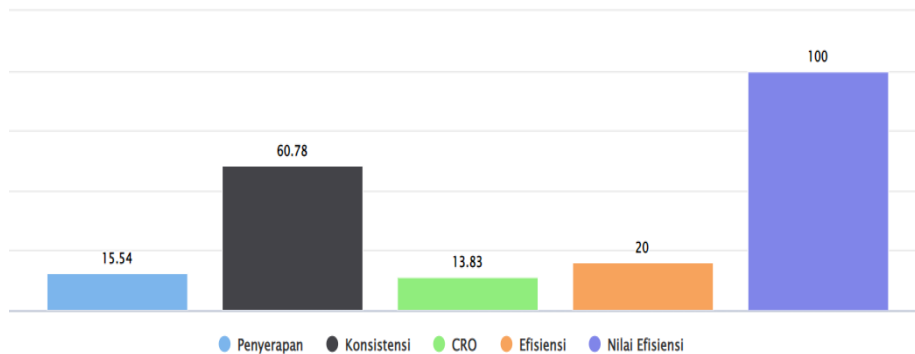
h. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 134.72% dari target 50 yang telah ditetapkan pada triwulan I. Penilaian IKPA merupakan nilai hasil pembobotan pada indikator pendukungnya yang nilai akhirnya linier sepanjang tahun sedangkan penilaian EKA meski berdasarkan pembobotan, penyerapan anggaran setiap bulan memberikan pengaruh pada nilai EKA yang lebih progresif. Pada tahun 2023 terdapat perubahan cara perolehan nilai EKA, yang semula pada tahun 2022 capaian output diinput oleh satker, pada tahun 2023 seluruh penilaian EKA terintegrasi dengan aplikasi Sakti yang digunakan untuk mengolah penilaian IKPA. Nilai EKA pada triwulan I sebesar 47.19 didukung oleh penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran (Rincian Output), dan efisiensi.

Nilai SMART

47.19

Sangat Kurang



Berdasarkan rumus perhitungannya, dilakukan pembobotan terhadap 4 indikator penilaian yaitu capaian rincian output (43.5%), efisiensi (28.6%). Konsistensi (18.2%), dan penyerapan (9.7%) dengan masing-masing nilai sebagai berikut:

- Indikator capaian rincian output dengan nilai 13.83. Apabila nilai indikator ini dikonversikan pada bobot penilaian EKA akan diperoleh nilai 6.02, yang berasal dari 20 kegiatan, dengan realisasi capaian output 2.67% sampai dengan 100% dengan rata-rata capaian output 39.57%.
- Indikator efisiensi dengan nilai 100. Apabila nilai indikator ini dikonversikan pada bobot penilaian EKA akan diperoleh nilai 28.60 dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 28.6. Nilai efisiensi diperoleh dari 2 rincian output belanja modal yang capaian outputnya telah terealisasi 100% dengan rata-rata realisasi anggarannya sebesar 92.73%.
- Indikator konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan nilai 60.78 atau setara dengan 11.06 apabila dikonversikan pada bobot penilaian EKA dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 18.20. Pada triwulan I BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan atau halaman III DIPA. Ketidakberhasilan ini dipengaruhi oleh perencanaan yang dibuat masih belum menggambarkan kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan serta dokumen perencanaan yang belum digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan,
- Indikator penyerapan anggaran dengan nilai 15.54 atau setara dengan 1.51 apabila dikonversikan pada bobot penilaian EKA, dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 9.70. Nilai realisasi anggaran ini terintegrasi dengan nilai realisasi anggaran pada OMSPAN berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN sampai dengan ditariknya data dari Aplikasi SMART DJA.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023 sebesar 47.19 berada dalam kategori sangat kurang dalam pengelolaan anggaran dengan rincian adalah sebagai berikut :

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Kinerja Indikator (NKI)
Penyerapan anggaran	15.54	9.70%	1.51
Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	60.78	18.20%	11.06
Capaian Rincian Output	13.83	43.50%	6.02
Efisiensi	100	28.60%	28.60
Total Nilai Kinerja Indikator (NKI) EKA		100.0%	47.19

Nilai IKPA pada triwulan I tahun 2023 diperoleh 97.61. Dari reformulasi IKPA yang berubah menjadi 8 indikator kinerja penilaian. Dari 3 aspek penilaian kualitas dengan 8 indikator kinerja sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga Negara, 6 indikator memperoleh nilai akhir 100 yaitu Revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Satu indikator dengan bobot tertinggi 25% yaitu capaian output memberikan nilai 97.08, indikator dengan bobot tertinggi kedua 20% yaitu penyerapan anggaran memberikan nilai 100. Tiga indikator lain dengan bobot 10% dengan nilai kurang dari 100 yaitu deviasi halaman III DIPA (83.41). Rincian penilaian IKPA BBPOM di Palangka Raya triwulan I 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	043	063	432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	83.41	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.08	97.61	100%	97.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.34	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.27			
					Nilai Aspek	91.71					100.00					

Indikator dengan nilai kurang dari 100 yaitu Capaian output dengan bobot tertinggi yaitu 25% dengan nilai 24.27 (97.08%) dihitung berdasarkan antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Pada triwulan I, target indikator capaian output ditetapkan sebesar 16.1%, 20 rincian output yang terkonfirmasi mendapatkan nilai 100 dengan total nilai kinerja RO sebesar 1.916,58. Dari 20 rincian output yang dilaporkan 19 rincian output mendapat nilai 100, 1 rincian output mendapat nilai 16.58, pada rincian output sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT.

Indikator dengan nilai kurang dari 100 kedua dengan bobot 10% yaitu Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 8.34 (83.41%) berdasarkan rata-rata deviasi kumulatif sampai dengan bulan Maret sebesar 16.59%. Deviasi terbesar terdapat pada bulan Februari sebesar 117.37%

disebabkan pembayaran belanja modal di bulan Februari, dimana di bulan tersebut tidak direncanakan pembayaran belanja modal.

Atas capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023, untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan awareness semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan (baik total maupun per jenis belanja) dan target pencapaian output, antara lain:
 - Menyusun *Plan of Action* (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD
 - Melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulanan berakhir.
 - Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN
 - Apabila RPD lebih besar daripada realisasi anggaran, maka agar mengakselerasi belanja dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa, dan menyelesaikan pembayaran tagihan yang telah selesai dikerjakan;
 - Apabila RPD lebih kecil daripada realisasi anggaran, maka agar memperhitungkan batas deviasi Halaman III DIPA sehingga tidak melebihi dari 5% antara rencana dengan realisasinya.
3. Meningkatkan percepatan realisasi anggaran, antara lain:
 - Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA yang ditetapkan. Segera melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dengan mengacu peraturan dan penilaian kualitas revisi anggaran.
 - Mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran
 - Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar
 - Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran

5. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.
6. Terus memantau perkembangan capaian EKA pada SMART DJA dan capaian IKPA pada OMSPAN, mengidentifikasi kinerja yang masih rendah, memperhatikan detail transaksi kinerja dan seoptimal mungkin menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya pada triwulan I tahun 2023 dengan capaian sebesar 134.72% ditunjang beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kendala pencapaian kinerja sehingga belum berhasil memenuhi ekspektasi. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun, dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya oleh penanggungjawab kegiatan namun beberapa strategi pencapaian yang telah disusun belum berhasil memperbaiki pencapaian target kinerja.
- Senantiasa memantau perkembangan capaian EKA pada SMART DJA dan capaian IKPA pada OMSPAN secara berkala.
- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan dilakukan setiap bulan;
- Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA dengan target penyerapan anggaran (baik total maupun per jenis belanja) antara melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulanan berakhir, koordinasi yang sinergis antara KPA, PPK, PPSPM, bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN
- Mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran, mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu (dari tim pengelola keuangan ke KPPN dan sebagian dari pengelola kegiatan kelompok substansi ke tim pengelola keuangan), memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar, mensosialisasikan peningkatan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

Sedangkan kegiatan yang belum efektif dilaksanakan dan menjadi kendala belum berhasilnya pencapaian kinerja antara lain:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran yang masih kurang, dalam penyelarasan RPD Halaman III DIPA dan PoA dengan target penyerapan anggaran triwulanan (baik total

maupun per jenis belanja) masih terdapat ketidakselarasan/ketidaksesuaian, antara lain:

- ✓ Plan of Action (PoA) triwulanan belum disusun dengan cermat oleh pelaksana kegiatan
- ✓ Masih rendahnya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan terhadap PoA triwulanan yang telah disusun
- ✓ Norma waktu pertanggungjawaban keuangan yang belum diperhatikan
- Dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tagihan oleh kelompok substansi, masih terdapat pengajuan dokumen pembayaran yang tidak benar dan tidak tepat waktu dan masih terdapat ketidaksiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
- Untuk dapat mengevaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, belum semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran memiliki tingkat awareness yang sama untuk bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasinya.

j. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan awareness semua pihak dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi	Sosialisasi/deseminasia/membagikan materi peraturan/kebijakan terkait pengelolaan anggaran		
		Rapat evaluasi internal secara berkala setiap bulan		
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala		
2	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan (baik total maupun per jenis	Menyusun Plan of Action (PoA) tahunan	Menyusun kalender kegiatan dan anggaran triwulanan diturunkan menjadi bulanan dari masing-masing Ketua Tim Kerja	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	belanja) dan target pencapaian output	Melakukan pemutakhiran RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir		
3	Meningkatkan percepatan realisasi anggaran	Mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan	Meningkatkan komitmen pelaksanaan kalender kegiatan yang telah disusun	Tahun 2023
			Menyerahkan pertanggungjawaban keuangan dari kelompok substansi dengan memperhatikan norma waktu	Tahun 2023
			Monev pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan (kalender kegiatan) yang telah disusun secara berkala	Tahun 2023
4	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan	Tidak menunda proses pembayaran	Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran/ pertanggungjawaban dengan memperhatikan norma waktu	Tahun 2023
		Memastikan data dalam dokumen pembayaran/ tagihan/ pertanggungjawaban telah benar		
5	Meningkatkan capaian	Rapat evaluasi	Mengawal	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya	internal secara berkala setiap bulan	pelaksanaan strategi pencapaian target kinerja yang belum tercapai	
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala		
		Mengidentifikasi target yang belum tercapai		
		Menyiapkan strategi pencapaian target kinerja yang belum tercapai		
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pencapaian target kinerja yang belum tercapai		
		Penyusunan perencanaan kegiatan yang mendukung pencapaian output dengan memperhitungkan efisiensi penggunaan anggaran		



BAB 4

Penutup

- *Kesimpulan*
- *Saran / Rencana Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan periode Rencana Strategis 2020–2024. Pada triwulan I tahun 2023 Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 105.74%. Dari 11 sasaran kegiatan tersebut, 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur pada triwulan I, 4 sasaran kegiatan lainnya dilakukan pada akhir tahun 2023. Pengukuran terhadap tujuh sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2023 terdapat 5 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil memenuhi ekspektasi dan tidak dapat disimpulkan dan 2 sasaran kegiatan dengan hasil belum memenuhi ekspektasi sebagai berikut :

8. BBPOM di Palangka Raya **berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **efektif** mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 104.65% yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.
9. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS sebesar 93.44% yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja.
10. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 97.22% yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
11. BBPOM di Palangka Raya **belum berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **kurang efektif** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS sebesar 91.65% yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
12. BBPOM di Palangka Raya **berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **efektif** dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 120% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.
13. BBPOM di Palangka Raya **berhasil memenuhi ekspektasi** dengan **efektif** dalam memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 104% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

14. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi dengan kurang efektif dalam pengelolaan keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 120% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 20 (dua puluh) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian antara 31.95% sampai dengan 566.67%. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan capaian indikator kinerja terendah pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut BBPOM di Palangka Raya memperoleh alokasi anggaran pada TA 2023 sebesar Rp 21.461.208.000,-. Pada tanggal 14 Desember 2022 terdapat pengurangan pagu yang dapat digunakan dalam bentuk *Automatic Adjustment* tahap I sebesar Rp 1.001.921.000,- pada belanja pegawai. Realisasi anggaran terhadap pagu aktif yang dikelola sebesar 17.24%. BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 20 kegiatan utama dengan hasil 8 kegiatan utama efisien dan 12 kegiatan utama tidak efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara -0.24 hingga 9.0 dengan Tingkat Efisiensi total sebesar 0.32 (efisien). Meskipun demikian, dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan perbaikan yaitu kualitas perencanaan yang detail dan *applicable* dalam penyusunan PoA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, penguatan *supporting* data dari tim pengelola keuangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

4.2. Rencana Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya adalah :

1. Mengevaluasi kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran atas capaian kinerja kegiatan dan anggaran pada triwulan I sebagai dasar perencanaan pencapaian target triwulan I.
2. Memelihara komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin efektivitas pelaksanaan SAKIP yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan.
3. Mengawal dan memantau pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas capaian masing-masing indikator kinerja.
4. Memantau secara serius serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian 6 (enam) IKU dengan capaian di bawah 100% yaitu :
 - i. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, sebesar 94.82%

- ii. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 91.15%
 - iii. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, sebesar 76.83%
 - iv. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 75.95%
 - v. Jumlah desa pangan aman, sebesar 74.07%
 - vi. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 31.95%
5. Menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan dan mengkaji kembali perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya yang mendukung capaian 5 (lima) indikator kinerja dengan nilai capaian di atas 120% yaitu :
- vii. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sebesar 566.67%
 - viii. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, sebesar 249.20%
 - ix. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya, sebesar 134.72%
 - x. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 133.90%
 - xi. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, sebesar 125%
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi.
7. Monitoring dan evaluasi implementasi inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi.
8. Melaksanakan rencana tindak lanjut yang direkomendasikan atas evaluasi pelaksanaan SAKIP triwulan I tahun 2023.



LAMPIRAN





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.

RENSTRA BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA 2020-2024

1. a. Rencana Kinerja Tahun 2023
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan 1 2023
4. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Kegiatan Triwulan 1 2023
5. Pengukuran Realisasi Indikator Triwulan 1 2023
6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Triwulan 1 2023
7. Pengukuran Kinerja BBPOM di Palangka Raya dan UPT BPOM lain yang setara Tahun 2023
8. RAPK Balai Besar POM Di Palangka Raya 2023

LAMPIRAN II.

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN (RHPK)

1. RHPK Pengujian Sampel
2. RHPK Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
3. RHPK Pengawasan Sarana Produksi
4. RHPK Pengawasan Sarana Distribusi
5. RHPK Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
6. RHPK Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
7. RHPK Pengawasan Iklan dan Penandaan Label
8. RHPK Sertifikasi
9. RHPK UMKM
10. RHPK Keberhasilan Penindakan di Bidang Obat dan Makanan
11. RHPK Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
12. RHPK PJAS aman
13. RHPK Desa Pangan Aman
14. RHPK Pasar Aman



LAMPIRAN II.


PENILAIAN DARI UNIT PUSAT/EKSTERNAL

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
5. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya
6. Tingkat Efektivitas KIE
7. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya
8. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya
9. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya
10. Indeks pengelolaan data dan informasi
11. Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA)
12. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Lampiran I. Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya 2020-2024

Lampiran I.1.a

Rencana Kinerja Tahun 2023



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya
Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096
email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA
NOMOR HK.02.02.21A.21A5.21A51.07.22.1597 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2023;

Mengingat :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- 2 -

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- 3 -

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.02.02.21A.21A51.12.21.2385 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2020-2024;

- 4 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 12 Juli 2022



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA

WANI ARDIYANTI

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

NOMOR HK.02.02.21A.21A5.21A51.07.22.1597 TAHUN
2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77

- 7 -

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89.20
		Nilai AKIP UPT	81.60
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	84

- 8 -

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.80



KORPORASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

YANI ARDIYANTI

Lampiran I.1.b

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Palangka Raya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 28 Desember 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Palangka Raya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.9
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67.76
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	68
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pengujian Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	89.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81.6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
21,461,208,000.00

Palangka Raya, 28 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. Safransyah, Apt., M.Kes

Lampiran I.1.c

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	223.780.800,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	156.382.550,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	134.292.800,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	75.814.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	43.091.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												77	138.598.500,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.9	25.883.600,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												67.76	890.699.940,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93	177.302.400,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	24.357.760,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	24.357.760,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81.796.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	39.683.820,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	
14.	Persentase sama distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	253.701.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT											4.40		678.901.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	22.5	32.5	40.5	51.5	60	68	85.5	94	97.5	79	33.934.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	62.839.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		10	20	20	45	55	70	70	90	68	68	68	525.520.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		10	27	27	44	49	59	73	79	85	95	25	953.647.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	10	20	30	40	50	61	72	82	91	98	100	865.174.900,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	10	20	30	40	50	61	72	82	91	98	100	797.776.650,00
22.	Persentase keberhasilan perindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			3.75	13.75	25	28.75	46.25	53.75	63.75	88.75	99	99	372.892.500,00
23.	Indeks RB UPT											89.2		5.709.916.100,00
24.	Nilai AKIP UPT											81.6		70.580.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											83		5.008.110.850,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											84		971.604.700,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	671.339.270,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	40	50	54	57	60	65	70	75	80	85	92	2.181.285.300,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		15	25	25	55	65	75	75	90	9	9	9	267.943.000,00
Total												21.461.208.000,00		

Palangka Raya, 28 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Drs. Safransyah, Apt., M.Kes

Lampiran I.2

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
<i>Stakeholder perspective</i>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	100	105.2	Memenuhi Ekspektasi
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	94.44	101.01	Memenuhi Ekspektasi
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	98.31	104.59	Memenuhi Ekspektasi
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	90.91	108.23	Memenuhi Ekspektasi
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96	100	104.17	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	N/A
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	N/A
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	N/A
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	N/A
<i>Internal process perspective</i>						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	69.15	76.83	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	23.96	31.95	Tidak Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72.73	111.89	Memenuhi Ekspektasi
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	88.37	133.89	Tidak Dapat Disimpulkan
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	N/A
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	22.5	56.07	249.2%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	90.74	94.82	Belum Memenuhi Ekspektasi
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	25	125%	Tidak Dapat Disimpulkan
		19. Jumlah desa pangan aman	27	20	74.07	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25	25	100%	Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	15.19	75.95	Belum Memenuhi Ekspektasi
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	17.51	87.55	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3.75	21.5	556.67	Tidak Dapat Disimpulkan
<i>Learning and growth perspective</i>						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	N/A
		25. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	N/A
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	26. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	0	0	0	N/A

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	N/A
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2.5	2.6	104	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	29. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	50	67.36	134.56	Tidak Dapat Disimpulkan

Kegiatan:

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palangka Raya Rp 8.396.070.000,-

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 13.056.138.000,-

Lampiran I.3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
	Koordinasi						
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	4	3	75%	52,887,000	4,105,000	7.76%
	Pelayanan Publik lainnya						
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	107	251	235%	12,680,000	7,290,000	57.49%
	Pemantauan produk						
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	18	22	122%	242,023,000	389,013,089	160.73%
	Komunikasi Publik						
4	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	6	12	200%	4,845,000	1,255,500	25.91%
	Sarana Bidang Kesehatan						
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.53	1	189%	0	136,792,587	N/A
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.6	6	1000%	0	65,990,000	N/A
	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
7	Layanan Umum	0.5	0.8	160%	96,686,000	85,930,000	88.88%
	Standarisasi Lembaga						
8	Lembaga pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	0.33	0.38	115%	315,627,000	290,490,792	92.04%
	Perkara Hukum Badan Usaha						
9	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BPOM di Palangka Raya	1	3	300%	133,017,250	97,131,500	73.02%
	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga						
10	Sekolah dengan Pangan	20%	25%	125%	273,064,000	146,689,034	53.72%

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran
	Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman						
11	Desa Pangan Aman	20%	20%	100%	137,620,000	32,863,000	23.88%
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	25%	25%	100%	33,420,000	9,505,980	28.44%
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	197	373	189%	91,971,000	29,092,700	31.63%
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM						
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	22.50%	56.67%	252%	7,110,000	5,721,465	80.47%
	Pengawasan dan Pengendalian Produk						
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	123	124	101%	33,565,000	18,267,570	54.42%
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	310	313	101%	114,680,000	62,895,794	54.84%
17	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	0	2	200%	4,000,000	0	0.00%
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	19	22	116%	22,396,000	10,640,000	47.51%
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa oleh UPT	96	86	90%	111,805,000	94,541,524	84.56%
	Layanan Perkantoran						
20	Layanan Perkantoran	0.25	0.25	100%	2,386,313,441	2,212,678,473	92.72%



Lampiran I.4

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
	Koordinasi						
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	7.76%	75%	9.66	1	8.66	Tidak Efisien
	Pelayanan Publik lainnya						
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	57.49%	235%	4.08	1	3.08	Tidak Efisien
	Pemantauan produk						
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	160.73%	122%	0.76	1	-0.24	Tidak Efisien
	Komunikasi Publik						
4	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25.91%	200%	7.72	1	6.72	Tidak Efisien
	Sarana Bidang Kesehatan						
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	N/A	189%	1.89	1	0.89	Efisien
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	N/A	1000%	10.00	1	9.00	Tidak Efisien
	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
7	Layanan Umum	88.88%	160%	1.80	1	0.80	Efisien
	Standarisasi Lembaga						
8	Lembaga pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	92.04%	115%	1.25	1	0.25	Efisien
	Perkara Hukum Badan Usaha						
9	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Palangka Raya	73.02%	300%	4.11	1	3.11	Tidak Efisien



No	Program/Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga						
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	53.72%	125%	2.33	1	1.33	Tidak Efisien
11	Desa Pangan Aman	23.88%	100%	4.19	1	3.19	Tidak Efisien
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	28.44%	100%	3.52	1	2.52	Tidak Efisien
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				1		
13	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	31.63%	189%	5.99	1	4.99	Tidak Efisien
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM						
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	80.47%	252%	3.13	1	2.13	Tidak Efisien
	Pengawasan dan Pengendalian Produk						
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54.42%	101%	1.85	1	0.85	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	54.84%	101%	1.84	1	0.84	Efisien
17	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	0.00%	200%	2.00	1	1.00	Efisien
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	47.51%	116%	2.44	1	1.44	Tidak Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa oleh UPT	84.56%	90%	1.06	1	0.06	Efisien
	Layanan Perkantoran						
20	Layanan Perkantoran	92.72%	100%	1.08	1	0.08	Efisien



Lampiran 1.5

Pengukuran Realiasi Indikator Triwulan 1 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realiasi Indikator	Capaian Indikator	Target Anggaran	Realiasi Anggaran	Capaian Anggaran
						4,073,709,691	3,734,933,582	91.68%
<i>Stakeholder perspective</i>								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	100	105.26%	28,670,000	15,714,949	54.81%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5	94.44	101.01%	8,518,750	4,736,360	55.60%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	98.31	104.59%	17,202,000	9,429,869	54.82%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	90.91	108.23%	5,034,750	2,740,136	54.42%
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96	100	104.17%	4,000,000	0	0.00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0.00%	15,289,200	814,540	5.33%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0.00%	5,679,000	3,570,866	62.88%
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas	0	0	0.00%	160,424,279	103,422,455	64.47%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realiasi Indikator	Capaian Indikator	Target Anggaran	Realiasi Anggaran	Capaian Anggaran
		kinerja pengawasan Obat dan Makanan						
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0.00%	27,810,200	4,406,406	15.84%
<i>Internal process perspective</i>								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	69.15	76.83%	4,873,840	4,006,596	82.21%
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	23.96	31.95%	4,873,840	4,006,596	82.21%
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100.00%	3,890,000	2,230,000	57.33%
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	72.73	111.89%	14,046,020	4,528,000	32.24%
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	88.37	133.89%	36,408,900	26,937,228	73.99%
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	0.00%	119,760,938	200,681,032	167.57%
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan	22.5	56	248.89%	5,919,000	4,232,733	71.51%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realiasi Indikator	Capaian Indikator	Target Anggaran	Realiasi Anggaran	Capaian Anggaran
		olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik						
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.7	90.74	94.82%	11,440,200	814,540	7.12%
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	25	125.00%	222,835,000	133,934,034	60.10%
		19. Jumlah desa pangan aman	27	20	74.07%	111,250,000	8,693,000	7.81%
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25	25	100.00%	33,420,000	9,505,980	28.44%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	18.46	92.30%	112,368,515	88,720,246	78.95%
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	18.23	91.15%	92,217,265	77,741,657	84.30%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3.75	21.25	566.67%	126,206,438	71,430,350	56.60%
<i>Learning and growth persepective</i>								
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	0	0	0.00%	1,155,029,514	1,284,161,890	111.18%
		25. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	0.00%	8,861,700	15,178,752	171.28%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realiasi Indikator	Capaian Indikator	Target Anggaran	Realiasi Anggaran	Capaian Anggaran
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	26. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	0	0	0.00%	1,035,971,337	1,098,718,971	106.06%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0.00%	270,866,000	169,855,188	62.71%
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	2.5	2.6	104.00%	126,386,267	87,507,263	69.24%
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	29. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	50	67.36	134.72%	304,456,738	297,213,948	97.62%



Lampiran I.6

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
<i>Stakeholder perspective</i>								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	54.81%	105.26%	1.92	1	0.92	Efisien
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	55.60%	101.01%	1.82	1	0.82	Efisien
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	54.82%	104.59%	1.91	1	0.91	Efisien
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	54.42%	108.23%	1.99	1	0.99	Efisien
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0.00%	104.17%	1.04	1	0.04	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	5.33%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	62.88%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.47%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya	15.84%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
<i>Internal process perspective</i>								



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82.21%	76.83%	0.93	1	-0.07	Tidak Efisien
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82.21%	31.95%	0.39	1	-0.61	Tidak Efisien
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	57.33%	100.00%	1.74	1	0.74	Efisien
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	32.24%	111.89%	3.47	1	2.47	Tidak Efisien
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.99%	133.89%	1.81	1	0.81	Efisien
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	167.57%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	71.51%	248.89%	3.48	1	2.48	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	7.12%	94.82%	13.32	1	12.32	Tidak Efisien
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	60.10%	125.00%	2.08	1	1.08	Tidak Efisien
		19. Jumlah desa pangan aman	7.81%	74.07%	9.48	1	8.48	Tidak Efisien
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	28.44%	100.00%	3.52	1	2.52	Tidak Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji	78.95%	92.30%	1.17	1	0.17	Efisien



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
			Input	Output				
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	sesuai standar						
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.30%	91.15%	1.08	1	0.08	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	56.60%	566.67%	10.01	1	9.01	Tidak Efisien
<i>Learning and growth persepective</i>								
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	111.18%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
		25. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	171.28%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	26. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	106.06%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	62.71%	0.00%	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	69.24%	104.00%	1.50	1	0.50	Efisien
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel	29. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya	97.62%	134.72%	1.38	1	0.38	Efisien

Lampiran 1.7 Pengukuran Kinerja BBPOM di Palangka Raya dan UPT BPOM lain yang setara tahun 2023



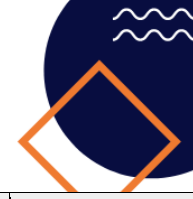
Lampiran 1.8

RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PER BULAN TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Target			Realisasi			Capaian			
			Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	
Stakeholder Perspective												
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	95	95	-	100	100	N/A	105.26%	105.26%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	93.5	93.5	-	100	94.44	N/A	106.95%	101.01%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	-	100	98.31	N/A	106.38%	104.59%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	-	87.5	90.91	N/A	104.17%	108.23%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang meemenuhi syarat	-	-	96	-	-	100	N/A	N/A	104.17%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di BBPOM di Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A



No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Target			Realisasi			Capaian			
			Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	
		Palangka Raya										
Internal Process Perspective												
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	90	90	-	72.31	69.15	N/A	80.34%	76.83%
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	75	75	-	56.88	23.96	N/A	75.84%	31.95%
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	100	63.64	72.73	153.85%	97.91%	111.89%
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	66	66	-	93.94	88.37	N/A	142.33%	133.89%
		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	5	10	22.5	10	10	56	200.00%	100.00%	248.89%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	95.7	0	0	90.74	0.00%	0.00%	94.82%
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	10	20	-	13	25	N/A	130.00%	125.00%
		19	Jumlah desa pangan aman	-	10	27	-	10	20	N/A	100.00%	74.07%
		20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	-	15	25	-	15	25	N/A	100.00%	100.00%



No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator		Target			Realisasi			Capaian		
				Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	10	20	2.44	10.88	18.46	244.00%	108.80%	92.30%
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	10	20	2.8	10.84	18.23	280.00%	108.40%	91.15%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	3.75	-	-	21.25	N/A	N/A	566.67%
Learning and Growth Perspective												
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
		25	Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palangka Raya yang optimal	-	2.5	2.5	-	2.6	2.6	N/A	104.00%	104.00%

No	Sasaran Kegiatan	Nama Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
			Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palangka Raya secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	20	40	50	21.58	54.1	67.36	107.90%	135.25%	134.72%

Lampiran 2.1

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUJIAN SAMPEL 2023

Jenis Produk	UPT	Metode Sampling	Target 1 tahun	SKI (indikator 1-5) s.d Maret										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah sampel diperiksa
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label /	Jumlah sampe	Jumlah Samp	Hasil uji					
					TIE/ legal /	kedaluarsa	rusak				M S	TM S*				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
1 Obat	Palangka Raya	Random	332	78	0	0	0	0	78	51	51	0	0	27	51	
			Kab KoBar	84	26	0	0	0	5	26	17	17	0	0	9	17
			dr balai/loka lain									25	0			
	Palangka Raya	Targeted	83	12	0	0	0	0	12	6	6	0	0	6	6	
			Kab KoBar	22	6	0	0	0	1	6	3	3	0	0	3	3
			dr balai/loka lain									2	0			
	TOTAL			521	122	0	0	0	6	122	77	77	0	0	45	77
				45					37	37	0					
				90					90	57	57	0	0			
2 Obat	Palangka Raya	Random	205	47	0	0	0	0	47	37	37	0	0	10	37	
			Kab KoBar	57	11	0	0	0	1	11	10	9	1	1	1	10
			dr balai lain regional									0	0			
	Palangka Raya	Targeted	88	21	0	0	0	0	21	19	18	1	1	2	19	
			Kab KoBar	24	7	0	0	0	2	7	7	5	2	2	0	7
			dr balai lain regional									0	0			
TOTAL			374	86	0	0	0	3	86	73	69	4	4	13	73	
				22					22	21	1					
				68					68	56	55	1	1			
3 Obat Kuasi	Palangka Raya	Random	16	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	
			Kab KoBar	4	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
			dr balai lain regional									0	0			
	Palangka Raya	Targeted	9	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	
			Kab KoBar	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dr balai lain regional									0	0			
TOTAL			31	8	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8	
				3					3	3	0					
				6					6	6	6	0	0			
4 Suplemen	Palangka Raya	Random	60	15	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15	
			Kab KoBar	15	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3
			dr balai lain regional									0	0			
	Palangka Raya	Targeted	26	7	0	0	0	0	7	5	5	0	0	2	5	
			Kab KoBar	6	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
			dr balai lain regional									0	0			
TOTAL			107	27	0	0	0	0	27	25	25	0	0	2	25	
				8					11	11	0					
				22					22	20	20	0	0			
5 Kosmetik	Palangka Raya	Random	429	87	0	0	0	0	87	57	57	0	0	30	57	
			Kab KoBar	112	24	0	0	0	4	24	12	11	1	1	12	12
			dr balai lain regional									0	0			
	Palangka Raya	Targeted	184	40	0	0	0	0	40	26	26	0	0	14	26	
			Kab KoBar	48	10	0	0	0	3	10	5	3	2	2	5	5
			dr balai lain regional									0	0			
TOTAL			773	161	0	0	0	7	161	100	97	3	3	61	100	
				44					16	16	0					
				127					127	83	83	0	0			
6 Rokok	Palangka Raya	Targeted	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kab KoBar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		Palangka Raya	Random	1042	230	0	0	0	0	230	163	163	0	0	67	163
			Targeted	394	83	0	0	0	0	83	59	58	1	1	24	59
			Total	1436	313	0	0	0	0	313	222	221	1	1	91	222

Jenis Produk	UPT	Metode Sampling	Target 1 tahun	SKI (indikator 1-5) s.d Maret										Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah sampel diperiksa
				Jumlah sampling	T M K			T M K Label /	Jumlah sampel	Jumlah Samp	Hasil uji					
					TIE/Illegal /	kedaluarsa	rusak				M S	T M S*				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																
1	Pangan	Palangka Raya	Random	427	72	0	0	0	4	72	54	51	3	3	18	54
		Kab KoBar		162	27	0	0	0	0	27	21	21	0	0	6	21
		dr balai lain regional		126												
		Palangka Raya	Targeted	122	52	0	0	0	5	52	44	40	4	4	8	44
		Kab KoBar		38	15	0	0	0	0	15	13	12	1	1	2	13
		dr balai lain regional		0												
		TOTAL		875		166	0	0	0	9	166	132	124	8	8	34
				46						41	38	3				
Sampel Fortifikasi yang diperiksa sesuai standar																
1	Pangan Fortifikasi	Palangka Raya	Targeted	75	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2
					0					2	2	0				
	TOTAL	Palangka Raya	Random	427	72	0	0	0	4	72	54	51	3	3	18	54
			Targeted	122	52	0	0	0	5	52	44	40	4	4	8	44
			Total	549	124	0	0	0	9	124	98	91	7	7	26	98
					46					41	38	3				
			+ Forti	624	126	0	0	0	9	126	100	93	7	7	26	100
										19,60						
		Kab KoBar	Random	162	27	0	0	0	0	27	21	21	0	0	6	21
			Targeted	38	15	0	0	0	0	15	13	12	1	1	2	13
				200	42	0	0	0	0	42	34	33	1	1	8	34
										16,19						
		Balai lain regional	Random													
			Targeted													
		P. Raya - KoBar	Total	749	166	0	0	0	9	166	132	124	8	8	34	132
					61						59	56	3			

Lampiran 2.2

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
SAMPSEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 2023

	Jenis Produk	UPT	Metode Sampling	Target 1 tahun	SK 6 s.d Maret			
					Sampel diperiksa dan diuji sesuai standar			
					Target sampel yang	Jumlah sampel yang diperiksa	Sampel yang masuk ke	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar								
1	Obat	Palangka Raya	Random	332	332	0	332	13
		Kab KoBar		84	84	26	84	2
		dr balai/loka lain					0	25
		Palangka Raya	Targeted	83	83	0	83	1
		Kab KoBar		22	22	6	22	0
		dr balai/loka lain					0	2
		TOTAL		521	521	32	521	43
2	Obat	Palangka Raya	Random	205	205	47	205	37
		Kab KoBar		57	57	11	57	10
		dr balai lain regional					0	0
		Palangka Raya	Targeted	88	88	21	88	19
		Kab KoBar		24	24	7	24	7
		dr balai lain regional					0	0
		TOTAL		374	374	86	374	73
3	Obat Kuasi	Palangka Raya	Random	16	16	3	16	3
		Kab KoBar		4	4	2	4	2
		dr balai lain regional					0	0
		Palangka Raya	Targeted	9	9	3	9	3
		Kab KoBar		2	2	0	2	0
		dr balai lain regional					0	0
		TOTAL		31	31	8	31	8
4	Suplemen	Palangka Raya	Random	60	60	15	60	15
		Kab KoBar		15	15	3	15	3
		dr balai lain regional					0	0
		Palangka Raya	Targeted	26	26	7	26	5
		Kab KoBar		6	6	2	6	0
		dr balai lain regional					0	0
		TOTAL		107	107	27	107	23
5	Kosmetik	Palangka Raya	Random	429	429	87	429	57
		Kab KoBar		112	112	24	112	12
		dr balai lain regional					25	25
		Palangka Raya	Targeted	184	184	40	184	26
		Kab KoBar		48	48	10	48	5
		dr balai lain regional					0	0
		TOTAL		773	773	161	798	125
6	Rokok	Palangka Raya	Targeted	4	4	0		0
		Kab KoBar		0	0	0		0
		TOTAL		4	4	0	0	0
TOTAL	Palangka Raya	Random	1042	1042	152	1042	125	
		Targeted	394	394	71	390	54	
		Total	1436	1436	223	1432	179	

	Jenis Produk	UPT	Metode Sampling	Target 1 tahun	SK 6 s.d Maret				
					Sampel diperiksa dan diuji sesuai standar				
					Target sampel yang	Jumlah sampel yang diperiksa	Sampel yang masuk ke	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar									
1	Pangan	Palangka Raya	Random	427	427	68	427	54	
		Kab KoBar		162	162	27	162	21	
		dr balai lain regional		126			15	12	
			Palangka Raya	Targeted	122	122	47	122	44
			Kab KoBar		38	38	15	38	13
			dr balai lain regional		0				
			TOTAL		875	749	157	764	144
Sampel Fortifikasi yang diperiksa sesuai standar									
1	Pangan Fortifikasi	Palangka Raya	Targeted	75	75	2	75	2	
	TOTAL	Palangka Raya	Random	427	427	68	427	54	
			Targeted	122	122	47	122	44	
			Total	549	549	115	549	98	
							37		
			+ Forti	624	624	117	624	100	
			Kab KoBar	Random	162	162	27	162	21
				Targeted	38	38	15	38	13
				200	200	42	200	34	

Lampiran 2.3

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI 2023

NO	Sarana Produksi	UP T	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			s.d Februari			Maret			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K
1	Industri Farmasi (IF)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Industri Bahan Baku Obat	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NO	Sarana Produksi	UP T	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			s.d Februari			Maret			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Obat Kuasi	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

N O	Sarana Produksi	UP T	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			s.d Februari			Maret			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K
10	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Industri Kosmetik	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Farmasi/ Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	P Raya	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Industri Pangan	P Raya	0	5	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0

NO	Sarana Produksi	UP T	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			s.d Februari			Maret			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah sarana yang diperiksa	M K	TM K
15	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	P. Raya	0	69	0	0	0	10	6	4	10	6	4	10	8	2	20	14	6
	Total BB/BPOM		0		1	1	0	10	6	4	11	7	4	11	9	2	22	16	6

Lampiran 2.4

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Januari			Februari			Maret			s.d Maret		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	PBF	10	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
2	IFP	11	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
3	PKM	44	0	0	0	2	2	0	2	1	1	4	3	1
4	RS	19	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1
5	KLINIK	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	APOTEK	53	2	2	0	7	6	1	12	11	1	21	19	2
7	TOKO OBAT	15	0	0	0	2	1	1	1	1	0	3	2	1
8	OT	71	1	1	0	5	5	0	1	1	0	7	7	0
9	SK	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kosmetik - Notif	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kosmetik - Non Notif	73	1	1	0	9	9	0	4	3	1	14	13	1
12	Klinik kecantikan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kantor Kesehatan Pelabuhan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pangan Olahan	127	2	2	0	0	0	0	29	25	4	31	27	4
	Total BB/BPOM	465	7	7	0	26	24	2	53	45	8	86	76	10

Lampiran 2.6

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI DITINDAK LANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan														keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
TL Pelaku usaha							TL Instansi lain							
Rekomendasi (penyebut)			TL (pembilang)			capaian	Rekomendasi (penyebut)			TL (pembilang)			capaian	
carry over	tahun	total	carry over	tahun	total		carry over	tahun	total	carry over	tahun	total		
JANUARI														
51	0	51	7	0	7	13,73	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	26	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
78	0	78	7	0	7	8,97	0	0	0	0	0	0	0	8,97
FEBRUARI														
0	2	2	2	0	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	1	100,00	
0	2	2	4	0	4	200,00	0	1	1	0	1	1	100,00	
MARET														
0	11	11	0	2	2	18,18	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	1	1	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
0	4	4	0	0	0	0,00	0	2	2	0	0	0	0,00	
0	16	16	0	3	3	18,75	0	2	2	0	0	0	0,00	
78	18	96	11	3	14	14,58	0	3	3	0	1	1	33,33	23,96

Lampiran 2.7

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN LABEL

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan		
			Januari	Februari	Maret
Obat	Iklan	MK	5	10	22
		TMK	0	0	0
		TOTAL	5	10	22
	Label	MK	5	40	45
		TMK	0	0	0
		TOTAL	5	40	45
Obat tradisional	Iklan	MK	10	7	15
		TMK	0	0	0
		TOTAL	10	7	15
	Label	MK	22	27	22
		TMK	0	0	0
		TOTAL	22	27	22
Suplemen Kesehatan	Iklan	MK	2	7	8
		TMK	0	0	2
		TOTAL	2	7	10
	Label	MK	12	2	8
		TMK	0	0	0
		TOTAL	12	2	8
Kosmetik	Iklan	MK	25	27	27
		TMK	0	0	0
		TOTAL	25	27	27
	Label	MK	36	47	44
		TMK	0	0	0
		TOTAL	36	47	44
Pangan	Iklan	MK	6	8	12
		TMK	0	0	0
		TOTAL	6	8	12
	Label	MK	19	45	4
		TMK	0	3	1
		TOTAL	19	48	5
Rokok	Iklan	MK	20	30	19
		TMK	0	6	18
		TOTAL	20	36	37

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan		
			Januari	Februari	Maret
	Label	MK	0	13	14
		TMK	0	4	0
		TOTAL	0	17	14
TOTAL	Iklan	MK	68	89	103
		TMK	0	6	20
		TOTAL	68	95	123
	Label	MK	94	174	137
		TMK	0	7	1
		TOTAL	94	181	138
			94	275	413





Lampiran 2.8

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Jenis Layanan	UPT	Target		Januari		Februari		Maret	
			volume	satuan	Volume	Nama Sarana	Volume	Nama Sarana	Volume	Nama Sarana
1	Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB	balai	2	Keputusan	0	-	0	-	0	-
2	Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB	balai	0	Keputusan	0	-	0	-	0	-
3	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPROB (Skala Usaha Menengah & Besar)	balai	0	Keputusan	0	-	0	-	0	-
4	Izin Penerapan CPROB skala UMK	balai	4	Keputusan	0	-	3	1. Murni Maulana / HGI 2. Dedi Setiadi / PT. Kaltfood Bumi Sejahtera 3. Artika / Dapur Nyak Nonong	2	1. CV Tiara Catur Utama 2. CV Agro Borneo
5	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPROB untuk UMK	balai	0	Keputusan	0	-	3	1. Murni Maulana / HGI 2. Dedi Setiadi / PT. Kaltfood Bumi Sejahtera 3. Artika / Dapur Nyak Nonong	2	1. CV Tiara Catur Utama 2. CV Agro Borneo

No	Jenis Layanan	UPT	Target		Januari		Februari		Maret	
			volume	satuan	Volume	Nama Sarana	Volume	Nama Sarana	Volume	Nama Sarana
6	Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO	balai	1	Keputusan	0	-	0	-	0	-
7	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA	balai		Sertifikat	0	-	2	1. Obat Lain / PT. Tri Sapta Jaya 2. CCP / PT. Tri Sapta Jaya	0	-
8	Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos	balai	0	Keputusan	0		0		0	
6	Penerbitan SKI/SKE	balai	0	Keputusan	0	-	0	-	0	-
7	Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga	balai	729	Sertifikat	68	Pengujian Sampel Pihak ke-3	106	Pengujian Sampel Pihak ke-3	70	Pengujian Sampel Pihak ke-3
Total balai			736		68		114		74	

Lampiran 2.9

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
UMKM 2023

Komoditi	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target Pelaksanaan	target UMKM tahun n	target UMKM sd tahun n	Progres (Capaian DJA) akumulatif		
							Januari	s.d Februari	s.d Maret
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10	Februari	3		10	10	10,0
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20	Maret-April					6,7
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40	Maret-Oktober					13,3
	4	Sertifikasi	20	Sept-Nov					
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10	tiap tw					2,5
	Total skor		100					10	10
Pangan	1	Seleksi target UMKM Pangan	10	Januari - Maret	13		10	10	10,0
	2	Bimtek CPPOB	20	April - Mei					7,7
	3	Fasilitasi pendampingan	40	Juni - September					15,0
	4	PSB Sertifikasi CPPOB	20	Oktober - November					8,0
	5	Pelaporan ke BPOM	10	Desember					2,5
	Total skor		100					10	10
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap	10	Januari	1		10	10	10,0

Komoditi	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Pelaksanaan	target UMKM tahun n	target UMKM sd tahun n	Progres (Capaian DJA) akumulatif		
						Januari	s.d Februari	s.d Maret
	UPT							
	2 BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40	Februari - Maret					40,0
	3 Pelaksanaan Pendampingan	40	Feb - Nov					40,0
	4 Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Roren	10	November					2,5
	Total skor	100				10	10	92,5



Lampiran 2.10

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBERHASILAN PENINDAKAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 2023

Tahapan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
JANUARI											
SPDP	4	0	1		1,00		0,15	15,00%	15,00%	25,00%	3,75%
Tahap I			0	0	0,00	0,00	0,4	0,00%			
P21			0	0	0,00	0,00	0,3	0,00%			
Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
Total	4	0	1	0							
FEBRUARI											
SPDP	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	55,00%	25,00%	13,75%
Tahap I			1	0	1,00	0,00	0,4	40,00%			
P21			0	0	0,00	0,00	0,3	0,00%			
Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
Total	4	0	1	0							
MARET											
SPDP	4	0	2		1,00		0,15	15,00%	28,33%	75,00%	21,25%
Tahap I			1	0	0,33	0,00	0,4	13,33%			
P21			0	0	0,00	0,00	0,3	0,00%			
Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
Total	4	0	3	0							



Lampiran 2.11

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 2023

No	Tahapan kegiatan	Target		Januari		Februari		Maret	
		volume	satuan	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi
	KIE Media sosial	12		1	15 (FB, Twitter dan IG) : obat (2); pangan (1); lain-lain (12)	1	16(FB, Twitter dan IG) : RB (2); obat (2); pangan (2); Napza (1); Kosmetik (3) lain-lain (6)	1	36(FB, Twitter dan IG), 1 (youtube) : RB (2); obat (3); pangan (16); lain-lain (15)
				1		2		3	
	ULPK (jumlah layanan)	12		1	36: Pengujian sampel (22); layanan informasi (9); sertifikasi (3); Penelitian Mahasiswa(2)	1	76: Pengujian sampel (55); layanan informasi (14); sertifikasi (5); Penelitian Mahasiswa(2)	1	43: Pengujian sampel (35); layanan informasi (5); sertifikasi (1); Penelitian Mahasiswa(2)
				1		2		3	
	Penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan/atau media elektronik dihitung terhadap jumlah topik dan/atau media, sebagai contoh : a. Jika topik sama ditayangkan di 2 media maka dihitung 2 b. Jika ada 2 topik ditayangkan pada media yang sama maka dihitung 2 c. Untuk spanduk/leaflet/banner/poster,dll					1	media cetak (Tabengan: Peringatan Hari Pers Nasional) tgl 11 Februari 2023	4	Lauching UMKM berdikari di media cetak (kalteng Pos), media elektronik (TVRI Kalteng, Kalteng.today, Inews)

No	Tahapan kegiatan	Target		Januari		Februari		Maret	
		volume	satuan	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi	Volume	Topik, Tanggal, Lokasi
	Jika topiknya sama maka dihitung			0		1		5	
	SMS Blast dihitung jumlah paket kegiatan yang dapat berisi beberapa isu yang dipublis			0		0		0	
	pada jenis transportasi dihitung per jenis transportasi			0		0		0	
	melalui media luar ruang (videotron, baliho, dll) dihitung per jenis lokas					1	Baliho di area publik BBPOM di Palangka Raya (maklumat pelayanan dan standar pelayanan)		
				0		1		1	
	Total Publikasi balai	24		2		4		6	
		0		2		6		12	



Lampiran 2.12

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKOLAH DIINTERVENSI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH AMAN 2023

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Pelaksanaan	Progres (Capaian DJA) akumulatif		
			Januari	s.d Februari	s.d Maret
1 Advokasi Lintas Sektor PJAS	20	Jan-April	5	13	20
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	10	Maret-April	0	0	5
3 Bimtek Keamanan Pangan untuk kader keamanan pangan Sekolah:	15	April-Juni	0	0	0
4 Pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan	10	April-November	0	0	0
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	Juli-September	0	0	0
a) Pembentukan Tim KP sekolah					
b) Intervensi KP kpd komunitas sekolah oleh kader KP sekolah					
6 Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman	20	Agustus-November	0	0	0
7 Pengawasan	10	Oktober-Desember	0	0	0
Total skor	100		5	13	25



Lampiran 2.13

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
DESA PANGAN AMAN 2023

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres (Capaian DJA) akumulatif		
			Januari	s.d Februari	s.d Maret
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20	jan - april	0	10	20
2 Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5	tw1 - tw2	0	0	0
3 Pelatihan kader KP desa (KKPD)	15	april - juli	0	0	0
4 Bimtek Komunitas	15	mei - okt	0	0	0
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10	juni - november	0	0	0
6 Intensifikasi Pengawasan KP	10	pre. mei - okt post. juni - nov	0	0	0
7 monev (pertemuan lintas sektor)	10	nov - des	0	0	0
8 Lomba Desa Pangan Aman	5	desember	0	0	0
9 Pengawasan	10	juni-desember	0	0	0
Total	100		0	10	20

Lampiran 2.14

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Progres (Capaian DJA) akumulatif		
			Januari	s.d Februari	s.d Maret
1 Advokasi	20	Januari-April	0	10	20
2 Survey Pasar	5	Januari-April	0	5	5
3 Bimtek Pengelola Pasar	15	April-Mei	0	0	0
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15	April-Mei	0	0	0
5 Penyuluhan	10	Juni-Juli	0	0	0
6 Kampanye	10	Juni-Juli	0	0	0
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15	Sept-Okt	0	0	0
8 Pengawasan	10	Februari-Okt	0	0	0
Total	100		0	15	25



Lampiran 3.1

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (*AWARENESS INDEX*) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU





Lampiran 3.2

**INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**





Lampiran 3.3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN





Lampiran 3.4

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAN LAYANAN PUBLIK





Lampiran 3.5

INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI PALANGKA RAYA





Lampiran 3.6

TINGKAT EFEKTIVITAS KIE





Lampiran 3.7

INDEKS RB BBPOM DI PALANGKA RAYA





Lampiran 3.8

NILAI AKIP BBPOM DI PALANGKA RAYA





Lampiran 3.9

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI PALANGKA RAYA




Lampiran 3.10

INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

	Pemutakhiran BOC		Pemanfaatan SI			
	SIPT	SPIMKer	email	BOC	sharing folder	berita aktual
Akumulasi sampai dengan Maret	80%	20%	25%	25%	25%	25%
	2.6	0.6	3	3	3	3
	2.2		3			
	2.6					

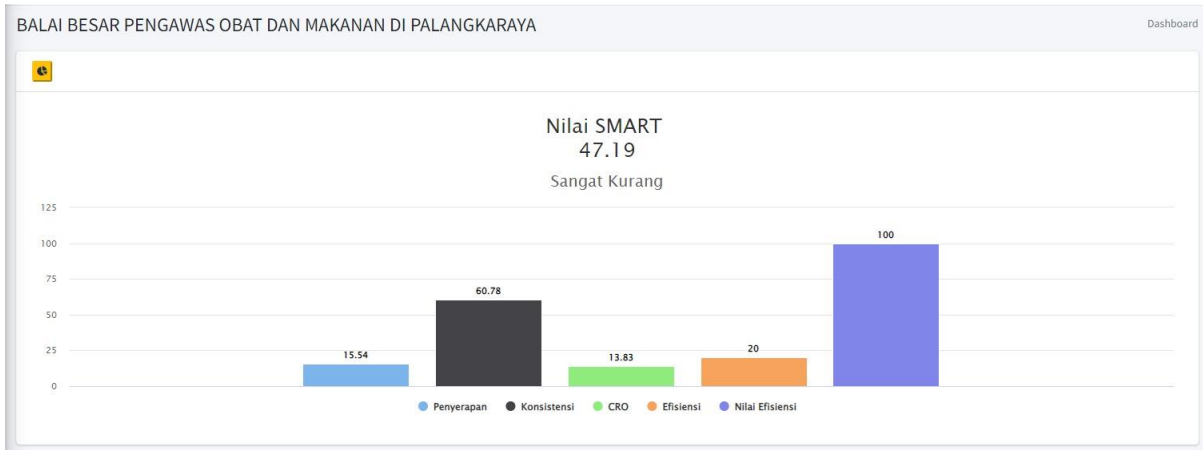
Lampiran 3.11

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN (IKPA)

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA																	
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																	
Sampai Dengan : MARET																	
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	043	063	432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	83.41	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.08	97.61	100%	97.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.34	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.27				
					Nilai Aspek	91.71		100.00					97.08				

Lampiran 3.12

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)





LAPORAN KINERJA

Interim Triwulan 1

2022